



RENJA 2024

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN



DINAS KESEHATAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : /BPP/Dinas Kesehatan/2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PENYESUAIAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10);
- 21 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pariaman yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

- 1 Rencana Kerja Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- 2 Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b.Landasan penyusunan rancangan KUA Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024; dan
 - c.Landasan Penyusunan rancangan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

- 1 Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |

Parit Malintang, 6 November 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



dr. H. Aspinuddin
NIP. 19640501 199803 1 001



RENCANA KERJA 2024

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra OPD. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kesehatan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman

Parit Malintang, 6 November 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



dr. H. Aspinuddin

NIP. 19640501 199803 1 001



RENCANA KERJA 2024

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------------|--|------------|
| DAFTAR ISI | 5 | |
| DAFTAR TABEL | 6 | |
| DAFTAR GAMBAR | 9 | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 10 |
| 1.1 | Latar Belakang | 10 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 16 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 18 |
| 1.4 | Sistematika Dokumen Rencana Kerja | 19 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 23 |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 23 |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 74 |
| 2.3 | Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 170 |
| 2.4 | Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja | 183 |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan | 204 |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 217 |
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 217 |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 219 |
| 3.3 | Program dan Kegiatan | 226 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 233 |
| BAB V | PENUTUP | 258 |



RENCANA KERJA 2024

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| Tabel 1.1 | Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 | 12 |
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 24 |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 | 54 |
| Tabel 2.3 | Pengukuran dengan Skala Ordinal | 74 |
| Tabel 2.4 | Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 (Renstra 2016-2021) | 75 |
| Tabel 2.5 | Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 (Renstra 2021-2026) | 77 |
| Tabel 2.6 | Permasalahan Pelayanan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 79 |
| Tabel 2.7 | Permasalahan Pelayanan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 83 |
| Tabel 2.8 | Permasalahan Pelayanan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 85 |
| Tabel 2.9 | Permasalahan Pelayanan Balita Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 87 |
| Tabel 2.10 | Permasalahan Pelayanan Usia Produktif Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 90 |
| Tabel 2.11 | Permasalahan Pelayanan Usia Lanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 93 |
| Tabel 2.12 | Permasalahan Pelayanan Hipertensi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 96 |
| Tabel 2.13 | Permasalahan Pelayanan Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 98 |
| Tabel 2.14 | Permasalahan Pelayanan ODGJ Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 101 |
| Tabel 2.15 | Permasalahan Pelayanan Tuberculosis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 103 |
| Tabel 2.16 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 106 |
| Tabel 2.17 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 113 |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 2.18 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Kecamatan Sehat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 123 |
| Tabel 2.19 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 126 |
| Tabel. 2.20 | Cakupan IKS kabupaten Padang pariaman Tahun 2022 | 127 |
| Tabel 2.21 | Standar Ketenagaan Puskesmas | 129 |
| Tabel 2.22 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Puskesmas dengan Tenaga Sesuai Standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 129 |
| Tabel 2.23 | Data Puskesmas dengan Jumlah Tenaga Sesuai Standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 130 |
| Tabel 2.24 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator IRT-P yang Diawasi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 133 |
| Tabel 2.25 | Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rumah Tangga PHBS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 | 135 |
| Tabel 2.26 | Puskesmas Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tahun 2022 | 141 |
| Tabel 2.27 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 (Renstra 2016-2021) | 145 |
| Tabel 2.28 | Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 (Renstra 2021-2026) | 147 |
| Tabel 2.29 | Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022 | 151 |
| Tabel 2.30 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan | 164 |
| Tabel 2.31 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering | 164 |
| Tabel 2.32 | Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 165 |
| Tabel 2.33 | Permasalahan dan Hambatan Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi | 166 |
| Tabel 2.34 | Hasil Identifikasi Isu Strategis | 172 |
| Tabel 2.35 | Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 | 184 |
| Tabel 2.36 | Usulan Program/ Kegiatan Dari Masyarakat | 205 |
| Tabel 3.1 | Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 | 218 |
| Tabel 3.2 | Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 | 220 |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 3.3 | Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 | 224 |
| Tabel 3.4 | Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 | 225 |
| Tabel 3.5 | Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 | 226 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 234 |



RENCANA KERJA 2024

DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|------------|---|-------|----|
| Gambar 1.1 | Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja | | 11 |
| Gambar 1.2 | Pendekatan Secara Substansi Penyusunan Renja Tahun 2024 | | 13 |
| Gambar 1.3 | Pendekatan Secara Proses Penyusunan Renja Tahun 2024 | | 14 |
| Gambar 1.4 | Penggunaan Aplikasi SIPD Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024 | | 15 |



**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian Renja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan.
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

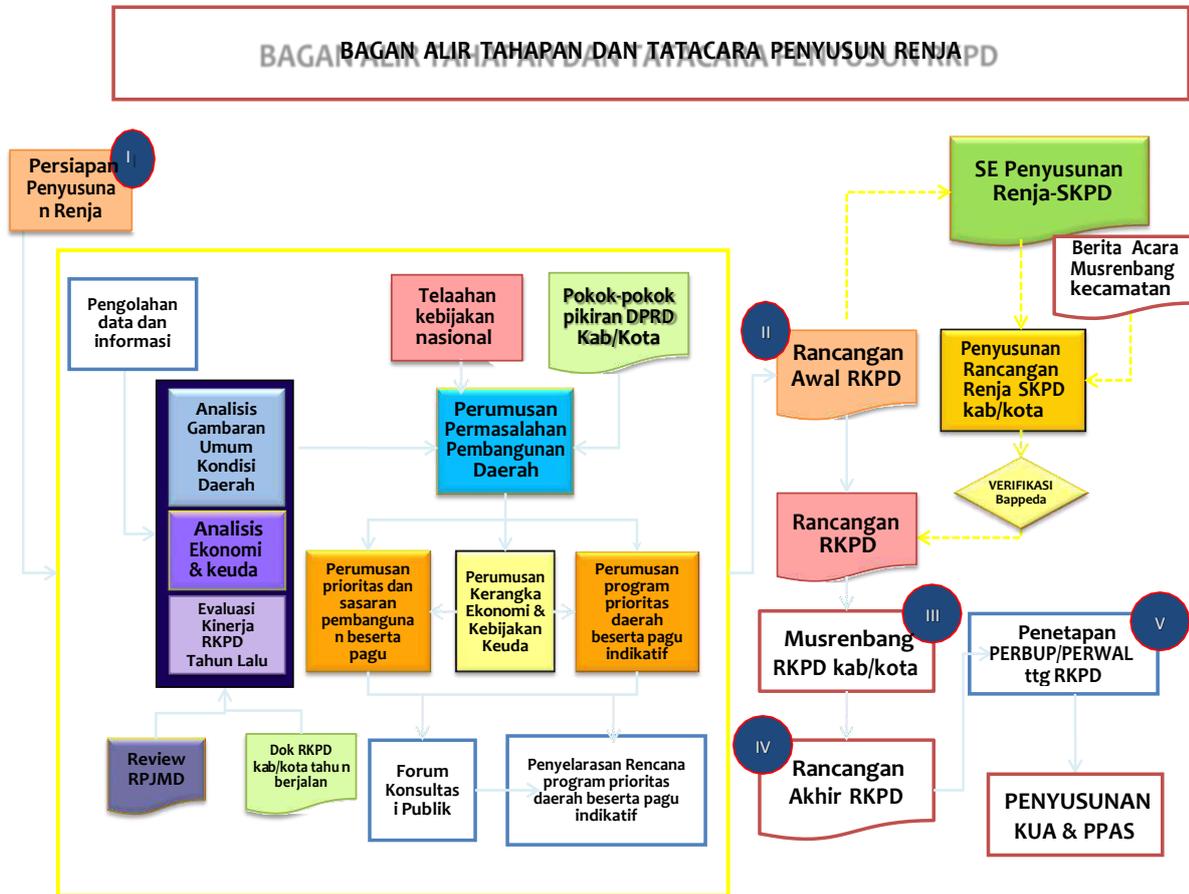
Penyusunan Renja berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan oleh Bupati Padang Pariaman dalam implementasi RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.



RENCANA KERJA 2024

Adapun tahapan Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :





RENCANA KERJA 2024

Jadwal Penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 1.1.
Kalender Perencanaan Penyusunan RKPD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|---|------------------------------|
| 1. | Persiapan Penyusunan RKPD <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data dan informasi - Penyusunan SK Tim Penyusunan RKPD | Des 2022 – Januari 2023 |
| 2. | Penyusunan Rancangan Awal RKPD <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan Awal RKPD - Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD - Pelaksanaan Musrenbang Nagari dan Kecamatan | Januari 2023 – April 2023 |
| No. | Kegiatan | Tanggal |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Rancangan Awal RKPD dan SuratEdaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah - Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah - Verifikasi Rancangan Awal Renja PerangkatDaerah | |
| 3. | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 - Penyampaian Surat Edaran Rancangan RKPD dan Jadwal Pelaksanaan Musrenbang RKPD TingkatKabupaten | Maret-April 2023 |
| 4. | Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten | Mei 2023 |
| 5. | Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Draft Rancangan Akhir RKPD - Pembahasan Rancangan akhir bersama Perangkat Daerah | Mei – Juni 2023 |
| 6. | Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD ke Bappeda PropinsiSumbar | Juni 2023 |
| 7. | Penetapan RKPD Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2024 - Penyusunan Rancangan Perbub RKPD - Penetapan Perbub RKPD Tahun 2024 | Juli 2023 |
| 8. | Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Rancangan Akhir Renja PerangkatDaerah - Penetapan Renja Perangkat Daerah | Juli 2023 |

Proses Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dilakukan secara terpadu antar Bidang, sehingga memungkinkan untuk melengkapi dan saling memberi masukan yang diarahkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju pencapaian Visi Bupati Padang Pariaman Tahun Tahun 2021-2026 yaitu : **“Padang Pariaman Berjaya.”**

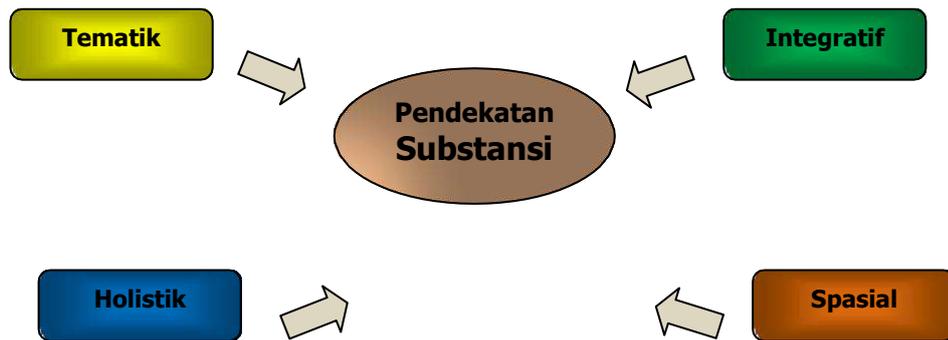


RENCANA KERJA 2024

Proses penyusunan Renja melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui inovasi kebijakan yang didasarkan pada kebijakan *moneyfollows program*. Agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang sesuai dengan syarat teknis perencanaan serta memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya yang dilaksanakan melalui pendekatan secara substansi dan pendekatan secara proses.

Pendekatan secara substansi melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan spasial.

Gambar 1.2
Pendekatan Secara Substansi Penyusunan Renja Tahun 2024



1. Pendekatan secara tematik adalah tema dan prioritas Renja yang berdasarkan dari hasil evaluasi, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun sebelumnya dan isu strategis yang berkembang di daerah.
2. Pendekatan secara holistik adalah pendekatan menyeluruh dan komprehensif dari hulu ke hilir
3. Pendekatan secara integratif adalah pembagian urusan dan kewenangan antara pusat dan daerah termasuk integrasi pendanaan seperti halnya bahwa perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD) integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD).
4. Pendekatan perencanaan spasial adalah keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi.

Di samping memenuhi pendekatan sebagaimana yang disebutkan di atas, penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 juga dilakukan melalui pendekatan proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*.

Gambar 1.3
Pendekatan Secara Proses Penyusunan Renja Tahun 2024



RENCANA KERJA 2024



1. Pendekatan secara teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan pemangku kepentingan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pendekatan secara partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024
3. Pendekatan secara politis dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan pemerintah kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.
4. Pendekatan secara top down dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021- 2026 serta arahan dari pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
5. Pendekatan secara bottom up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan daerah.

Berdasarkan pendekatan tersebut diatas maka ditetapkan Tema Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai berikut :

“Percepatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan SDM Berkualitas Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.”

dengan 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah;



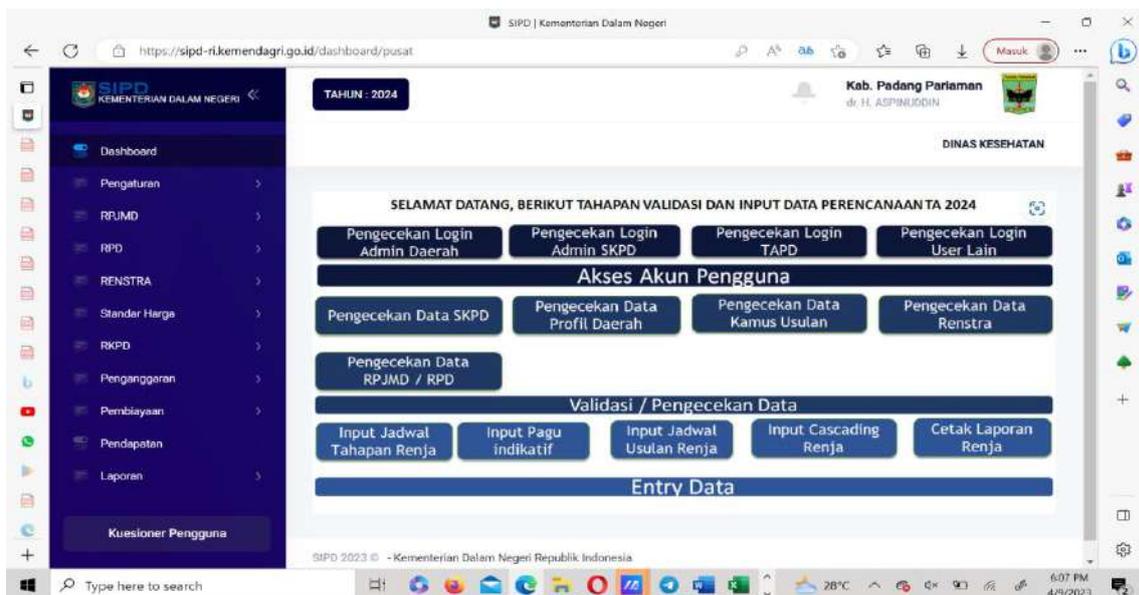
RENCANA KERJA 2024

4. Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
5. Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah;
6. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang;
7. Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional;

Dalam penyusunan Renja Tahun 2024 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dimana Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang tersusun akan di upload kedalam Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD) yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Renja Tahun 2024 untuk Pelaksanaan KUA-PPAS telah berpedoman Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mengacu Pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Gambar 1.4.

Penggunaan Aplikasi SIPD RI Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2024



1.1.1 Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).



RENCANA KERJA 2024

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan representasi dari Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2024 memuat program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024, hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil Musrenbang serta disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tertuang dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan KUA Tahun 2024 dan rancangan PPAS Tahun 2024 untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Penyusunan KUA-PPAS digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

1.1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja K/L dan Renja Provinsi

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi, yang juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, Renja Dinas Kesehatan diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Renja Dinas Kesehatan juga akan menjadi dasar penyusunan dokumen KUA dan PPAS. Dokumen KUA dan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 serta dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, dokumen Renja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan



RENCANA KERJA 2024

- Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;



RENCANA KERJA 2024

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
22. Peraturan Bupati Nomor 47 nomor 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 guna mencapai sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Renja memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.



RENCANA KERJA 2024

2. Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :
 - 1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.
 - 2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
 - 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kesehatan disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra



RENCANA KERJA 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;



RENCANA KERJA 2024

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).
- Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 - 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.



RENCANA KERJA 2024

- d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.



RENCANA KERJA 2024

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

1. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2023

Dalam Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merencanakan Belanja sebesar Rp. 186.652.536.580,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang direncanakan untuk membiayai:

- a) Belanja Pegawai : Rp. 105.883.305.663,00
- b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 64.505.316.773,00
- c) Belanja Modal : Rp. 16.128.914.144,00
- d) Belanja Hibah : Rp. 150.000.000,00
- e) **Total Belanja : Rp. 186.652.536.580,00**

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp. 167.975.711.909,00. Jumlah tersebut mencapai 89,99% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 186.652.536.580,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Dengan rincian realisasi:

- a) Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 101.402.405.491,00 atau 95,77 %
- b) Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp.54.035.865.697,00 atau 83,77 %
- c) Realisasi belanja hibah sebesar Rp 135.000.000,00 atau 100%
- d) Realisasi belanja modal sebesar Rp 12.402.440.721,00 atau 76,90 %

Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2022

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | PENCAPAIAN KINERJA | | | ANGGARAN | REALISASI | % |
|--|--|--------------------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | | |
| TOTAL | | | | | 62,535,464,228.00 | 53,141,109,776.00 | 84,97 |
| PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 10,166,337,032.00 | 8,655,736,989.00 | 85,1 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 487,310,400.00 | 484,373,175.00 | 99.40 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | 12 | Bulan | 38,349,000.00 | 38,181,900.00 | 99.56 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 12 | 12 | Bulan | 106,703,040.00 | 106,325,570.00 | 99.65 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12 | 12 | Bulan | 67,500,190.00 | 67,236,390.00 | 99.61 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- | 12 | 12 | Bulan | 77,610,000.00 | 77,192,212.00 | 99.46 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|------------------|------------------|--------|
| | SKPD | | | | | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 12 | 12 | Bulan | 63,500,000.00 | 63,317,803.00 | 99.71 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 | 12 | Bulan | 80,998,170.00 | 80,466,670.00 | 99.34 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 | 12 | Bulan | 52,650,000.00 | 51,652,630.00 | 98.11 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 422,028,880.00 | 420,921,397.00 | 99.74 |
| 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | 12 | Bulan | 73,021,000.00 | 72,969,000.00 | 99.93 |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 | 12 | Bulan | 78,311,100.00 | 77,998,780.00 | 99.60 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | 12 | Bulan | 63,458,000.00 | 63,440,800.00 | 99.97 |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 12 | 12 | Bulan | 69,920,500.00 | 69,843,500.00 | 99.89 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | 12 | Bulan | 70,968,160.00 | 70,787,719.00 | 99.75 |
| 6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 12 | 12 | Bulan | 66,350,120.00 | 65,881,598.00 | 99.29 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 116,885,000.00 | 114,950,786.00 | 98.35 |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12 | 12 | Bulan | 48,685,000.00 | 47,536,800.00 | 97.64 |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | 12 | Bulan | 41,200,000.00 | 40,540,000.00 | 98.40 |
| 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | 12 | Bulan | 27,000,000.00 | 26,873,986.00 | 99.53 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 318,143,695.00 | 308,651,342.00 | 97.02 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100.00 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 87,764,695.00 | 84,225,000.00 | 95.97 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 28,360,000.00 | 28,000,000.00 | 98.73 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | 12 | Bulan | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 12 | Bulan | 10,000,000.00 | 5,100,000.00 | 51.00 |
| 7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 39,511,450.00 | 98.78 |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | Bulan | 99,019,000.00 | 98,814,892.00 | 99.79 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 24,810,000.00 | 17,980,000.00 | 72.47 |
| | Pengadaan Mebel | 12 | 12 | Bulan | 16,000,000.00 | 12,800,000.00 | 80.00 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 8,810,000.00 | 5,180,000.00 | 58.80 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 1,448,438,363.00 | 1,433,949,596.00 | 99.00 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | Bulan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 100.00 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | Bulan | 167,000,000.00 | 161,081,733.00 | 96.46 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 35,400,000.00 | 35,391,500.00 | 99.98 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 12 | Bulan | 1,221,038,363.00 | 1,212,476,363.00 | 99.30 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 | 12 | Bulan | 257,850,000.00 | 247,484,300.00 | 95.98 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | 12 | Bulan | 117,500,000.00 | 112,364,300.00 | 95.63 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 12 | Bulan | 80,350,000.00 | 76,280,000.00 | 94.93 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 30,000,000.00 | 29,000,000.00 | 96.67 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 30,000,000.00 | 29,840,000.00 | 99.47 |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | | 12 | 12 | Bulan | 7,115,680,694.00 | 5,645,406,393.00 | 79.34 |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | 50,308,503,496.00 | 42,797,034,563.00 | 85.07 |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | 12 | 12 | Bulan | 18,620,102,346.00 | 16,797,832,878 | 90.21 |
| 1 | Pengembangan Puskesmas | 12 | 12 | Bulan | 7,565,210,000.00 | 6,202,819,335.00 | 81.99 |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 5,414,186,600.00 | 5,240,975,644.00 | 96.80 |
| 3 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 32,969,562.00 | 82.42 |
| 4 | Pengadaan Obat, Vaksin | 12 | 12 | Bulan | 1,155,647,670.00 | 1,022,939,782.00 | 88.52 |
| 5 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 12 | 12 | Bulan | 4,278,152,076.00 | 4,204,012,413.00 | 98.27 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 21,142,584.00 | 52.86 |
| 7 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 126,906,000.00 | 72,973,558.00 | 57.50 |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 12 | 12 | Bulan | 31,127,335,105.00 | 25,463,373,476.00 | 81.80 |
| 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12 | 12 | Bulan | 1,377,369,100.00 | 1,101,403,960.00 | 79.96 |
| 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 12 | 12 | Bulan | 530,326,500.00 | 205,432,500.00 | 38.74 |
| 3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 12 | 12 | Bulan | 300,872,000.00 | 175,561,500.00 | 58.35 |
| 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 12 | 12 | Bulan | 631,676,200.00 | 468,282,100.00 | 74.13 |
| 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 12 | 12 | Bulan | 719,566,000.00 | 460,296,500.00 | 63.97 |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 12 | 12 | Bulan | 695,953,000.00 | 482,113,000.00 | 69.27 |
| 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 12 | 12 | Bulan | 601,925,450.00 | 509,369,115.00 | 84.62 |
| 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 12 | 12 | Bulan | 118,438,000.00 | 89,505,500.00 | 75.57 |
| 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 12 | 12 | Bulan | 74,142,000.00 | 59,236,500.00 | 79.90 |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 12 | 12 | Bulan | 91,610,050.00 | 66,440,850.00 | 72.53 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 12 | 12 | Bulan | 338,585,500.00 | 240,159,000.00 | 70.93 |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 12 | 12 | Bulan | 115,483,550.00 | 68,990,421.00 | 59.74 |
| 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 12 | 12 | Bulan | 1,623,424,450.00 | 822,373,996.00 | 50.66 |
| 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 12 | 12 | Bulan | 31,480,000.00 | 25,880,000.00 | 82.21 |
| 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 2,031,546,750.00 | 1,687,658,205.00 | 83.07 |
| 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12 | 12 | Bulan | 117,200,000.00 | 67,763,000.00 | 57.82 |
| 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 | 12 | Bulan | 734,200,000.00 | 581,742,450.00 | 79.23 |
| 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 1,091,558,000.00 | 823,536,450.00 | 75.45 |
| 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 95,431,400.00 | 72,518,000.00 | 75.99 |
| 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 891,738,300.00 | 646,535,850.00 | 72.50 |
| 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 12 | 12 | Bulan | 47,680,150.00 | 40,245,150.00 | 84.41 |
| 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 12 | 12 | Bulan | 134,265,000.00 | 89,027,500.00 | 66.31 |
| 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 12 | 12 | Bulan | 22,540,000.00 | 16,525,500.00 | 73.32 |
| 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 4,000,000.00 | 1,160,000.00 | 29.00 |
| 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 | 12 | Bulan | 3,061,982,550.00 | 2,386,177,130.00 | 77.93 |
| 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 10,148,427,480.00 | 10,015,957,104.00 | 98.69 |
| 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 12 | 12 | Bulan | 18,000,000.00 | 14,955,500.00 | 83.09 |
| 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 12 | 12 | Bulan | 42,780,000.00 | 25,075,000.00 | 58.61 |
| 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 19,907,750.00 | 99.54 |
| 30 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 | 12 | Bulan | 3,912,225,275.00 | 3,238,592,884.00 | 82.78 |
| 31 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 880,758,400.00 | 864,702,161.00 | 98.18 |
| 32 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 474,840,000.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 | 12 | Bulan | 114,480,000.00 | 69,766,000.00 | 60.94 |
| 34 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 | 12 | Bulan | 32,830,000.00 | 26,482,900.00 | 80.67 |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | 12 | 12 | Bulan | 350,383,600.00 | 345,556,139.00 | 98.62 |
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 73,461,600.00 | 73,216,824.00 | 99.67 |
| 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 64,892,000.00 | 60,856,150.00 | 93.78 |
| 3 | Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan | 12 | 12 | Bulan | 212,030,000.00 | 211,483,165.00 | 99.74 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 210,682,445.00 | 190,272,070.00 | 90.31 |
| 1 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 124,440,845.00 | 104,157,995.00 | 83.70 |
| 2 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 12 | 12 | Bulan | 86,241,600.00 | 86,114,075.00 | 99.85 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | | 1,234,940,000.00 | 1,059,691,394.00 | 85.81 |
| | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 38,597,425.00 | 96.49 |
| 1 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 19,770,000.00 | 98.85 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 18,827,425.00 | 94.14 |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 1,157,300,000.00 | 988,018,969.00 | 85.37 |
| 1 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 54,000,000.00 | 28,660,000.00 | 53.07 |
| 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 12 | 12 | Bulan | 1,073,300,000.00 | 944,289,765.00 | 87.98 |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 30,000,000.00 | 15,069,204.00 | 50.23 |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 37,640,000.00 | 33,075,000.00 | 87.87 |
| 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 37,640,000.00 | 33,075,000.00 | 87.87 |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | | 225,551,200.00 | 169,629,700.00 | 75.21 |
| | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 12 | Bulan | 38,125,200.00 | 30,069,500.00 | 78.87 |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 12 | Bulan | 22,000,000.00 | 16,954,000.00 | 77.06 |
| 2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 12 | Bulan | 16,125,200.00 | 13,115,500.00 | 81.34 |
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 60,346,000.00 | 45,934,000.00 | 76.12 |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 60,346,000.00 | 45,934,000.00 | 76.12 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 9,800,000.00 | 49.00 |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 9,800,000.00 | 49.00 |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 107,080,000.00 | 83,826,200.00 | 78.28 |
| 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 12 | 12 | Bulan | 107,080,000.00 | 83,826,200.00 | 78.28 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | 600,132,500.00 | 459,017,130.00 | 76.49 |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 274,450,000.00 | 243,338,465.00 | 88.66 |
| 1 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 274,450,000.00 | 243,338,465.00 | 88.66 |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 46,200,000.00 | 46,095,865.00 | 99.77 |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 | 12 | Bulan | 46,200,000.00 | 46,095,865.00 | 99.77 |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 279,482,500.00 | 169,582,800.00 | 60.68 |
| 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 | 12 | Bulan | 279,482,500.00 | 169,582,800.00 | 60.68 |



RENCANA KERJA 2024

| ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| No | Puskesmas | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Anduring | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.989.864,00 | 100 |
| 2 | Batu Basa | 12 | 12 | Bulan | 75.000.000,00 | 71.147.060,00 | 95 |
| 3 | Gasam Gadang | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100 |
| 4 | Ketaping | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100 |
| 5 | Kampung Dalam | 12 | 12 | Bulan | 75.000.000,00 | 72.677.004,00 | 97 |
| 6 | Kampung Guci | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.563.537,00 | 99 |
| 7 | Koto Bangko | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.900.000,00 | 100 |
| 8 | Kayu Tanam | 12 | 12 | Bulan | 85.000.000,00 | 83.334.400,00 | 98 |
| 9 | Limau Purut | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.999.900,00 | 100 |
| 10 | Lubuk Alung | 12 | 12 | Bulan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100 |
| 11 | Padang Alai | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.280.014,00 | 99 |
| 12 | Padang Sago | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 57.996.624,00 | 97 |
| 13 | Pakandangan | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.671.678,00 | 99 |
| 14 | Pasar Usang | 12 | 12 | Bulan | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 100 |
| 15 | Patamuan | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.986.623,00 | 100 |
| 16 | Sungai Geringging | 12 | 12 | Bulan | 75.000.000,00 | 74.997.996,00 | 100 |
| 17 | Sungai Limau | 12 | 12 | Bulan | 145.212.000,00 | 143.903.400,00 | 99 |
| 18 | Sungai Sarik | 12 | 12 | Bulan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 100 |
| 19 | Sicincin | 12 | 12 | Bulan | 143.000.000,00 | 142.702.750,00 | 100 |
| 20 | Sikabu | 12 | 12 | Bulan | 154.800.000,00 | 152.143.020,00 | 98 |
| 21 | Sintuk | 12 | 12 | Bulan | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 100 |
| 22 | Ulakan | 12 | 12 | Bulan | 130.212.000,00 | 130.200.000,00 | 100 |
| 23 | Pauh Kambar | 12 | 12 | Bulan | 123.408.000,00 | 123.395.000,00 | 100 |
| 24 | Ampalu | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 59.045.892,00 | 98 |
| 25 | Sikucur | 12 | 12 | Bulan | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 100 |
| 26 | IFK | 12 | 12 | Bulan | 300.000.000,00 | 289.458.473,00 | 96,4 |
| 27 | Labkesda | 12 | 12 | Bulan | 300.000.000,00 | 295.514.188,00 | 98,5 |
| Jumlah | | | | | 2.068.632.000,00 | 2.051.961.762,00 | 99 |

| BLUD PUSKESMAS | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|--------|----------------|--------------------|-------|
| No | Puskesmas | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Anduring | 12 | 12 | Bulan | 312.152.741,00 | 242.129.851,00 | 77,57 |
| 2 | Batu Basa | 12 | 12 | Bulan | 915.426.821,00 | 743.278.591,00 | 81,1 |
| 3 | Gasam Gadang | 12 | 12 | Bulan | 591.711.671,00 | 429.401.051,00 | 72,5 |
| 4 | Ketaping | 12 | 12 | Bulan | 560.323.262,00 | 324.533.325,00 | 57,9 |
| 5 | Kampung Dalam | 12 | 12 | Bulan | 670.002.722,00 | 507.507.300,00 | 75,75 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|----|-------|--------------------------|-------------------|-------|
| 6 | Kampung Guci | 12 | 12 | Bulan | 417.521.378,00 | 305.589.978,00 | 73,1 |
| 7 | Koto Bangko | 12 | 12 | Bulan | 490.000.000,00 | 315.261.550,00 | 64,34 |
| 8 | Kayu Tanam | 12 | 12 | Bulan | 755.000.000,00 | 590.281.211,00 | 78,18 |
| 9 | Limau Purut | 12 | 12 | Bulan | 394.268.407,00 | 311.635.635,00 | 79,04 |
| 10 | Lubuk Alung | 12 | 12 | Bulan | 1.214.839.819,00 | 1.022.884.629,00 | 84,2 |
| 11 | Padang Alai | 12 | 12 | Bulan | 180.000.000,00 | 151.869.300,00 | 84,37 |
| 12 | Padang Sago | 12 | 12 | Bulan | 370.205.200,00 | 301.109.384,00 | 81,34 |
| 13 | Pakandangan | 12 | 12 | Bulan | 850.000.000,00 | 680.003.975,00 | 80 |
| 14 | Pasar Usang | 12 | 12 | Bulan | 750.000.000,00 | 663.289.930,00 | 88,44 |
| 15 | Patamuan | 12 | 12 | Bulan | 799.000.000,00 | 622.249.750,00 | 77,88 |
| 16 | Sungai Geringging | 12 | 12 | Bulan | 685.000.000,00 | 568.266.450,00 | 82,96 |
| 17 | Sungai Limau | 12 | 12 | Bulan | 1.300.000.000,00 | 989.372.895,00 | 76,11 |
| 18 | Sungai Sarik | 12 | 12 | Bulan | 1.050.249.920,00 | 938.480.003,00 | 89,36 |
| 19 | Sicincin | 12 | 12 | Bulan | 654.00.000,00 | 527.084.725,00 | 80,59 |
| 20 | Sikabu | 12 | 12 | Bulan | 367.500.000,00 | 283.772.139,00 | 77,22 |
| 21 | Sintuk | 12 | 12 | Bulan | 1.156.000.000,00 | 743.488.700,00 | 64,32 |
| 22 | Ulakan | 12 | 12 | Bulan | 869.400.000,00 | 730.402.275,00 | 84,01 |
| 23 | Pauh Kamar | 12 | 12 | Bulan | 1.270.000.000,00 | 1.143.699.000,00 | 90,06 |
| 24 | Ampalu | 12 | 12 | Bulan | 561.000.000,00 | 368.737.200,00 | 65,73 |
| 25 | Sikucur | 12 | 12 | Bulan | 370.000.000,00 | 245.793.601,00 | 66,43 |
| | Jumlah | | | | 17.553.601.941,00 | 13.750.122.448,00 | 78,33 |

DAK NON FISIK BOK

| No | Puskesmas | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|-------------------|--------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|-------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Anduring | 12 | 12 | Bulan | 646.975.000,00 | 412.484.271,00 | 63.76 |
| 2 | Batu Basa | 12 | 12 | Bulan | 785.716.000,00 | 391.474.263,00 | 49.82 |
| 3 | Gasam Gadang | 12 | 12 | Bulan | 471.980.000,00 | 360.079.877,00 | 76.29 |
| 4 | Ketaping | 12 | 12 | Bulan | 549.492.000,00 | 341.805.359,00 | 62.20 |
| 5 | Kampung Dalam | 12 | 12 | Bulan | 485.068.600,00 | 363.769.907,00 | 74.99 |
| 6 | Kampung Guci | 12 | 12 | Bulan | 442.779.000,00 | 349.008.623,00 | 78.82 |
| 7 | Koto Bangko | 12 | 12 | Bulan | 476.641.000,00 | 345.342.312,00 | 72.45 |
| 8 | Kayu Tanam | 12 | 12 | Bulan | 556.944.000,00 | 298.230.215,00 | 53.55 |
| 9 | Limau Purut | 12 | 12 | Bulan | 499.592.000,00 | 319.185.521,00 | 63.89 |
| 10 | Lubuk Alung | 12 | 12 | Bulan | 1.009.860.000,00 | 798.006.093,00 | 79.02 |
| 11 | Padang Alai | 12 | 12 | Bulan | 437.697.400,00 | 339.029.720,00 | 77.46 |
| 12 | Padang Sago | 12 | 12 | Bulan | 439.892.000,00 | 289.433.869,00 | 65.80 |
| 13 | Pakandangan | 12 | 12 | Bulan | 703.536.000,00 | 494.769.406,00 | 70.33 |
| 14 | Pasar Usang | 12 | 12 | Bulan | 1.186.436.000,00 | 800.785.269,00 | 67.50 |
| 15 | Patamuan | 12 | 12 | Bulan | 607.342.000,00 | 399.227.911,00 | 65.73 |
| 16 | Sungai Geringging | 12 | 12 | Bulan | 750.042.000,00 | 557.058.564,00 | 74.27 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----|----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 17 | Sungai Limau | 12 | 12 | Bulan | 975.047.000,00 | 661.097.044,00 | 67.80 |
| 18 | Sungai Sarik | 12 | 12 | Bulan | 684.059.000,00 | 560.886.233,00 | 81.99 |
| 19 | Sicincin | 12 | 12 | Bulan | 771.314.500,00 | 586.029.111,00 | 75.98 |
| 20 | Sikabu | 12 | 12 | Bulan | 328.082.000,00 | 283.855.507,00 | 86.52 |
| 21 | Sintuk | 12 | 12 | Bulan | 709.392.000,00 | 633.039.372,00 | 89.24 |
| 22 | Ulakan | 12 | 12 | Bulan | 633.020.000,00 | 522.045.753,00 | 82.47 |
| 23 | Pauh Kamar | 12 | 12 | Bulan | 800.946.200,00 | 692.423.552,00 | 86.45 |
| 24 | Ampalu | 12 | 12 | Bulan | 514.755.000,00 | 351.917.691,00 | 68.37 |
| 25 | Sikucur | 12 | 12 | Bulan | 368.140.000,00 | 321.374.575,00 | 87.30 |
| 26 | IFK | 12 | 12 | Bulan | 126.906.000 | 72,973,558 | 57.50 |
| Jumlah | | | | | 15,961,654,700 | 11,545,333,576 | 72.33 |

3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

D. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 678.559.000,00 dengan realisasi Rp 537.674.559,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 79,24%, hanya beberapa kegiatan yang tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | Dokumen | 38.349.000,00 | 38.181.900,00 | 99,6 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | Dokumen | 106.703.040,00 | 106.325.570,00 | 99,6 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | Dokumen | 67.500.190,00 | 67.236.390,00 | 99,6 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 1 | 1 | Dokumen | 77.610.000,00 | 77.192.212,00 | 99,5 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | Dokumen | 63.500.000,00 | 63.317.803,00 | 99,8 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 | 3 | Dokumen | 80.998.170,00 | 80.466.670,00 | 99,4 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 4 | Dokumen | 52.650.000,00 | 51.652.630,00 | 98,1 |
| JUMLAH | | | | | 487.310.400,00 | 484.373.175,00 | 99,4 |



RENCANA KERJA 2024

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 38.349.000,00 dengan realisasi Rp 38.181.90000,00 atau sebesar 99,6%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Tahun 2022.

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp106.703.040,00 dengan realisasi Rp 106.325.570,00 atau sebesar 99,6%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan.

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 67.500.190,00 dengan realisasi Rp 67.236.390,00 atau sebesar 99,6%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 77.610.000,00 dengan realisasi Rp 77.192.212,00 atau sebesar 99,5%. Kegiatan ini digunakan untuk koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD.

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 63.500.000,00 dengan realisasi Rp 63.317.803,00 atau sebesar 99,8%. Kegiatan ini digunakan untuk Korodinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 80.998.170,00 dengan realisasi Rp 80.466.670,00 atau sebesar 99,4%. Kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 52.650.000,00 dengan realisasi Rp 51.652.630,00 atau sebesar 53,46%. Kegiatan ini digunakan untuk evaluasi kinerja perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 442.028.880,00 dengan realisasi Rp 420.921.397,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 99,74% dengan rincian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|---|--------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | (%) |
| 1 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 336 | 336 | Laporan | 73.021.000,00 | 72.969.000,00 | 99,9 |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 300 | 300 | Laporan | 78.311.100,00 | 77.998.780,00 | 99,6 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | Laporan | 63.458.000,00 | 63.440.800,00 | 99,9 |
| 4 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 4 | 4 | Laporan | 69.920.500,00 | 69.843.500,00 | 99,8 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 | 4 | Laporan | 70.968.160,00 | 70.787.719,00 | 99,7 |
| 6 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | 1 | Bulan | 66.350.120,00 | 65.881.598,00 | 99,2 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | JUMLAH | | | | 422.028.880,00 | 420.921.397,00 | 99,74 |
|--|---------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 73.021.000,00 dengan realisasi Rp 72.969.000,00 atau sebesar 99%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan rekon belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 78.311.100,00 dengan realisasi Rp 77.998.780,00 atau sebesar 99,6%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan belanja BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 63.458.000,00 dengan realisasi Rp 63.440.800,00 atau sebesar 99,9%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman..

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 69.920.500,00 dan realisasi Rp. 69.843.500,00 atau sebesar 99,8%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan tanggapan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 70.968.160,00 dan realisasi Rp 70.787.719,00 atau sebesar 99,75%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

6. Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp66.350.120,00 terealisasi sebesar Rp. 65.881.598,00 atau 99,29%. Kegiatan ini digunakan untuk pembuatan laporan prognosis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 116.885.000,00 dan realisasi Rp. 114.950.786,00 atau sebesar 98,35%, dengan 3 kegiatan, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran | |
|----|---|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12 | 12 | Bulan | 48.685.000,00 | 47.536.800,00 | 97,64 |
| 2 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | 12 | Bulan | 41.200.000,00 | 40.540.000,00 | 98,4 |
| 3 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | 12 | Bulan | 27.000.000,00 | 26.873.986,00 | 99,5 |
| | JUMLAH | | | | 116.885.000,00 | 114.950.786,00 | 98,35 |



RENCANA KERJA 2024

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 48.685.000,00 dan realisasi Rp 47.536.800,00 atau sebesar 97,64%. Kegiatan ini digunakan untuk Pendidikan Pelatihan Formal Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 41.200.000,00 dan realisasi Rp 40.540.000,00 atau sebesar 98,4%. Kegiatan ini digunakan untuk Sosialisasi Peraturan perundang undangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 27.000.000,- dan realisasi Rp 26.873.986,00 atau sebesar 99,5%. Kegiatan ini digunakan untuk Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan tentang Perencanaan Pembangunan Kesehatan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 318.143.695,00 dan realisasi Rp.308.651.342,00 atau sebesar 97,02%, dengan 8 kegiatan dan pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran | |
|----|--|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 |
| 2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 87.764.695,00 | 84.225.000,00 | 95,9 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 28.360.000,00 | 28.000.000,00 | 98,7 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 | 12 | Bulan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | 12 | Bulan | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 12 | Bulan | 10.000.000,00 | 5.100.000,00 | 51 |
| 7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | 12 | Bulan | 40.000.000,00 | 39.511.450,00 | 98,78 |
| 8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | 12 | Bulan | 99.019.000,00 | 98.814.892,00 | 99,79 |
| | JUMLAH | | | | 318.143.695,00 | 308.651.342,00 | 97 |

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp25.000.000,00 dengan realisasi Rp25.000.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini digunakan untuk instalasi listrik/ penenrangan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp87.764.695,00 dengan realisasi Rp84.225.000,00 atau sebesar 95,7%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 28.360.000,00 dengan realisasi Rp 28.000.000,00 atau sebesar 98,7%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp20.000.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini digunakan untuk penyediaan logistic kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 8.000.000,00 dengan realisasi Rp 8.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 10.000.000,00 dengan realisasi Rp 5.100.000,00 atau sebesar 51,00%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang undangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

7. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 40.000.000,00 dengan realisasi Rp 39.511.450,00 atau sebesar 98,70%. Kegiatan ini digunakan untuk makanan dan minuman Tamu dan rapat rapat kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 99.019.000,00 dengan realisasi Rp 98.814.892,00 atau sebesar 99,79%. Kegiatan ini digunakan untuk Bimtek, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp24.810.000,00 dan realisasi Rp17.980.000,00 atau sebesar 72,47%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|--|--------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pengadaan Mebel | 12 | 12 | Bulan | 16,000,000.00 | 12,800,000.00 | 80,0 |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 8,810,000.00 | 5,180,000.00 | 58,8 |
| | JUMLAH | | | | 24,810,000.00 | 17,980,000.00 | 72,47 |



RENCANA KERJA 2024

1. Pengadaan Mebel

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp16.000.000,00 dan realisasi Rp12.800.000,00 atau sebesar 80,00%. Pada Pembangunan Fasilitas Kesehatan lain ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 berupa belanja daerah yaitu belanja Modal peralatan mesin, seperti belanja modal alat kantor, belanja modal penyimpanan perlengkapan kantor, belanja modal kursi meja pejabat, belanja modal kursi tamu dan belanja modal lemari arsip

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp8.810.000,00 dengan realisasi Rp5.180.000,00 atau sebesar 58,80%. Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 berupa belanja daerah yaitu belanja barang pakai habis, belanja pemeliharaan peralatan mesin, belanja modal alat kantor dan rumah tangga lainnya.

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp1.448.438.363,00 dan realisasi Rp 1.334.249.596,00 atau sebesar 92,12%, dengan 4 kegiatan dan pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | Bulan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | Bulan | 167.000.000,00 | 161.081.733,00 | 96,4 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 | 12 | Bulan | 35.400.000,00 | 35.391.500,00 | 99,9 |
| 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | 12 | Bulan | 1.221.038.363,00 | 1.112.776.363,00 | 91,1 |
| JUMLAH | | | | | 1.448.438.363,00 | 1.334.249.596,00 | 92,12 |

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 25.000.000,00 dan realisasi Rp 25.000.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini digunakan untuk pengarsipan surat menyurat Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 167.000.000,00 dengan realisasi Rp 161.081.733,00 atau sebesar 96,4%. Kegiatan ini digunakan untuk tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dDinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 35.400.000,00 dengan realisasi Rp 35.391.500,00 atau sebesar 99,98%,. Kegiatan ini digunakan untuk jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 1.221.038.363,00 dengan realisasi Rp 1.112.776.363,00 atau sebesar 91,1%. Kegiatan ini digunakan untuk Jasa tenaga swakelola, Tenaga IT, Sopir dan Kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.



RENCANA KERJA 2024

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 257.850.000,00 dan realisasi Rp 247.484.300,00 atau sebesar 95,98%, dengan 4 kegiatan dan pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran | |
|---------------|--|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | 12 | Bulan | 117.500.000,00 | 112.364.300,00 | 95,63 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 12 | Bulan | 80.350.000,00 | 76.280.000,00 | 94,93 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 30.000.000,00 | 29.000.000,00 | 96,67 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 30.000.000,00 | 29.840.000,00 | 99,47 |
| JUMLAH | | | | | 257.850.000,00 | 247.484.300,00 | 95,98 |

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 117.500.000,00 dan realisasi Rp 112.364.300,00 atau sebesar 95,63%. Kegiatan ini digunakan untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 80.350.000,00 dan realisasi Rp 76.280.000,00 atau sebesar 94,93%. Kegiatan ini digunakan untuk Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 30.000.000,00 dengan realisasi Rp 29.000.000,00 atau sebesar 96,67%. Kegiatan ini digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 30.000.000,00 dan realisasi Rp 29.840.000,00 atau sebesar 99,47%. Kegiatan ini digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



RENCANA KERJA 2024

G. Peningkatan Pelayanan BLUD

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp7.115.680.694,00 dan realisasi Rp5.645.406.393,00 atau sebesar 79,34% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 12 | 12 | Bulan | 7,115,680,694.00 | 5,645,406,393.00 | 79,34 |
| JUMLAH | | | | | 7,115,680,694.00 | 5,645,406,393.00 | 79,34 |

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 7.115.680.694,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.645.406.393,00 atau sebesar 79,34%. Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dilaksanakan oleh Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman. Yang terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

H. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 18 ,00 dan realisasi Rp 14.517.992.527,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 81,50% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pengembangan Puskesmas | 12 | 12 | Bulan | 7.565.210.000.00 | 6.202.819.335.00 | 81,99 |
| 2 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 5,414,186,600.00 | 5.240.975.644,00 | 96,80 |
| 3 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 32.969.562,00 | 82,42 |
| 4 | Pengadaan Obat, Vaksin | 12 | 12 | Bulan | 1.155.647.670.00 | 1.022.939.782,00 | 88,52 |
| 5 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | 12 | 12 | Bulan | 4,278,152,076.00 | 4.204.012.413,00 | 98,27 |
| 6 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 40,000,000.00 | 21.142.584,00 | 52,86 |
| 7 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 126,906,000.00 | 72.973.558,00 | 57,50 |
| JUMLAH | | | | | 18.620.102.346,00 | 10.651.162.858,00 | 57,20 |

1. Pengembangan Puskesmas

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 7.565.210.000,00 dan realisasi Rp 6.202.819.335,00 atau sebesar 81,99% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas. Kegiatan ini digunakan untuk Pengembangan Puskesmas



RENCANA KERJA 2024

2. **Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp5.414.186.600,00 dan realisasi Rp5.240.975.644,00 atau sebesar 96,8%. Kegiatan ini digunakan untuk Pengadaan Alat Kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas.

3. **Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 dan realisasi Rp 32.969.562,00 atau sebesar 82,4%. Kegiatan ini digunakan untuk Pengadaan Alat Kesehatan yang sesuai standar di Puskesmas

4. **Pengadaan Obat, Vaksin**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 1.155.647.670,00 dan realisasi Rp 1.022.939.782,00 atau sebesar 88,52%. Kegiatan ini digunakan untuk penghapusan obat dan perbekalan Kesehatan, Puskesmas yang mendapatkan supervise dan pengawasan pelayanan kefarmasian sesuai standar, pengadaan bahan medis habis Pakai, ketersediaan Vaksin IDR di Puskesmas, dan puskesmas ketersediaan obat esensial

5. **Pengadaan Bahan Habis Pakai**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 4.278.152.076,00 dan realisasi Rp 4.204.012.413,00 atau sebesar 98,27%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan bahan medis habis Pakai

6. **Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 dan realisasi Rp 21.142.584,00 atau sebesar 52,86%. Kegiatan ini digunakan untuk pengawasan alat Kesehatan di puskesmas

7. **Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 126.906.000,00 dan realisasi Rp 72.973.558,00 atau sebesar 57,50%. Kegiatan ini digunakan untuk Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

I. **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota**

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 13.900.901.130,00 dan realisasi Rp 7.829.773.635,00 atau sebesar 56,33%. Pelaksanaan kegiatan pada program ini belum sepenuhnya memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,37% dan pada umumnya target kinerja belum tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

| N O | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | |
|-----|---|--------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 12 | 12 | Bulan | 1,377,369,100.00 | 1,101,403,960.00 | 79.96 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|----|---|----|----|-------|------------------|------------------|-------|
| 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 12 | 12 | Bulan | 530,326,500.00 | 205,432,500.00 | 38.74 |
| 3 | Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 12 | 12 | Bulan | 300,872,000.00 | 175,561,500.00 | 58.35 |
| 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 12 | 12 | Bulan | 631,676,200.00 | 468,282,100.00 | 74.13 |
| 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 12 | 12 | Bulan | 719,566,000.00 | 460,296,500.00 | 63.97 |
| 6 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 12 | 12 | Bulan | 695,953,000.00 | 482,113,000.00 | 69.27 |
| 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 12 | 12 | Bulan | 601,925,450.00 | 509,369,115.00 | 84.62 |
| 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 12 | 12 | Bulan | 118,438,000.00 | 89,505,500.00 | 75.57 |
| 9 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 12 | 12 | Bulan | 74,142,000.00 | 59,236,500.00 | 79.90 |
| 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 12 | 12 | Bulan | 91,610,050.00 | 66,440,850.00 | 72.53 |
| 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 12 | 12 | Bulan | 338,585,500.00 | 240,159,000.00 | 70.93 |
| 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 12 | 12 | Bulan | 115,483,550.00 | 68,990,421.00 | 59.74 |
| 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 12 | 12 | Bulan | 1,623,424,450.00 | 822,373,996.00 | 50.66 |
| 14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 12 | 12 | Bulan | 31,480,000.00 | 25,880,000.00 | 82.21 |
| 15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 2,031,546,750.00 | 1,687,658,205.00 | 83.07 |
| 16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 12 | 12 | Bulan | 117,200,000.00 | 67,763,000.00 | 57.82 |
| 17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 12 | 12 | Bulan | 734,200,000.00 | 581,742,450.00 | 79.23 |
| 18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 1,091,558,000.00 | 823,536,450.00 | 75.45 |
| 19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 95,431,400.00 | 72,518,000.00 | 75.99 |
| 20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 891,738,300.00 | 646,535,850.00 | 72.50 |
| 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 12 | 12 | Bulan | 47,680,150.00 | 40,245,150.00 | 84.41 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---------------|--|----|----|-------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 12 | 12 | Bulan | 134,265,000.00 | 89,027,500.00 | 66.31 |
| 23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | 12 | 12 | Bulan | 22,540,000.00 | 16,525,500.00 | 73.32 |
| 24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatandan Pasca Krisis Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 4,000,000.00 | 1,160,000.00 | 29.00 |
| 25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 12 | 12 | Bulan | 3,061,982,550.00 | 2,386,177,130.00 | 77.93 |
| 26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 10,148,427,480.00 | 10,015,957,104.00 | 98.69 |
| 27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 12 | 12 | Bulan | 18,000,000.00 | 14,955,500.00 | 83.09 |
| 28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 12 | 12 | Bulan | 42,780,000.00 | 25,075,000.00 | 58.61 |
| 29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 12 | 12 | Bulan | 20,000,000.00 | 19,907,750.00 | 99.54 |
| 30 | Operasional Pelayanan Puskesmas | 12 | 12 | Bulan | 3,912,225,275.00 | 3,238,592,884.00 | 82.78 |
| 31 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 12 | 12 | Bulan | 880,758,400.00 | 864,702,161.00 | 98.18 |
| 32 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 474,840,000.00 | 0 | 0.00 |
| 33 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 | 12 | Bulan | 114,480,000.00 | 69,766,000.00 | 60.94 |
| 34 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 12 | 12 | Bulan | 32,830,000.00 | 26,482,900.00 | 80.67 |
| JUMLAH | | | | | 13.900.901.130,00 | 7.829.773.635,00 | 56,33 |

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 1.377.369.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.101.403.960,00 atau sebesar 79,96%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk Penurunan AKI, pelayanan ibu hamil sesuai standar, Puskesmas melakukan orientasi P4K, Puskesmas yang melaporkan dan melaksanakan AMP kejadian kematian dan Puskesmas yang menyelenggarakan kelas Ibu Hamil

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 530.326.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 205.432.500,00 atau sebesar 38,74%. Kegiatan ini digunakan kegiatan Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun, Bumil Bulin Bufer dapat penanganan komplikasi, Faskes yang memberikan pelayanan KB sesuai standar, bulin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persalinan di fasyankes, Puskesmas memberikan pelayanan KB Pasca salin, PUS yang menjadi peserta KB Aktif dan Total Fertility Rate.



RENCANA KERJA 2024

- 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 300.872.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 175.561.500,00 atau sebesar 58,35%. Kegiatan ini digunakan untuk penurunan angka kematian bayi, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, kunjungan neonatal lengkap, neonatal komplikasi yang ditangani.
- 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 631.676.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 468.282.100,00 atau sebesar 74,13%. Kegiatan ini digunakan untuk angka kematian balita, pelayanan balita sesuai standar, Puskesmas melaksanakan intervensi pada balita gangguan perkembangan, Puskesmas melakukan MTBS dan Puskesmas melakukan kelas Ibu Balita.
- 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 719.566.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 460.296.500,00 atau sebesar 63,97%. Kegiatan ini digunakan untuk Pelayanan Kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar, Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Puskesmas membina sekolah madrasah, dan Puskesmas yang menyelenggarakan penjangkaran anak usia Pendidikan dasar
- 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 695.953.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 482.113.000 atau sebesar 69,270%. Kegiatan ini digunakan untuk Gangguan Indera Fungsional, Korong Posbindu PTM, Merokok usia 10-18 tahun, Merokok Usia > 18 th, Obesitas > 18 thn, pelayanan Kesehatan usia 15-59 tahun sesuai standar, Deteksi dini kanker servik, Puskesmas melaksanakan PANDU PTM, Puskesmas melaksanakan UBM, Sekolah melaksanakan kebijakan KTR
- 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 601.925.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 509.369.115 atau sebesar 84,62%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas menyelenggarakan Posyandu Lansia, Puskesmas menyelenggarakan Santun Lansia, usia 60 tahun keatas skrining sesuai standar
- 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 118.438.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.505.500,00 atau sebesar 75,57%. Kegiatan ini digunakan untuk penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar
- 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 74.142.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 59.236.500,00 atau sebesar 79,90%. Kegiatan ini digunakan untuk penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar
- 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 91.610.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 66.440.850,00 atau sebesar 72,53%. Kegiatan ini digunakan untuk penderita ODGJ mendapatkan pelayanan sesuai standar, penderita GME penduduk > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan.

11. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 338.585.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 240.159.000 atau sebesar 70,93%. Kegiatan ini digunakan untuk Keberhasilan pengobatan kasus TB resistan obat, penemuan dan pengobatan TB, penemuan TB Anak, pengobatan TB RO, CNR TB, keberhasilan pengobatan TB, TB dengan status HIV, orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan penemuan TB resisten obat

12. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 115.483.550,00 dengan realisasi sebesar Rp 68.990.421,00 atau sebesar 59,74%. Kegiatan ini digunakan untuk Insident HIV, Deteksi dini hepatitis B dan C, deteksi dini pemeriksaan HIV sifilis hepatitis B pada bumil, ODHA dengan pengobatan ARV, orang resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar

13. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 1.623.424.450,00 dengan realisasi sebesar Rp 822.373.996,00 atau sebesar 50,66%. Kegiatan ini digunakan untuk penduduk dengan KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

14. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Berpotensi Bencana**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 31.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.880.000,00 atau sebesar 82,21%. Kegiatan ini digunakan untuk pembentukan TIM dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan terdampak bencana dan penduduk terdampak krisis bencana dan potensi bencana mendapatkan pelayanan sesuai standar

15. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 2.031.546.750,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.687.658.205,00 atau sebesar 83,07%. Kegiatan ini digunakan untuk 23 kegiatan diantaranya Balita mendapatkan vitamin A, balita wasting, balita yang ditimbang, BBLR, ASI Eksklusif 6 bulan, ASI Eksklusif kurang 6 bulan, bayi IMD, balita yang Naik berat badannya, balita gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan, balita yang mempunyai buku KIA, Bumil KEK yang mendapatkan makanan tambahan, bumil mendapatkan TTD, Bufas mendapatkan vitamin A, Bumil Anemia, Bumil KEK, Balita gizi buruk mendapatkan perawatan, Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan, balita stunting, Balita Underweigh, Puskesmas tata laksana Gizi Buruk, Surveillance Gizi, Remaja Putri yang mendapatkan TTD.

16. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga**



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 117.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 67.763.000,00 atau sebesar 57,82%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga

17. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 734.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 581.742.450,00 atau sebesar 79,23%. Kegiatan ini digunakan untuk Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar, Kecamatan Sehat, sarana air minum yang yang diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar, Korong Stop BABS, pengawasan TFU sesuai standar, pengawasan TPP sesuai standar

18. **Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 1.091.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 823.536.450,00 atau sebesar 75,45%. Kegiatan ini digunakan untuk Desa Siaga Aktif, Pembinaan Posyandu Aktif, puskesmas menerapkan kebijakan GERMAS dan RT PHBS

19. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 95.431.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 72.518.000,00 atau sebesar 75,99%. Kegiatan ini digunakan untuk Penyelenggarakan kegiatan Yankestrad di Puskesmas.

20. **Pengelolaan Surveilans Kesehatan**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 891.738.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 646.535.850,00 atau sebesar 72,50%. Kegiatan ini digunakan untuk AFP, Desa UCI, Desa KLB, Pencegahan dan pengendalian KKM, anak usia 18-24 bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan, 0-11 bulan IDL, kelengkapan laporan SKDR, ketepatan laporan SKDR, respon peringatan dini KLB, Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB

21. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 47.680.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.245.150,00 atau sebesar 84,41%. Kegiatan ini digunakan untuk penduduk penderita depresi lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan Kesehatan

22. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 134.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.027.500,00 atau sebesar 66,31%. Kegiatan ini digunakan untuk pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

23. **Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus**

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 22.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.525.500,00 atau sebesar 73,32%. Kegiatan ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan upaya Kesehatan lainnya.

24. **Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan**



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.160.000,00 atau sebesar 29,00%. Pada Pembangunan Fasilitas Kesehatan lain ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 berupa belanja daerah yaitu belanja ATK dan belanja perjalanan dinas

25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 3,061,982,550,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.386.177.130,00 atau sebesar 77,93%. Kegiatan ini digunakan untuk Cacat tingkat 2, penemuan penderita Kusta B, angka usia harapan hidup, penemu kasus diare pada balita, penemu kasus diare semua umur, penemu balita pneumoni balita, rabies, kabupaten/kota dengan elim filariasis, kecamatan dengan elim filariasis, kecamatan yang mencapai elim malaria, orang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan, kecacangan, kasus DBD, kasus malaria, penatalaksanaan kasus pneumoni, mikrofilaria rate, tatalaksana diare sesuai standar, pneumonia sesuai standar, kusta, kusta anak, kematian akibat keracunan, dan Puskresmas yang melaksanakan LROA.

26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 10.148.427.480,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.015.957.104,00 atau sebesar 98,69%. Kegiatan ini digunakan untuk masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan nasional

27. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.955.500,00 atau sebesar 83,09%. Kegiatan ini digunakan untuk layanan deteksi dini dan penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan sekolah

28. Pengambilan dan Pengeriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 42.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.075.000,00 atau sebesar 58,61%. Kegiatan ini digunakan untuk menjemput dan mengantar spesimen ke Laboratorium rujukan

29. Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.907.750,00 atau sebesar 99,54%. Kegiatan ini digunakan untuk penilaian Kabupaten kota sehat

30. Operasional Pelayanan Puskesmas

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 3.912.225.275,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.238.592.884,00 atau sebesar 82,78%. Pada Pembangunan Fasilitas Kesehatan lain ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 berupa belanja daerah yaitu belanja makanan dan minuman rapat, honorarium tim pelaksana, belanja jasa tenaga kesehatan, belanja perjalanan dinas dalam kota

31. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 880.758.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 864.702.161,00 atau sebesar 98,18%. Kegiatan ini digunakan untuk Operasional PSC 119, Labkesda, dan IFK Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

32. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten kota

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 474.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp00 atau sebesar 0,00%.

33. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 114.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 69.766.000,00 atau sebesar 60,94%. Kegiatan ini digunakan untuk Investigasi jika ada kejadian Pasca Imunisasi dan POM

34. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp 32.830.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.482.900,00 atau sebesar 80,67%. Kegiatan ini digunakan untuk Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah .

J. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 214.999.000,00 dan realisasi Rp 191.706.915,00 Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 89,17%, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 73,461,600.00 | 73.216.824,00 | 99,67 |
| 2 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 64,892,000.00 | 60.856.150,00 | 93,78 |
| 3 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | 12 | 12 | Bulan | 212,030,000.00 | 211.483.165,00 | 99,74 |
| JUMLAH | | | | | 350.383.600,00 | 345.556.139,00 | 98,62 |

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 73.461.600,00 dan realisasi sebesar Rp 73.216.824,00 atau sebesar 98,62%. Kegiatan ini digunakan untuk Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 64.892.000,00 dan realisasi sebesar Rp 60.856.150,00 atau sebesar 93,78%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas yang menggunakan SIKDA Generik

3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 212.030.000,00 dan realisasi sebesar Rp 211.483.165,00 atau sebesar 99,74%. Kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat/perangkat sistim informasi kesehatan

K. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 210.682.445,00 dan realisasi Rp 190.272.070,00. Kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 90,31%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 124.440.845,00 | 104.157.995,00 | 83,70 |
| 2 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | 12 | 12 | Bulan | 86.241.600,00 | 86.114.075,00 | 99,85 |
| JUMLAH | | | | | 210.682.445,00 | 190.272.070,00 | 90,31 |

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 124.440.845,00 dan realisasi sebesar Rp 104.157.995,00 atau sebesar 83,7%. Kegiatan ini digunakan untuk IKS, Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar, Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat, Puskesmas yang melaksanakan PIS PK dengan intervensi 100%, Pembinaan Praktek Mandiri dokter dan dokter gigi sesuai standar, puskesmas pelayanan Kesehatan gigi dan mulut dan unmeet need yankes

2. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 86.241.600,00 dan realisasi sebesar Rp 86.114.075,00 atau sebesar 99,85%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119, integrasi SISRUTE RS dan Puskesmas, Akses kualitas pelayanan Kesehatan rujukan, FKTP dengan Rasio Rujukan Non spesialis $\leq 2\%$, RS Rujukan dan RS dengan pelayanan sesuai standar, RS terintegrasi pelayanan kegawat darurat dengan PSC 119, Rumah Sakit dan faskes sesuai standar

L. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 dan realisasi Rp 38.597.425,00 atau sebesar 96,49%. Kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 96,49%, Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | |
|----|---|--------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | | (Rp) | Target |
| 1 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 20.000.000,00 | 19.770.000,00 | 98,85 |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta | 12 | 12 | Bulan | 20.000.000,00 | 18.827.425,00 | 94,14 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | 40.000.000,00 | 38.597.425,00 | 96,49 |

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 20.000.000,00 dan realisasi Rp 19.770.000,00, atau sebesar 98,85%. Kegiatan ini digunakan untuk Nakes Fasyankes yang mempunyai SIP.

2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 20.000.000,00 dan realisasi Rp 18.827.425,00 atau sebesar 94,14%. Kegiatan ini digunakan untuk pengawasan RS dan klinik swasta, pengawasan nakes dan sarana Kesehatan, sarana Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi dan pengawasan praktek mandiri dan swasta

M. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 155.000.000,00 dan realisasi Rp 98.504.765,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 63,55%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|---|--------------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 54.000.000,00 | 28.660.000,00 | 53,07 |
| 2 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | 12 | 12 | Bulan | 1.073.300.000 | 944.289.765,00 | 87,98 |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 12 | 12 | Bulan | 30.000.000,00 | 15.069.204,00 | 50,23 |
| | JUMLAH | | | | 1.157.300.000,00 | 988.069.204,00 | 85,37 |

1. Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 54.000.000,00 dan realisasi Rp 28.660.000,00 atau sebesar 53,07%. Kegiatan ini digunakan untuk Dokumen Perencanaan SDMK, tenaga Kesehatan secara teknis dan puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar

2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 1.073.300.000,00 dan realisasi Rp 944.289.765,00 atau sebesar 87,98%. Kegiatan ini digunakan untuk Intership Dokter, penempatan baru dan pemulangan nakes pada penugasan khusus, puskesmas tanpa dokter

3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 30.000.000,00 dan realisasi Rp 15.069.204,00 atau sebesar 50,23%. Kegiatan ini digunakan untuk pembinaan dan pengawasan SDMK Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman



RENCANA KERJA 2024

N. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 37.640.000,00 dan realisasi Rp 33.075.000,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 87,87%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|---|--------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 12 | 12 | Bulan | 37.640.000,00 | 33.075.000,00 | 87,87 |
| | JUMLAH | | | | 37.640.000,00 | 33.075.000,00 | 87,87 |

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 37.640.000,00 dan realisasi Rp 33.075.000,00 atau sebesar 87,87%. Kegiatan ini digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, bidang Kesehatan masyarakat, NSPK terkait pelatihan bidang Kesehatan yang telah disusun, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang pelayanan Kesehatan dan Kesehatan masyarakat, Peningkatan kualifikasi melalui program izin belajar dan tugas belajar SDM Kesehatan.

O. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 38.125.200,00 dan realisasi Rp 30.069.500,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 78,87%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|--|--------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 12 | Bulan | 22.000.000,00 | 16.954.000,00 | 77,06 |
| 2 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 12 | 12 | Bulan | 16.125.200,00 | 13.115.500,00 | 81,34 |
| | JUMLAH | | | | 38.125.200,00 | 30.069.500,00 | 78,87 |

1. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tidak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)



RENCANA KERJA 2024

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 22.000.000,00 dan realisasi Rp 16.954.000,00. atau sebesar 77,06%. Kegiatan ini digunakan untuk sertifikat penyuluhan IRTP, IRTP yang diawasi, PKRT yang diawasi, sarana kefarmasian yang diawasi, tool alat Kesehatan yang diawasi, PIRT yang menerapkan CPPB, PKRT yang memenuhi standar.

2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 16.125.200,00 dan realisasi Rp 13.115.500,00 atau sebesar 81,34%. Kegiatan ini digunakan untuk Data perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan

P. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Program ini terlaksana di kegiatan operasional 25 puskesmas, 1 instansi farmasi kabupaten dan 1 laboratorium kesehatan daerah se-kabupaten padang pariaman tahun anggaran 2022 untuk menunjang kinerja UPTD tersebut. Dari anggaran 60.346.000,00 terealisasi Rp 45.934.000,00 atau sebesar 76,12%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| No | Puskesmas | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|---------------|--------------------|-------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga | 12 | 12 | Bulan | 60.346.000,00 | 45.934.000,00 | 76,12 |
| JUMLAH | | | | | 60.346.000,00 | 45.934.000,00 | 76,12 |

1. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 60.346.000,00 dan realisasi Rp 45.934.000,00. atau sebesar 76,12%. Kegiatan ini digunakan untuk pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan.

Q. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dan realisasi Rp 9.800.000,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 49,0%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :



RENCANA KERJA 2024

| No | Puskesmas | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|---|--------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 12 | 12 | Bulan | 20.000.000,00 | 9.800.000,00 | 49,0 |
| JUMLAH | | | | | 20.000.000,00 | 9.800.000,00 | 49,0 |

R. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 20.000.000,00 dan realisasi Rp 9.800.000,00. atau sebesar 49,0%. Kegiatan ini digunakan untuk pengawasan kantin sekolah, pengawasan pasar pabukooan dan sarana distribusi pangan, inspeksi kesling TPM yang bersertifikat.

S. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 107.080.000,00 dan realisasi Rp 83.826.200,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 78,28%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|--|--------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | 12 | 12 | Bulan | 107.080.000,00 | 83.826.200,00 | 78,28 |
| JUMLAH | | | | | 107.080.000,00 | 83.826.200,00 | 78,28 |

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 107.080.000,00 dan realisasi Rp 83.826.200,00 atau sebesar 78,28%. Kegiatan ini digunakan untuk pemeriksaan post market produk makanan industry RT.



RENCANA KERJA 2024

T. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 274.450.000,00 dan realisasi Rp 242.298.465,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 88,29%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|--|--------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | 12 | 12 | Bulan | 274.450.000,00 | 243.338.465,00 | 86,66 |
| JUMLAH | | | | | 274.450.000,00 | 243.338.465,00 | 86,66 |

1. Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 274.450.000,00 dan realisasi Rp 243.338.465,00 atau sebesar 88,29%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas yang melaksanakan Posyandu Aktif.

U. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 46.200.000,00 dan realisasi Rp 46.095.865,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,77%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|---------------|--|--------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | 12 | 12 | Bulan | 46.200.000,00 | 46.095.865,00 | 99,77 |
| JUMLAH | | | | | 46.200.000,00 | 46.095.865,00 | 99,77 |

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 46.200.000,00 dan realisasi Rp 46.095.865,00 atau sebesar 99,77%. Kegiatan ini digunakan untuk RT PHBS

V. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai anggaran sebesar Rp 279.482.500,00 dan realisasi Rp 169.582.800,00. Atau sebesar 60,68%, Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

| NO | Kegiatan | Pencapaian Kinerja | | | Anggaran | Realisasi Anggaran | |
|----|----------|--------------------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| | | Target | Realisasi | Satuan | (Rp) | (Rp) | Target |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | |
|---------------|--|----|----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12 | 12 | Bulan | 279,482,500,00 | 169,582,800,00 | 60,68 |
| JUMLAH | | | | | 279,482,500,00 | 169,582,800,00 | 60,68 |

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Kegiatan ini mempunyai anggaran Rp 279.482.500,00 dan realisasi Rp 169,582,800,00 atau sebesar 60,68%. Kegiatan ini digunakan untuk Puskesmas yang melakukan upaya Kesehatan bersumber masyarakat



RENCANA KERJA 2024

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

| Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Kinerja | | Satuan | Pencapaian Target Triwulan | | | | Pagu Anggaran | | % | |
|---|--|---|---|--|-----------|---------|----------------------------|----|-----|----|----------------|----------------|---------------|------|
| | | | | Target | Realisasi | | I | II | III | IV | Rencana | Realisasi | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di susun | 2 | 2 | Dokumen | V | V | V | V | 38.349.000,00 | 38.181.900,00 | 99,6 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun | 1 | 1 | Dokumen | V | V | V | V | 106.703.040,00 | 106.325.570,00 | 99,6 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Disusun | 1 | 1 | Dokumen | V | V | V | V | 67.500.190,00 | 67.236.390,00 | 99,6 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA SKPD yang Disusun | 1 | 1 | Dokumen | V | V | V | V | 77.610.000,00 | 77.192.212,00 | 99,5 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah DPA Perubahan SKPD yang Disusun | 1 | 1 | Dokumen | V | V | V | V | 63.500.000,00 | 63.317.803,00 | 99,8 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin | 3 | 3 | Dokumen | V | V | V | V | 80.998.170,00 | 80.466.670,00 | 99,4 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD, (Lakip, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun | 4 | 4 | Dokumen | V | V | V | V | 52.650.000,00 | 51.652.630,00 | 98,1 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Kesehatan | 350 | 350 | Laporan | V | V | V | V | 73.021.000,00 | 72.969.000,00 | 99,9 | |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan Belanja BLUD Puskesmas | 325 | 325 | Laporan | V | V | V | V | 78.311.100,00 | 77.998.780,00 | 99,6 |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan | 1 | 1 | Laporan | V | V | V | V | 63.458.000,00 | 63.440.800,00 | 99,9 |
| | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah jenis laporan tanggapan pemeriksaan Dinas Kesehatan | 4 | 4 | Laporan | V | V | V | V | 69.920.500,00 | 69.843.500,00 | 99,8 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|------|----------|---|---|---|---|---------------|---------------|-------|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD | "Jumlah laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan " | 4 | 4 | Laporan | V | V | V | V | 70.968.160,00 | 70.787.719,00 | 99,7 |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | "Jumlah laporan prognosis Dinas Kesehatan " | 1 | 1 | Bulan | V | V | V | V | 66.350.120,00 | 65.881.598,00 | 99,2 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN Dinas Kesehatan yang mengikuti Diklat Formal atau Teknis | 30 | 30 | Orang | V | V | V | V | 48.685.000,00 | 47.536.800,00 | 97,64 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN (Perencana) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan | 60 | 60 | Orang | V | V | V | V | 41.200.000,00 | 40.540.000,00 | 98,4 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- undangan Tentang perencanaan pembangunan Kesehatan | 60 | 60 | Orang | V | V | V | V | 27.000.000,00 | 26.873.986,00 | 99,5 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 200 | 50 | Buah | V | V | V | V | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai anggaran | 25 | 25 | Unit | V | V | V | V | 87.764.695,00 | 84.225.000,00 | 95,9 |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Peralatan rumah tangga yang tersedia | 20 | 10 | Buah | V | V | V | V | 28.360.000,00 | 28.000.000,00 | 98,7 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan logistik kantor | 150 | 150 | Logistik | V | V | V | V | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 20 | 90 | Barang | V | V | V | V | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang- undangan yang disediakan bahan bacaan | 5 | 12 | Buah | V | V | V | V | 10.000.000,00 | 5.100.000,00 | 51 |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan | 2500 | 1832 | Kotak | V | V | V | V | 40.000.000,00 | 39.511.450,00 | 98,78 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bimtek, Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan (per hari) | 200 | 50 | Orang | V | V | V | V | 99.019.000,00 | 98.814.892,00 | 99,79 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------|--------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Tersedianya meubelair gadung kantor | 12 | 0 | Bulan | V | V | V | V | 16,000,000,00 | 12,800,000,00 | 80,0 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya peralatan gedung kantor | 12 | 0 | Bulan | V | V | V | V | 8,810,000,00 | 5,180,000,00 | 58,8 |
| | | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 12 | 6 | Bulan | V | V | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat menyurat yang diarsipkan | 2000 surat | 2000 | Surat | V | V | V | V | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 bulan | 12 | Bulan | V | V | V | V | 167.000.000,00 | 161.081.733,00 | 96,4 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun | 12 bulan | 12 | Bulan | V | V | V | V | 35.400.000,00 | 35.391.500,00 | 99,9 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran | 55 orang | 55 | Orang | V | V | V | V | 1.221.038.363,00 | 1.112.776.363,00 | 91,1 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | 12 | Bulan | V | V | V | V | 117.500.000,00 | 112.364.300,00 | 95,63 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 12 | Bulan | V | V | V | V | 80.350.000,00 | 76.280.000,00 | 94,93 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Reh Sarana dan Prasar Gedung Kantor at Bangunan Lainnya | 1 | 1 | Gedung | V | V | V | V | 30.000.000,00 | 29.000.000,00 | 96,67 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Reh Sarana dan Prasar Pendukung Gedu Kantor atau Bang Lainnya selama 1 | 1 | 1 | Gedung | V | V | V | V | 30.000.000,00 | 29.840.000,00 | 99,47 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|-------|-----------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Pengembangan Puskesmas | 3 | 3 | Puskesmas | V | V | V | V | 7.565.210.000,00 | 6.202.819.335,00 | 81,99 |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar | 65 | 64,57 | % | V | V | V | V | 5.414.186.600,00 | 5.240.975.644,00 | 96,80 |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Persentase alat kesehatan yang dikalibrasi | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 40.000.000,00 | 32.969.562,00 | 82,42 |
| | | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah Penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan | 0 persen | 100 | % | V | V | V | V | 1.155.647.670,00 | 1.022.939.782,00 | 88,52 |
| | | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan | 25 Puskesmas | 25 | Puskesmas | | | | | | | |
| | | | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pelayanan kefarmasian | 25 Puskesmas | 25 | Puskesmas | | | | | | | |
| | | | Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | 25 Puskesmas | 25 | % | | | | | | | |
| | | | Persentase puskesmas ketersediaan vaksin IDR | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | | Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah bahan habis pakai yang tersedia | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 4.278.152.076,00 | 4.204.012.413,00 | 98,27 |
| | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas | Jumlah pengawasan alat kesehatan di puskesmas | 25 | 25 | Puskesmas | V | V | V | V | 40.000.000,00 | 21.142.584,00 | 52,86 |



RENCANA KERJA 2024

| | | Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|-------|-----------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 25 | 25 | Puskesmas | | | | | 126,906,000.00 | 72.973.558,00 | 57,50 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Penurunan angka kematian ibu | 7 | 3 | Orang | V | V | V | V | 1,377,369,100.00 | 1,101,403,960.00 | 79,96 |
| | | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | 100 | 80,5 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi P4K | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melaksanakan AMP Kejadian Kematian | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility rate / ASFR) | 53 | 48 | % | V | V | V | V | 530,326,500.00 | 205,432,500.00 | 38,74 |
| | | Persentase Bumil, Bulin, Bufas yang mendapat penanganan komplikasi | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Faskes yang memberikan pelayanan KB sesuai standar | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 80,3 | % | | | | | | | |
| | | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | 100 | 80,27 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas memberikan pelayanan KB Pasca Salin | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif (CPR) | 64,3 | 69,67 | % | | | | | | | |
| | | Total Fertility Rate (TFR) | 2,35 | 8,45 | % | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------|-------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Penurunan angka kematian bayi | 47 | 43 | Orang | V | V | V | V | 300,872,000.00 | 175,561,500.00 | 58,35 |
| | | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 100 | 87,3 | % | | | | | | | |
| | | Persentase kunjungan neonatal lengkap | 100 | 82,87 | % | | | | | | | |
| | | Persentase neonatal komplikasi yang ditangani | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Penurunan angka kematian balita | 4 | 9 | Orang | V | V | V | V | 631,676,200.00 | 468,282,100.00 | 74,13 |
| | | Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | 100 | 77,2 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas melaksanakan intervensi (SDIDTK) pada rujukan balita gangguan perkembangan | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS pada Kunjungan Balita | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang melaksanakan Kelas Ibu Balita | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 719,566,000.00 | 460,296,500.00 | 63,97 |
| | | Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan Kesehatan Peduli Remaja | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase puskesmas membina sekolah madrasah (SD/MI SMP/MIS, SMA/SMK, melalui kegiatan UKS/M | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan penjangkaran (PE berkala) | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Deteksi dini Gangguan Indera Fungsional | 40 | 13,1 | % | V | V | V | V | 695,953,000.00 | 482,113,000.00 | 69,27 |
| | | Persentase Korong yang melaksanakan Posbindu PTM | 60 | 100 | % | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-------|---|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|
| | | Persentase merokok pada usia 10-18 tahun | 8,9 | 12,5 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Merokok Pada Usia > 15 Tahun | 8,9 | 12,5 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Obesitas pada usia > 18 tahun | 21 | 21,2 | % | | | | | | | |
| | | Persentase pelayanan kesehatan pada usia 15-59 tahun sesuai standar | 100 | 83,6 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puakesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada permepuan usia 30-50 tahun | 80 | 19 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas Melaksanakan PANDU PTM | 80 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas Melaksanakan UBM | 40 | 70 | % | | | | | | | |
| | | Persentase sekolah melaksanakan kebijakan KTR | 50 | 96,90 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Persentase Puskesmas melaksanakan Posyandu Lansia | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 601,925,450.00 | 509,369,115.00 | 84,62 |
| | | Persentase Puskesmas menyelenggarakan Puskesmas Santun Lansia | 25 Puskesmas | 25 | % | | | | | | | |
| | | Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar | 100 | 82,5 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 73,6 | % | V | V | V | V | 118,438,000.00 | 89,505,000.00 | 75,57 |
| | | Prevalensi Tekanan Darah Tinggi | 35 | 0 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 92,6 | % | V | V | V | V | 74,142,000.00 | 59,236,500.00 | 79,90 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 99,0 | % | V | V | V | V | 91,610,050.00 | 66,440,850.00 | 72,53 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------|-------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|--|
| | | Persentase Penderita GME pada penduduk >15 tahun yang mendapatkan layanan | 30 | 72,3 | % | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Angka keberhasilan pengobatan kasus TB Resistan obat | 80 | 26 | % | V | V | V | V | 338,585,500.00 | 240,159,000,00 | 70,93 | |
| | | Cakupan penemuan dan pengobatan TB | 90 | 62% | % | | | | | | | | |
| | | Cakupan penemuan kasus TB Anak | 90 | 65,7 | % | | | | | | | | |
| | | Cakupan pengobatan TB RO | 70 | 89 | % | | | | | | | | |
| | | Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk | 331 | 206 | kasus | | | | | | | | |
| | | Persentase angka keberhasilan pengobatan TB | 80 | 86 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase kasus TB yang mengetahui status HIV | 100 | 87 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar | 100 | 82,9 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase penemuan kasus TB resistan obat | 95 | 26 | % | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Insident HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,18/1000 pddk | 0,05 | pddk | V | V | V | V | 115,483,550.00 | 68,990,421.00 | 59,74 | |
| | | Jumlah deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko | 95 | 75 | % | | | | | | | | |
| | | Peningkatan deteksi dini pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada Ibu Hamil | 100 | 75 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | 85 | 85 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk Infeksi Hepatitis B | 100 | 100 | % | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-------|-----------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 1,623,424,450.00 | 822,373,996.00 | 50,66 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Pembentukan TIM dalam Upaya penanggulangan Krisis Kesehatan terdampak bencana | 25 | 25 | Puskesmas | V | V | V | V | 31,480,000.00 | 25,880,000.00 | 82,21 |
| | | Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | % Balita 6- 59 bulan mendapatkan kapsul Vitamin A | 88 | 97,56 | % | | | | | 2,031,546,750.00 | 1,687,658,205.00 | 83,07 |
| | | % Balita Wasting (balita kurus dan kurus sekali) | 7,5 | 18,2 | % | | | | | | | |
| | | % Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S) | 75 | 98,11 | % | | | | | | | |
| | | % Bayi dengan berat badan lahir rendah (BB <25600 gram) | 3,8 | 11,3 | % | | | | | | | |
| | | % Bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif | 55 | 72,57 | % | | | | | | | |
| | | % Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif | 60 | 80 | % | | | | | | | |
| | | % Bayi yang baru lahir mendapatkan IMD | 62 | 88 | % | | | | | | | |
| | | % Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D) | 84 | 64,78 | % | | | | | | | |
| | | % Cakupan Balita kurang yang mendapatkan makanan tambahan | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | % Cakupan Balita Yang mempunyai buku KIA/KMS (K/S) | 75 | 99,9 | % | | | | | | | |
| | | Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan | 80 | 99,57 | % | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|-------|-----------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|--|
| | | Cakupan Ibu hamil yg mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, selama masa kehamilan. | 82 | 90,9 | % | | | | | | | | |
| | | Cakupan Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A. | 76 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | % Ibu Hamil Anemia | 39 | 43,28 | % | | | | | | | | |
| | | % Ibu Hamil Kurang Energi Protein (KEK) | 14,5 | 28,7 | % | | | | | | | | |
| | | % kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase kasus Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Pervalensi Balita Stunting | 18,4 | 25 | % | | | | | | | | |
| | | % Prevalensi Balita Underweigh (Berat badan kurang dan sangat kurang) | 14 | 30,79 | % | | | | | | | | |
| | | % Puskesmas mampu Tata Laksana gizi buruk | 30 | 0 | % | | | | | | | | |
| | | % Puskesmas melaksanakan Surveillance Gizi | 90 | 0 | % | | | | | | | | |
| | | % Remaja putri yang mendapatkan TTD | 54 | 75,9 | % | | | | | | | | |
| | | % Rumah Tangga mengkonsumsi Garam Beryodium | 86 | 0 | % | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja. | 5 | 11 | Puskesmas | V | V | V | V | 117,200,000.00 | 67,763,000.00 | 57,82 | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga | 25 | 25 | Puskesmas | | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar | 25 | 25 | % | V | V | V | V | 734,200,000.00 | 581,742,450.00 | 79,23 | |
| | | Jumlah Kecamatan Sehat | 13 | 11 | Kecamatan | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|---|---|---|---|---|------------------|----------------|-------|
| | | Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | 70 | | % | | | | | | | |
| | | Pesentase korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan | 40 | 25,71 | % | | | | | | | |
| | | Presentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | 65 | 46 | % | | | | | | | |
| | | Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | 70 | 34 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Cakupan desa siaga aktif | 50 | 43 | % | V | V | V | V | 1,091,558,000.00 | 823,536,450.00 | 75,45 |
| | | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif | 60 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) | 40 | 30 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Rumah Tangga PHBS | 74 | 74 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 95,431,400.00 | 72,518,000.00 | 75,99 |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | 4 | 5 | % | V | V | V | V | 891,738,300.00 | 646,535,850.00 | 72,5 |
| | | Cakupan desa/kelurahan UCI | 83 | 63,2 | % | | | | | | | |
| | | Cakupan Desa KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak Rubella | 81 | 27,6 | % | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|----------|---|---|---|---|------------------|------------------|-------|
| | | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 83 | 82 | % | | | | | | | |
| | | Persentase kelengkapan laporan SKDR | 87 | 99,2 | % | | | | | | | |
| | | Persentase ketepatan laporan SKDR | 92 | 98,3 | % | | | | | | | |
| | | Persentase merespon peringatan dini KLB (alert systems) merespon sinyal kewaspadaan dalam SKDR | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Persentase penderita depresi pada penduduk lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan | 30 | 71 | % | V | V | V | V | 47,680,150.00 | 40,245,150.00 | 84,41 |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 134,265,000.00 | 89,027,500.00 | 66,31 |
| | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Upaya Kesehatan Lainnya | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 22,540,000.00 | 16,525,500.00 | 73,32 |
| | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 4,000,000.00 | 1,160,000.00 | 29,0 |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Angka Cacat Ting 2 (<5/100.000 penduduk | 5 | 7 | % | V | V | V | V | 3,061,982,550.00 | 2,386,177,130.00 | 77,93 |
| | | Angka penemuan penderita Kusta B (CDR) (<5/100.0 penduduk | <5 | 3,54 | penduduk | | | | | | | |
| | | Angka usia harapa hidup | 68,99 | 69,34 | Tahun | | | | | | | |
| | | Cakupan penemu kasus diare pada balita (6.276) | 100 | 9,88 | % | | | | | | | |
| | | Cakupan Penemu kasus diare semua umur (11.383) | 100 | 16,37 | % | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Cakupan penemu pneumonia balita (1.685) | 100 | 15,2 | % | | | | | | | | |
| | | Eliminasi Rabies | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kabupaten Kota dengan Elim Filariasis | 1 Kabupaten | 1 | Kabupaten | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kecamatan dengan eliminasi Kusta | 17 Kecamatan | 0 | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kecamatan yang mencapai Eliminasi Malaria | 17 Kecamatan | 100 | Kecamatan | | | | | | | | |
| | | Jumlah orang yan memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filaria dan Kusta) | 99 Orang | 15 | orang | | | | | | | | |
| | | Penanggulangan penyakit filariasis kecacingan | 100 | 0 | % | | | | | | | | |
| | | Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate) (45/100.000) penduduk | <42 per 100.000 pddk | 14,6 | % | | | | | | | | |
| | | Penemuan kasus malaria (,1/1000 penduduk) | <1 per 1000 pddk | 0 | % | | | | | | | | |
| | | Peningkatan penatalaksanaan kasus pneumonia | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Penurunan mikrofilaria rate < | 89 | 0 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar | 55 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase tatalaksana Pneumonia sesuai standar | 55 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Prevalensi kusta (<1/10.000 penduduk) | <1per 10.000 pddk | 0,31 | % | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-------|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------|
| | | Proporsi anak yg mendapatkan penyakit kusta (< | <5% | 20 | % | | | | | | | |
| | | Proporsi Kematian akibat keracunan | 7 | 0 | % | | | | | | | |
| | | Puskesmas yg melaksanakan LROA | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan nasional | 77 | 75,04 | % | V | V | V | V | 10,148,427,480.00 | 10,015,957,104.00 | 98,69 |
| | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | Persentase layanan deteksi dini dan penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan di sekolah | 70 | 100 | % | V | V | V | V | 18,000,000.00 | 14,955,500.00 | 83,09 |
| | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah sampel yang diambil dan dikirim ke Laboratorium Rujukan | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 42,780,000.00 | 25,075,000.00 | 58,61 |
| | Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat | Persentase penilaian Kabupaten/kota sehat | 100 | 0 | % | V | V | V | V | 20,000,000.00 | 19,907,750.00 | 99,54 |
| | Operasional Pelayanan Puskesmas | | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 3,912,225,275.00 | 3,238,592,884.00 | 82,78 |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Persentase dana Operasional Labkesda, IFK dan PSC 119 | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 880,758,400.00 | 864,702,161.00 | 98,18 |
| | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama yang memenuhi Persyaratan Survei akreditasi | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 474,840,000.00 | 0 | |
| | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi | 100 | 100 | % | | | | | | | |
| | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Persentase KIPI yang ditindak lanjuti melalui investigasi lanjutan | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 114,480,000.00 | 69,766,000.00 | 60,94 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|-----------|---|---|---|---|----------------|----------------|---------------|-------|
| | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan | 100 | 100 | % | V | V | V | V | 32,830,000.00 | 26,482,900.00 | 80,67 |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah data dan informasi kesehatan serta Profil Kesehatan yang tersedia | 1 | 1 | Profil | V | V | V | V | 73,461,600.00 | 73,216,824.00 | 99,67 | |
| | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah puskesmas yang menggunakan SIKDA Generik | 25 | 25 | Puskesmas | V | V | V | V | 64,892,000.00 | 60,856,150.00 | 93,78 | |
| | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet | Jumlah puskesmas yang menggunakan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan | 25 | 25 | Puskesmas | V | V | V | V | 212,030,000.00 | 211,483,165.00 | 99,74 | |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Indeks Keluarga Sehat | 0.10 | 0,13 | % | V | V | V | V | 124,440,845.00 | 104,157,995.00 | 83,7 | |
| | | Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 25 | 25 | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas Yang menerapkan pelayanan Keperawatan kesehatan Masyarakat | 25 | 25 | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% Intervensi Keluarga Sehat | 25 | 25 | Puskesmas | | | | | | | | |
| | | Persentase Pembinaan Praktik Mandiri Dokter dan dokter gigi sesuai standar | 50 | 0 | % | | | | | | | | |
| | | Persentase Puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal | 60 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Unmeet Need Pelayanan Kesehatan | 13 | 7 | % | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---------------|---------------|-------|--|
| | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Puskesmas yang menimplementasi PSC 119 sebanyak Puskesmas | 25 | 25 | Puskesmas | | | V | V | 86,241,600.00 | 86,114,075.00 | | |
| | | | Menerapkan siste rujukan terintegra (SISRUTE) sebany 25 Puskesmas dan Rumah Sakit | 34 | 15 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase akses kualitas pelayana kesehatan rujukan | 70 | 50 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase FKTP dengan Rasio Rujukan Non Spesialistik $\leq 2\%$ | 50 | 20 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai Standar | 70 | 20 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase RS pelayanan terintegrasi pelayanan kegawa daruratannya dengan PSC 119 | 70 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase rumah sakit milik pemerintah dan fasilitas kesehatan sesuai standar | 70 | 100 | % | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pemberian izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan di fasyankes yang mempunyai SIP | 850 | 537 | Orang | V | V | V | V | 20,000,000.00 | 19,770,000.00 | 98,85 | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Klinik dan RS Swasta yang di awasi | 10 | 8 | Buah | V | V | V | V | 20,000,000.00 | 18,827,425.00 | 94,14 | |
| | | | Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengawasan tenaga kesehatan dan sarana Kesehatan | 1 | 0 | Buah | | | | | | | | |
| | | | Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin | 75 | 39 | Buah | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga kesehatan dan praktek mandiri swasta yang diawasi | 63 | 34 | Orang | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------|------------|------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pandayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di wilayah Kabupaten/ Kota | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 | 1 | Dokumen | V | V | V | V | 54,000,000.00 | 28,660,000.00 | 53,07 | |
| | | | Jumlah tenaga Kesehatan secara Teknis | 47 | 0 | Tenaga | | | | | | | | |
| | | | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | 47 | 80 | % | | | | | | | | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar | Jumlah Dokter yang merencanakan Internship | 5 | 1 | Orang | V | V | V | V | 1,073,300,000.00 | 944,289,765.00 | 87,98 | | |
| | | | Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus | 20 | 3 | % | | | | | | | | |
| | | | Persentase Puskesmas Tanpa Dokter | 0 | 4 | % | | | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan | 47 | 15 | orang | V | V | V | V | 30,000,000.00 | 15,069,204,00 | 50,23 | | |
| | | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan | 19 | 6 | Penelitian | V | V | V | V | 37,640,000.00 | 33,075,000.00 | 87,87 |
| | | | | | Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang upaya kesehatan masyarakat | 26 | 6 | Penelitian | | | | | | |
| | | | Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun | 10 | 0 | NSPK | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----|-----|-------------|---|---|---|---|---------------|---------------|-------|--|--|
| | | | Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan pelayanan kesehatan | 19 | 6 | Rekomendasi | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat | 21 | 6 | Rekomendasi | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan dan manajemen kesehatan | 35 | 15 | Sertifikat | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah tenaga SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar dan izin belajar SDM Kesehatan | 30 | 1 | Surat izin | | | | | | | | | |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah IR-P yang mendapatkan sertifikat penyuluhan | 70 | 68 | IRTP | V | V | V | V | 22.000.000,00 | 16.954.000,00 | 77,06 | | |
| | | | Jumlah IRT-P yang diawasi | 135 | 135 | IRTP | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah IRT-P yang mendapatkan sertifikat Produksi Rumah tangga pangan | 40 | 42 | Rekomendasi | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Izin Produksi PKRT yang diawasi | 2 | 0 | Sarana | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah PKRT yang diawasi | 1 | 0 | Lokasi | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang diawasi | 31 | 31 | Sarana | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Toko alat kesehatan yang diawasi | 1 | 0 | Lokasi | | | | | | | | | |
| | | | Persentase PIRT yang menerapkan CPPB | 15 | 3 | % | | | | | | | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|-----|----------------|---|---|---|---|----------------|---------------|-------|
| | | Persentase PKRT yang memenuhi standar | 100 | 100 | % | | | | | | | | |
| | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Persentase Data Perizinan yang diberikan | 70 | 100 | % | V | V | V | V | 16.125.200,00 | 13.115.500,00 | 81,34 |
| | Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan | 2 | 2 | Lokasi | | | | | 60.346.000,00 | 45.934.000,00 | 76,12 |
| | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Kantin Sekolah yang diawasi | 15 | 0 | Kantin Sekolah | V | V | V | V | 20.000.000,00 | 9.800.000,00 | 49,0 |
| | | | Jumlah Pasar Pabukoan dan Sarana distribusi pangan yang diawasi | 10 | 10 | Pasar | | | | | | | |
| | | | Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang di inspeksi kesehatan lingkungan dan TPM yang bersertifikat Laik Hygiene | 15 | 0 | TPM | | | | | | | |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Prduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan | Jumlah Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa | 15 | 15 | Post Market | | | | | 107.080.000,00 | 83.826.200,00 | 78,28 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|-----------|---|---|---|---|----------------|----------------|-------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu aktif | 60 | 50 | % | V | V | V | V | 274.450.000,00 | 242.298.465,00 | 88,29 |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Persentase rumah tangga PHBS | 74 | 74 | % | V | V | V | V | 46.200.000,00 | 46.095.865,00 | 99,77 |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah puskesmas yang melakukan upaya kesehatan bersumber masyarakat | 25 | 25 | Puskesmas | V | V | V | V | 279,482,500.00 | 169,582,800.00 | 60,68 |

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

1) Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2022

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 2.3
Pengukuran dengan Skala Ordinal

| Skala Ordinal (%) | Predikat/Kategori |
|-------------------|-------------------|
| >100 | Sangat Berhasil |
| 90 < s.d ≤ 100 | Berhasil |
| 80 < s.d ≤ 90 | Cukup Berhasil |
| 70 < s.d ≤ 80 | Kurang Berhasil |
| ≤ 70 | Tidak Berhasil |

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 tahun 2003,

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 (Renstra 2016-2021)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | | Interpretasi | |
|----|---|-------------------|---|------------|-----------|-------|--------------|-----------------|
| | | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan | 1 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | 80.5 | 80.5 | Cukup Berhasil |
| | | 2 | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di fasyankes | % | 100 | 80.27 | 80.27 | Cukup Berhasil |
| | | 3 | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir sesuai standar | % | 100 | 87.3 | 87.3 | Cukup Berhasil |
| | | 4 | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 100 | 77.2 | 77.2 | Kurang Berhasil |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|--|-----------|-------|-------|--------|-----------------|
| | | 5 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | Berhasil |
| | | 6 | Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan | % | 100 | 83.6 | 83.6 | Cukup Berhasil |
| | | 7 | Persentase pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 82.5 | 82.5 | Cukup Berhasil |
| | | 8 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 73.61 | 73.61 | Kurang Berhasil |
| | | 9 | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 92.67 | 92.67 | Berhasil |
| | | 10 | Persentase ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif | % | 100 | 98.99 | 98.99 | Berhasil |
| | | 11 | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | % | 100 | 82.92 | 82.92 | Cukup Berhasil |
| | | 12 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes | % | 100 | 100 | 100 | Berhasil |
| | | 13 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 68.99 | 69.34 | 100.51 | Sangat Berhasil |
| | | 14 | Prevalensi Stunting | % | 18.4 | 25 | 73.6 | Kurang Berhasil |
| | | 15 | Jumlah Kecamatan Sehat | Kecamatan | 13 | 11 | 84.62 | Cukup Berhasil |
| | | 16 | Indeks Keluarga Sehat | Skala | 0.10 | 0.13 | 118.18 | Sangat Berhasil |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 17 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar | % | 47 | 80 | 170.21 | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman | 18 | Jumlah IRT-P yang diawasi | IRTP | 135 | 135 | 100 | Berhasil |
| 4 | Meningkatkan Budaya Hidup Sehat | 19 | Persentase Rumah Tangga PHBS | % | 74 | 74 | 100 | Berhasil |

Dari tabel dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator:

1) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan capaian 80.5%

- 2) Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di fasyankes, dengan capaian 80.27%
- 3) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir sesuai standar, dengan capaian 87.3%
- 4) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, dengan capaian 100%
- 5) Persentase pengunjung usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan, dengan capaian 83.6%
- 6) Persentase pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan, dengan capaian 82.5%
- 7) Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 92.67%
- 8) Persentase ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif, dengan capaian 98.99%
- 9) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar, dengan capaian 100.51%
- 10) Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar, dengan capaian 82.92%
- 11) Angka Usia Harapan Hidup, dengan capaian 100.12% (68.97 Tahun)
- 12) Jumlah Kecamatan Sehat, dengan capaian 84.62%
- 13) Indeks Keluarga Sehat, dengan capaian 118.18%
- 14) Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar, dengan capaian 170.21%
- 15) Jumlah IRT-P yang diawasi, dengan capaian 100%
- 16) Persentase Rumah Tangga PHBS, dengan capaian 100%

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator:

- 1) Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, dengan capaian 77.2%
- 2) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 73.61%
- 3) Prevalensi stunting dengan capaian 73.6%

2) Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 (Renstra 2016-2021)

I. Sasaran Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan SPM Bidang Kesehatan, karena kesehatan adalah hak azasi manusia yang harus dipenuhi agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 Jenis layanan.

Untuk meningkatkan capaian SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Berikut ini adalah rencana dan realisasi Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 2.5.
Rencana dan Realisasi Capaian Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | | Interpretasi | |
|----|---|-------------------|---|------------|-----------|-------|--------------|-----------------|
| | | | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan | 1 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | % | 100 | 80.5 | 80.5 | Cukup Berhasil |
| | | 2 | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di fasyankes | % | 100 | 80.27 | 80.27 | Cukup Berhasil |
| | | 3 | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir sesuai standar | % | 100 | 87.3 | 87.3 | Cukup Berhasil |
| | | 4 | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | % | 100 | 77.2 | 77.2 | Kurang Berhasil |
| | | 5 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | Berhasil |
| | | 6 | Persentase pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan | % | 100 | 83.6 | 83.6 | Cukup Berhasil |
| | | 7 | Persentase pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | % | 100 | 82.5 | 82.5 | Cukup Berhasil |
| | | 8 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 73.61 | 73.61 | Kurang Berhasil |
| | | 9 | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | % | 100 | 92.67 | 92.67 | Berhasil |
| | | 10 | Persentase ODGJ berat (psikotik) diwilayah kerja kab yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif | % | 100 | 98.99 | 98.99 | Berhasil |

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----------|-------|-------|--------|-----------------|
| | 11 | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | % | 100 | 82.92 | 82.92 | Cukup Berhasil |
| | 12 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes | % | 100 | 100 | 100 | Berhasil |
| | 13 | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 68.99 | 69.34 | 100.51 | Sangat Berhasil |
| | 14 | Prevalensi Stunting | % | 18.4 | 25 | 73.6 | Kurang Berhasil |
| | 15 | Jumlah Kecamatan Sehat | Kecamatan | 13 | 11 | 84.62 | Cukup Berhasil |
| | 16 | Indeks Keluarga Sehat | Skala | 0.10 | 0.13 | 118.18 | Sangat Berhasil |

1. Persentase Ibu Hamil Mandapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Mekanisme Pelayanan antenatal adalah:

- a. Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS ataudata riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- b. Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - 1) Satu kali pada trimester pertama.
 - 2) Satu kali pada trimester kedua.
 - 3) Dua kali pada trimester ketiga.
- c. Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - 1) Pengukuran berat badan.
 - 2) Pengukuran tekanan darah.
 - 3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
 - 4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).
 - 5) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
 - 6) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi.
 - 7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet.
 - 8) Tes Laboratorium.
 - 9) Tatalaksana/penanganan kasus.
 - 10) Temu wicara (konseling).

Capaian pelayanan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu pada Tahun 2022 cukup berhasil yaitu sebesar 80.5% (6620 ibu hamil) dengan target sebesar 100% (8220 Ibu Hamil).

Penyebab tidak tercapainya target capaian Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (K4) tahun 2022, berdasarkan hasil wawancara, evaluasi dengan pengelola program ibu di Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman dikarenakan :

- a. Adanya Ibu Hamil yang melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta (Klinik, Praktek Mandiri Dokter dan Bidan) sehingga data ibu tidak terpantau dan tidak tercatat di pelaporan.
- b. Masih adanya Ibu Hamil yang tidak mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan, berbagai upaya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan dalam meningkatkan mutu layanan khususnya di bidang KIA, diantaranya :

- a. Adanya pertemuan pengkajian dan pembelajaran AMP (Audit Maternal Perinatal)
- b. Adanya Kegiatan promosi/kampanye terkait penurunan AKI AKB
- c. Adanya Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan GP2SP di Tingkat Kab/Kota
- d. Adanya kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : telekonsultasi USG, Pembinaan Pelayanan ANC, INC, PNC dan bayi oleh SpOG dan Sp.A di Puskesmas, dan Pelaksanaan Penyeliaan fasilitatif KIA bagi Puskesmas, TPMB, dan Klinik.
- e. Adanya Pertemuan koordinasi, sosialisasi dlm rangka meningkatkan dukungan mitra pergerakan masyarakat dan pelaksanaan posyandu
- f. Adanya Pertemuan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor dalam Penguatan Implementasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
- g. Dan adanya kegiatan Orientasi Kelas Ibu Hamil (Ibu hamil dan Ibu Balita bagi tenaga kesehatan di Puskesmas)
- h. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan pelayanan 10T pada Ibu Hamil.

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil :



Gambar: Pemeriksaan Ibu Hamil



Gambar: Kelas Ibu Hamil

Dalam meningkatkan capaian pelayanan ibu hamil, Dinas kesehatan juga mengalami permasalahan. Berikut beberapa permasalahan dan solusi yang di lakukan untuk meningkatkan capaian pelayanan ibu hamil di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022:

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Ibu Hamil
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|--|---|
| Rendahnya capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | <p>Manusia Kurangnya kompetensi petugas dalam melaksanakan program Kurangnya disiplin dan tanggung jawab petugas</p> <p>Dana/ Anggaran Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan</p> <p>Peralatan Pedoman pelaksanaan program masih belum cukup Sarana dan prasarana untuk pelayanan ibu hamil masih kurang</p> <p>Machine Kurangnya media promosi kesehatan Sarana pendukung pelayanan ibu masih kurang (tensimeter, Cek Hb, Timbangan, LILA dll</p> <p>Metode Pola pelayanan masih belum aktif Sosialisasi pengisian register, kohort dan PWS ibu hamil masih kurang Pelatihan teknis pelayanan persalinan masih kurang Supervisi dan pengawasan masih kurang</p> <p>Environment Masih banyak wilayah kerja yang sulit untuk di akses.</p> | <p>Manusia Pembinaan kedisiplinan yang berkoordinasi dengan kepegawaian</p> <p>Money Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai</p> <p>Material (peralatan) Melengkapi buku pedoman pelaksanaan program Melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Machine Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Melengkapi sarana pendukung pelayanan ibu hamil</p> <p>Metode Melakukan kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak datang melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan Melakukan sosialisasi/pelatihan pengisian register, kohort dan PWS KIA ibu hamil Mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk Pelatihan petugas PONEB supervisi dan pengawasan ke seluruh puskesmas untuk program kesehatan ibu dan anak</p> <p>Environment Mendekatkan pelayanan melalui UKBM (Posyandu, Polindes, Poskesri, Pustu) dan melakukan kunjungan rumah Meningkatkan promosi pentingnya pelayanan ibu hamil</p> |

2. Persentase Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Di Fasyankes

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi Persalinan normal dan Persalinan komplikasi. Mekanisme Pelayanan ibu bersalin adalah:

- a. Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey / riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.
 - 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Tenaga penolong ,minimal 2 orang, terdiri dari :
 - Dokter dan bidan, atau
 - Bidan dan Perawat
 - 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan ibu bersalin menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100 \%$$

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2022 cukup berhasil yaitu sebesar 80.27% (6343 Ibu bersalin) dengan target 100% (7847 Ibu bersalin). Dokumentasi kegiatan pelayanan ibu bersalin sesuai standar sebagai berikut:



Gambar: Pemeriksaan Ibu Bersalin



Gambar: Persalinan di Fasyankes

Dalam pencapaian target 100% pelayanan Ibu Bersalin pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalami beberapa permasalahan. Berikut ini adalah permasalahan dan solusi yang dilakukan :

Tabel 2.7.
Permasalahan Pelayanan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|--|---|
| Rendahnya cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar di fasyankes | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya disiplin dan tanggung jawab petugas <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana untuk pelayanan ibu bersalin masih kurang <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana pendukung pelayanan ibu masih kurang (tensimeter, Cek Hb, Timbangan, LILA dll _ <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengisian register, kohort dan PWS ibu hamil masih kurang - Pelatihan teknis pelayanan persalinan masih kurang <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang sulit untuk di akses. | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kedisiplinan yang berkoordinasi dengan kepegawaian <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi sarana pendukung pelayanan ibu hamil <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi/pelatihan pengisian register, kohort dan PWS KIA ibu hamil - Mengajukan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk Peltihan petugas PONE <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan promosi pentingnya pelayanan ibu hamil. |

3. Persentase Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Baru Lahir Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (0-28 hari) sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi Standar Kuantitas dan Standar Kualitas. Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data dari PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan.
 - Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
 - Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
 - Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari

c. Standar Kualitas:

1) Pelayanan Neonatal Essensial saat lahir meliputi :

Perawatan neonatal essensial saat lahir meliputi :

- a) Pemotongan dan perawatan tali pusat
- b) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- c) Injeksi Vitamin K1
- d) Pemberian salep/tetes mata antibiotic
- e) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0)

2) Pelayanan Neonatal Essensial setelah lahir (6 jam-28 hari)

Perawatan neonatal essensial setelah lahir meliputi :

- a) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI Eksklusif
- b) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
- c) Pemberian Vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1
- d) Imunisasi Hepatitis B Injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan
- e) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l} \text{Presentase} \\ \text{bayi baru lahir} \\ \text{mendapatkan} \\ \text{pelayanan} \\ \text{kesehatan bayi} \\ \text{baru lahir} \end{array} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28} \\ \text{hari yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{kesehatan bayi baru lahir sesuai} \\ \text{dengan standar dalam kurun} \\ \text{waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di}} \times 100 \% \\ \text{wilayah kerja kabupaten/kota} \\ \text{tersebut dalam kurun waktu satu} \\ \text{tahun yang sama}$$

Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Tahun 2022 cukup berhasil yaitu sebesar 87.3% (6580 Bayi baru lahir) dari target 100% (7847 bayi baru lahir). Berikut ini dokumentasi kegiatan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:



Gambar: Imunisasi saat Posyandu



Gambar: Posyandu

Dalam pencapaian target 100% pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalami beberapa permasalahan. Berikut ini adalah permasalahan dan solusi yang dilakukan:

Tabel 2.8.
Permasalahan Pelayanan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|--|--|
| Rendahnya capaian bayi baru lahir mendapatkan kesehatan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pelayanan Bayi Baru Lahir <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Pedoman pelaksanaan program Bayi Baru Lahir masih kurang <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Bayi Baru Lahir masih kurang <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pelayanan masih belum aktif - Sosialisasi pengisian register, kohort dan PWS ibu hamil masih kurang - Supervisi dan pengawasan masih kurang <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang sulit untuk di akses. | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan teknis yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi sarana pendukung pelayanan Bayi Baru Lahir <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan rumah - Melakukan sosialisasi/pelatihan pengisian register, kohort dan PWS BBL - Melakukan supervisi dan pengawasan ke seluruh puskesmas untuk program kesehatan ibu dan anak <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendekatkan pelayanan melalui UKBM (Posyandu, Polindes, Poskesri, Pustu) dan melakukan kunjungan rumah |

4. Persentase Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Balita (usia 0-59 bulan) sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi

Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit. Mekanisme Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah:

- a. Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data dari PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi.
 - 1) Pelayanan Kesehatan Balita usia 0-11 bulan
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/ tahun
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
 - d) Pemberian kapsul Vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e) Pemberian imunisasi dasar lengkap
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita usia 12-23 bulan
 - a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, pemberian kapsul Vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - d) Pemberian Imunisasi Lanjutan
 - 3) Pelayanan Kesehatan Balita Usia 24-59 bulan
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan)
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali pertahun
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun
 - 5) Pemantauan perkembangan balita
 - 6) Pemberian Kapsul Vitamin A
 - 7) Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap
 - 8) Pemberian Imunisasi Lanjutan
 - 9) Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan
 - 10) Edukasi dan Informasi
- c. Pelayanan Kesehatan Balita Sakit adalah balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan balita menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan} \\
 \text{Pelayanan} \\
 \text{Kesehatan Balita} \\
 \text{sesuai Standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan} \\
 \text{yang mendapat Pelayanan Kesehatan} \\
 \text{sesuai Standar}^1 + \text{Jumlah Balita} \\
 \text{usia 24-35 bulan mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}^2 + \text{Balita usia 36-59 bulan} \\
 \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\
 \text{standar}^3
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan} \\
 \text{di wilayah kerja Kabupaten/kota} \\
 \text{tersebut pada kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar pada tahun 2022 kurang berhasil yaitu sebesar 77.2% (28.430 balita) dimana target yang telah ditetapkan adalah sebesar 100% (36.722 balita). Walaupun kurang berhasil, tetapi capaian pelayanan kesehatan balita tahun 2022 mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan balita adalah:



Gambar: Penimbangan Posyandu



Gambar: Penimbangan Posyandu

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.9.
Permasalahan Pelayanan Balita Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|--|--|
| Rendahnya capaian pelayanan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kompetensi petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan Balita <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Pedoman pelaksanaan program Kesehatan Balita <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan kesehatan Balita masih kurang <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pelayanan masih belum aktif - Sosialisasi pengisian register, kohort dan PWS pelayanan kesehatan Balita - Supervisi dan pengawasan masih kurang <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang sulit untuk di akses. | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelatihan teknis yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan Balita <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - melengkapi sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan balita di fasilitas pelayanan kesehatan <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi sarana pendukung pelayanan Kesehatan Balita |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|----------|---|
| | | <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan rumah - Melakukan sosialisasi/pelatihan pengisian register, kohort dan PWS Balita - Melakukan supervisi dan pengawasan ke seluruh puskesmas untuk program kesehatan <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendekatkan pelayanan melalui UKBM (Posyandu, Polindes, Poskesri, Pustu) dan melakukan kunjungan rumah |

5. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan di luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi Skrinning kesehatan dan tindak lanjut hasil skrinning kesehatan. Mekanisme Pelayanan anak usia pendidikan dasar adalah:

- a. Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalamn satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Skrinning Kesehatan.
 Pelaksanaan skrinning kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya meliputi :
 - 1) Penilaian Status Gizi.
 - 2) Penilaian tanda vital
 - 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut
 - 4) Penilaian ketajaman indera
- c. Tindak lanjut hasil skreening kesehatan meliputi :
 - 1) Memberikan umpan balik hasil skreening kesehatan
 - 2) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - 3) Memberikan penyuluhan kesehatan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan balita menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\frac{\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.}}} \times 100 \%$$

Persentase Anak usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar pada Tahun 2022 belum berhasil yaitu sebesar 100%. Capaian untuk indikator anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Karena semua sasaran wajib dilakukan skrining.



Gambar: Skrining Anak Usia Pendidikan Dasar



Gambar: Skrining Anak Pendidikan Dasar

6. Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Pelayanan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mekanisme Pelayanan adalah:

- a) Penetapan sasaran usia produktif di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM
- c) Pelayanan skrining faktor resiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :
 - 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 - 2) Pengukuran tekanan darah
 - 3) Pemeriksaan gula darah
 - 4) Anamnesa perilaku beresiko
- d) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi :
 - 1) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - 2) Memberikan penyuluhan kesehatan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$$

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 cukup berhasil yaitu sebesar 83,6%. kegiatan yang dilakukan di antara lain Posbindu yang dilakukan tiap bulan, posbindu khusus perkantoran dan sekolah, Posbindu terintegrasi yaitu Posbindu Jemaah Haji. Berikut dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan produktif adalah:



Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.10.
Permasalahan Pelayanan Usia Prduktif Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---|--|--|
| Rendahnya capaian orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dnegan standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin - Kurangnya penyuluhan petugas tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin - Belum semua pengelola P2PTM dilatih dalam melaksanakan program P2PTM <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|---|--|
| | <p>melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan PTM</p> <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posbindu KIT belum menyebar di seluruh Posbindu dan sudah banyak yang rusak <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media promosi kesehatan <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pelayanan yang masih belum cukup aktif <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang belum bisa di akses untuk melakukan kegiatan Posbindu | <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas - Membuat surat pernyataan oleh setiap petugas yang sudah dilatih tidak boleh pindah selama 5 tahun <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan usulan pengadaan Posbindu KIT untuk Tahun 2020 dari DAK Fisik <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas melakukan kunjungan rumah <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk wilayah kerja yang belum bisa di akses dengan kegiatan posbindu PTM |

7. Persentase Penduduk Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Pelayanan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar kepada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Mekanisme Pelayanan sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran usia 60 tahun ke atas di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah skrining yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah
- c. Pelayanan skrining faktor resiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku beresiko
- d. Tindak lanjut hasil skreening kesehatan meliputi :
 - a) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - b) Memberikan penyuluhan kesehatan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{warga negara} \\
 \text{usia 60} \\
 \text{tahun ke} \\
 \text{atas} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{skrining} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{sesuai} \\
 \text{standard}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun} \\
 \text{atau lebih yang mendapat skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar minimal 1 kali} \\
 \text{yang ada di suatu wilayah kerja} \\
 \text{kabupaten/kota dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun (Nominator)}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua warga negara berusia 60} \\
 \text{tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah} \\
 \text{kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun yang sama (Denominator)}
 \end{array}} \times 100 \%$$

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 belum berhasil yaitu sebesar 82.5 % (65.643 orang) dengan target 100% (81.882 orang). Capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan penduduk usia 60 tahun keatas:



Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.11.
Permasalahan Pelayanan Usia Lanjut Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|---|--|
| Persentase Warga Negara 60 Tahun Ke Atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin - Kurangnya penyuluhan petugas tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin - Belum semua pengelola P2PTM dilatih dalam melaksanakan program P2PTM <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan PTM <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posbindu KIT belum menyebar di seluruh Posbindu dan sudah banyak yang rusak <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media promosi kesehatan <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pelayanan yang masih belum cukup aktif <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang belum bisa di akses untuk melakukan kegiatan Posbindu | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas - Membuat surat pernyataan oleh setiap petugas yang sudah dilatih tidak boleh pindah selama 5 tahun. <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan usulan pengadaan Posbindu KIT untuk Tahun 2022 dari DAK Fisik <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|----------|--|
| | | Metode - Puskesmas melakukan kunjungan rumah Environment - Untuk wilayah kerja yang belum bisa di akses dengan kegiatan posbindu PTM, petugas kesehatan langsung datang kerumah masing-masing masyarakat. |

8. Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi. Mekanisme Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran penderita hipertensi di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- b. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi :
 - 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - 3) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{penderita} \\
 \text{Hipertensi} \\
 \text{yang} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{kesehatan} \\
 \text{sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penderita hipertensi usia} \\
 \text{\(\geq 15\)} \text{ tahun di dalam wilayah} \\
 \text{kerjanya yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan sesuai standar} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah estimasi penderita} \\
 \text{hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang} \\
 \text{berada di dalam wilayah kerjanya} \\
 \text{berdasarkan angka prevalensi} \\
 \text{kab/kota dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama.}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

Dari estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 belum berhasil yaitu sebesar 73.61%. Capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Hipertensi masih dianggap sepele oleh sebagian masyarakat sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin. Karena kurangnya promosi dan sosialisasi tentang hipertensi

menyebabkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut tidak datang berobat ke puskesmas. Dan yang datang ke fasyankes hanya sasaran yang sama Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:



Gambar: Posbindu PTM



Gambar: Posbindu PTM

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.12.
Permasalahan Pelayanan Hipertensi Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|---|--|
| Rendahnya capaian penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Tekanan Darah secara rutin - Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi garam dan santan - Kurangnya penyuluhan petugas tentang pentingnya melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin - Belum semua pengelola P2PTM dilatih dalam melaksanakan program P2PTM - Petugas yang dilatih pindah tugas ke tempat lain <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan PTM <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posbindu KIT belum menyebar di seluruh Posbindu dan sudah banyak yang rusak | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas - Melakukan penyuluhan pada saat Posbindu kepada kelompok sasaran P2PTM tentang faktor-faktor pemicu meningkatnya tekanan darah dan menjelaskan kandungan yang terkandung didalam garam dan santan - Melakukan sosialisasi |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|---|--|
| | Machine - Kurangnya media promosi kesehatan Metode - Pola pelayanan yang masih belum cukup aktif Environment - Masih banyak wilayah kerja yang belum bisa di akses untuk melakukan kegiatan Posbindu | kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan Money - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai Material (peralatan) - Mengajukan usulan pengadaan Posbindu KIT untuk Tahun 2020 dari DAK Fisik Machine - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Metode - Puskesmas melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak datang ke posbindu - Melakukan pemeriksaan kesehatan pada HKN dan Hari besar Nasional Environment - Untuk wilayah kerja yang belum bisa di akses dengan kegiatan posbindu PTM, petugas kesehatan langsung datang kerumah masing-masing masyarakat. |

9. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar meliputi pengukuran gula darah, Edukasi, dan terapi farmakologi. Mekanisme Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran penderita hipertensi di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi :
 - 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - 3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan usia produktif menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

| | | |
|---|---|--|
| Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | = | $\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$ |
|---|---|--|

Capaian penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan angka prevalensi DM pada tahun 2022 sudah berhasil yaitu sebesar 92.67%. Capaian ini sudah tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gejala penyakit diabetes melitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yaitu:



Gambar: Posbindu PTM



Gambar: Posbindu PTM

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.13.
Permasalahan Pelayanan Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|--|--|
| Rendahnya capaian penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Manusia - Kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya melakukan pemeriksaan Gula Darah secara rutin | Manusia - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi garam dan santan - Belum semua pengelola P2PTM dilatih dalam melaksanakan program P2PTM - Petugas yang dilatih pindah tugas ke tempat lain <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan PTM <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posbindu KIT belum menyebar di seluruh Posbindu dan sudah banyak yang rusak - Stick pemeriksaan Gula Darah terbatas <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media promosi kesehatan <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola pelayanan yang masih belum cukup aktif <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak wilayah kerja yang belum bisa di akses untuk melakukan kegiatan Posbindu | <p>petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien hipertensi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas - Mengajukan Permintaan Pelatihan Petugas P2PTM Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat karena tidak diakomodir dalam anggaran APBD - Membuat surat pernyataan oleh setiap petugas yang sudah dilatih tidak boleh pindah selama 5 tahun <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan usulan pengadaan Posbindu KIT untuk Tahun 2020 dari DAK Fisik - Puskesmas membuat inovasi di program Posbindu, dimana setiap pasien yang berkunjung ke posbindu badoncek untuk membeli stik pemeriksaan gula darah <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|----------|--|
| | | Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Metode - Puskesmas melakukan kunjungan rumah Environment - Untuk wilayah kerja yang belum bisa di akses dengan - kegiatan posbindu PTM, petugas kesehatan langsung datang kerumah masing-masing masyarakat. |

10. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Promotif Preventif

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan Edukasi. Mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran pada ODGJ berat di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi :
 - 1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - 3) Edukasi kepatuhan minum obat
 - 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan ODGJ sesuai standar menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} \\
 \text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun} \\
 \hline
 \text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}
 \end{array}
 \times 100 \%$$

Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik) di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebesar 98,99%. Dari 890 Sasaran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 881 ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif. Dalam artian,

ada 9 ODGJ yang tidak mendapatkan pelayanan dikarenakan sasaran tersebut sudah meninggal dunia dan hilang.

Walaupun capaian pelayanan ODGJ sesuai standar ini masuk dalam kategori berhasil, tetapi di Kabupaten Padang Pariaman masih ada ODGJ yang di pasung. Capaian ini sudah mencapai target dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 100%. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yaitu:



Gambar: Kunjungan ODGJ



Gambar: Kunjungan ODGJ

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.14.
Permasalahan Pelayanan ODGJ Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---|---|--|
| Rendahnya capaian ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah petugas pengelola kesehatan jiwa masih kurang - Petugas pengelola kesehatan jiwa banyak mempunyai tugas ganda - Kurangnya kepedulian anggota keluarga terhadap pasien jiwa - Peran Lintas Sektor masih kurang jelas dalam penanganan pasien ODGJ <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran untuk melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan jiwa di Puskesmas <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan obat jiwa di Puskesmas - Stick pemeriksaan Gula Darah terbatas <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media promosi kesehatan tentang program kesehatan jiwa - Pasien Jiwa masih banyak yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan <p>Metode</p> | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kepada Kepala Puskesmas agar dibuatkan SK Penanggung Jawab Program khususnya Pengelola Program Kesehatan Jiwa beserta dengan uraian Tugasnya - Memberikan arahan kepada Kepala Puskesmas agar melakukan pemerataan terhadap penanggung jawab pengelola program - Memberikan konseling kepada keluarga pasien yang menderita ODGJ, agar lebih peduli terhadap pasien jiwa melalui kegiatan pemberdayaan keluarga - Melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait, dan menjelaskan peran |

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|---------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan program kesehatan jiwa masih bersifat pasif <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada diskriminasi dari masyarakat terhadap pasien ODGJ | <p>masing-masing lintas sektor dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Program Kesehatan Jiwa</p> <p>Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan agar target SPM di Bidang Kesehatan bisa tercapai <p>Material (peralatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam penyediaan obat jiwa di Puskesmas <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi petugas pengelola program jiwa dan dokter puskesmas dengan tujuan agar bisa melaksanakan program kesehatan jiwa sesuai dengan pedoman pelaksanaan kesehatan jiwa di Puskesmas. <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama psikologis atau dukungan awal psikologis akan banyak memberikan manfaat maksimal tidak hanya bagi prognosis kesehatan jiwa tetapi juga dalam pembangunan kesehatan dan kualitas bangsa |

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu

tahun. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Mekanisme Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC menggunakan data PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun adalah pemeriksaan gejala dan tanda
- c. Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- d. Edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan

Untuk menghitung capaian kinerja dengan menggunakan rumusan perhitungan kinerja berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{Orang} \\
 \text{terduga TBC} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{TBC sesuai}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang terduga TBC} \\
 \text{yang dilakukan pemeriksaan} \\
 \text{penunjang dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun.}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah orang yang terduga} \\
 \text{TBC dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun yang sama.}
 \end{array}} \times 100 \%$$

Cakupan penderita terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebesar 82.92%. Capaian ini cukup berhasil dari target 100%. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang capaian pelayanan penderita terduga TBC diantaranya supervisi Bimtek, Monitoring dan Evaluasi, Validasi data TB SO/RO, pelacakan kasus dan investigasi kontak.

Dibandingkan tahun 2021, capaian pelayanan penderita terduga TBC mengalami peningkatan . Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemegang program TBC dan dukungan dari lintas program maupun lintas sektor. Kemudian juga sudah tersediannya alat TCM yang ada di lima tempat yaitu, RSUD Parit Malintang, Rumah Sakit Paru, Puskesmas Kayu Tanam, Puskesmas Sungai Limau, dan Puskesmas Ampalu. Dan ini juga menunjang meningkatnya capaian pelayanan penderita terduga TBC di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan:



Gambar: Pelacakan Kasus TBC



Gambar: Investigasi Kontak

Adapun kendala yang di hadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah:

Tabel 2.15.
Permasalahan Pelayanan TBC Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Masalah | Penyebab | Pemecahan Masalah |
|--|---|---|
| Rendahnya capaian orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Program TB dipuskesmas sering diganti - Kurangnya Tenaga Analis di Puskesmas - Kurangnya Kompetensi petugas dalam melaksanakan program TB - Tidak semua puskesmas mempunyai Kader TB <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya dukungan anggaran dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pemantauan dan peningkatan kompetensi petugas dalam melaksanakan kegiatan <p>Peralatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Ruang Poli Khusus untuk Pelayanan TB - Kurangnya alat TCM untuk pemeriksaan <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya media promosi kesehatan tentang program kesehatan TB <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penemuan pasien terduga TB masih pasif - Kurangnya sosialisasi program TB ke masyarakat - Kurangnya Monitoring dan evaluasi serta validasi data TB oleh Kepala Puskemas <p>Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih ada wilayah kerja yang belum bisa di akses - Kurangnya keasadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB | <p>Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat komitmen dengan kepala puskesmas agar pemegang program TB tidak diganti setiap tahun - Melakukan pengrekrutan tenaga analis dari DAK Non Fisik Puskesmas - Melakukan pelatihan bagi petugas TB - Melakukan pelatihan bagi petugas TB <p>Dana/ Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan <p>Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pelayanan TB di ruang khusus Poli Tb - Mengajukan pengadaan TCM melalui anggaran DAK Fisik Tahun 2021 <p>Machine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat <p>Metode</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penjangkaran terduga TB secara aktif - Melakukan sosialisasi tentang program TB kepada seluruh masyarakat terutama kepada kelompok yang beresiko - Melakukan monev |

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) - HIV) di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku beresiko dan skrinning. Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
- c. Pasien Infeksi Manular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
- f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g. Pengguna NAPZA suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme pelayanan kesehatan untuk orang yang terinfeksi HIV adalah:

- a. Penetapan sasaran HIV menggunakan data orang yang beresiko terinfeksi HIV (Penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan
- c. Skrinning dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pelayanan kesehatan terinfeksi HIV sesuai standar menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu:

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase} \\
 \text{orang dengan} \\
 \text{risiko terinfeksi} \\
 \text{HIV} \\
 \text{mendapatkan} \\
 \text{pelayanan} \\
 \text{deteksi dini HIV} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan sesuai} \\
 \text{standar dalam kurun waktu} \\
 \text{satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko} \\
 \text{terinfeksi HIV dikab/kota} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun} \\
 \text{yang sama}} \times 100 \%$$

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebesar 100%. Pada tahun 2022, setiap pasien TBC, IMS, Ibu hamil wajib melakukan skrening HIV, dan ini yang menyebabkan tingginya capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Hal ini Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan.



Gambar: Pemeriksaan Catin



Gambar: Pemeriksaan Catin

13. Angka Usia Harapan Hidup

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Indikator kinerja berdasarkan Reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

Tabel 2.16.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Usia Harapan Hidup
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Interpretasi |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Angka Usia Harapan Hidup | 68.99 | 69.34 | 100.51 | Sangat Berhasil |

Dari tabel 3.16, dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu 69,34 tahun sedangkan target yang ditetapkan adalah 68.99 tahun dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Artinya angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mempunyai harapan hidup selama 69.34 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 69.34 tahun pada tahun kedepan.

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian Indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi. Serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Angka usia harapan hidup dapat meningkat karena salah satunya adanya upaya pengendalian masalah kesehatan, upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai usia harapan hidup yang tinggi adalah melakukan peningkatan cakupan dan kualitas pencegahan serta pengendalian penyakit menular, diantaranya:

a. Melakukan Rapid Village Survey (RVS) Kusta di Puskesmas

Penyakit kusta atau lepra merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Leprae* dan utamanya mempengaruhi kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Bakteri lepra mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu, daya tahan hidup di luar tubuh manusia mencapai 9 hari, dan memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Pada tahun 2022, Angka penemuan penderita kusta baru atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah 3.54/ 100.000 penduduk (jumlah kasus baru 15 orang), dimana target yang ditentukan adalah < 5 per 100.000 penduduk. Artinya masih ada penularan penyakit kusta pada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 15 orang. Setelah ditemukan kasus baru dilakukan Pemeriksaan kontak serumah. Guna untuk penemuan kasus secara dini. Supaya tidak terjadi penularan lainnya.

Untuk menekan angka penemuan kusta baru (CDR) tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan *Rapid Village Survey* (RVS) yang merupakan suatu cara menemukan penderita baru kusta secara aktif dalam lingkup yang lebih kecil (Kenagarian/ Korong) yang dilakukan secara rutin per bulan melalui deteksi dini pada kelompok retan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.



Gambar: RVS Kusta



Gambar: Deteksi Dini Kusta

Penemuan penderita baru terkait dengan deteksi dini penyakit kusta di masyarakat yang sangat sulit. Ini di karenakan anggapan masyarakat yang negatif terhadap penderita kusta seperti rasa ketakutan yang berlebihan kepada masyarakat dan petugas kesehatan karena menganggap kusta adalah kutukan, penyakit keturunan dan guna-guna, sehingga penderita malu untuk berobat ke fasyankes. Kondisi kecatatan penderita kusta yang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman ada 1 penderita yang masuk kategori Cacat tingkat 2. Hal ini dikarenakan adanya upaya pencarian pelayanan kesehatan oleh penderita kusta dan keluarga yang salah seperti penggunaan pengobatan tradisional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya melakukan penemuan kasus sejak dini dan juga meningkatkan sosialisasi ke seluruh masyarakat, dan juga melakukan edukasi dan penyebaran informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

b. Penemuan Kasus Diare Melalui Layanan Rehidrasi Oral Aktif

Diare merupakan keadaan buang air besar (defakasi) lebih dari tiga kali dalam 24 jam dengan kondisi tinja berbentuk cairan atau stengah cair.

Di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2022 ,ditemukan kasus diare sebanyak 2484 kasus yang terbagi 1.872 kasus diare pada semua umur, dan 612 pada balita, semua kasus diare tersebut (100%) ditangani sesuai standar yaitu pemberian oralit pada semua umur, juga oralit dan Zinc pada Balita.

Kegiatan pokok pengendalian diare diantara melakukan review dan memperkuat aspek legal, melakukan advokasi, sosialisasi (KIE), dan melaksanakan layanan rehidrasi oral aktif (LROA).

LROA merupakan sarana pemberian oralit dan observasi selama 4 jam untuk penderita diare tanpa atau dengan dehidrasi ringan/ sedang serta kegiatan konseling atau penyuluhan tentang diare dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat.



Gambar: Sosialisasi KIE



Gambar: LROA

Penemuan Kasus Pneumonia Melalui Kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Pneumonia merupakan suatu penyakit yang masih merupakan penyakit utama penyebab kesakitan bayi dan balita di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 252 balita mengalami pneumonia dari 1.648 balita (15.21%).

Untuk meningkatkan penemuan kasus pneumonia, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan kegiatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Merupakan suatu pendekatan yang terintegrasi/ terpadu dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan (balita) secara menyeluruh. Kegiatan ini merupakan suatu manajemen untuk balita yang datang di pelayanan kesehatan, dilaksanakan secara terpadu mengenai klasifikasi, status gizi, status imun maupun penanganan dan konseling yang di berikan kepada masyarakat.

Untuk mencegah penularan Pneumonia pada balita di lakukan sosialisasi Upaya Berhenti Merokok di dalam rumah.



Gambar: MTBS



Penemuan Kasus DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai penyakit yang endemis di masyarakat, terutama sangat berbahaya bagi kalangan anak-anak. Penyebab penyakit ini adalah virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* sebagai faktor utama, disamping nyamuk *Aedes albopictus*. Demam dengue dapat menyebabkan demam tinggi, ruam, nyeri otot dan sendi. Sedangkan demam berdarah dengue (DBD) dapat menyebabkan kebocoran plasma yang mengakibatkan perdarahan serius, penurunan tekanan darah tiba-tiba (syok), hingga bahkan kematian.

Penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus ini dapat menyerang siapa saja, dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa. Pada umumnya penderita demam berdarah sebelumnya mengalami gejala yang sangat bervariasi. Mulai demam ringan sampai gejala yang paling berat, seperti penderita mengalami muntah-muntah atau berak darah. Biasanya penderita demam berdarah dialami oleh bayi atau anak-anak, ditandai dengan ruam-ruam pada kulit. Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sudah tercatat 62 kasus positif DBD. Musim hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air, diterangi menjadi penyebab utama kembali meningkatnya kasus DBD tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan Puskesmas di wilayahnya melakukan sosialisasi 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang yang tidak layak pakai, dan Plus kegiatan yang tergantung pada kreativitas seperti memelihara ikan cupang, menaburkan bubuk abate, menggunakan obat nyamuk dan lain-lain. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan Fogging apabila penderita DBD lain di lokasi penderita (20 rumah sekitar penderita).



Gambar: Fogging Fokus

Gambar: 3M Plus

e. Eliminasi Rabies

Rabies merupakan penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini ditularkan pada manusia melalui kegiatan hewan penular rabies terutama anjing, kucing, dan kerbau. Selain itu, virus tersebut juga dapat ditularkan melalui kontak virus dengan luka pada host ataupun melalui membran mukosa. Penyakit ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat, karena jika penyakit ini menyerang manusia dan tidak mendapatkan perawatan medis akan mengakibatkan kematian.

Pada tahun 2022, Kabupaten Padang Pariaman 100% Eliminasi Rabies, dikarenakan setiap kasus gigitan hewan penular rabies (GHPR) dilakukan pemberian vaksin anti rabies guna untuk mencegah kematian orang yang digigit hewan tersebut.



Gambar: Pemberian Vaksin Anti Rabies



Gambar: Pemberian Vaksin Anti Rabies

f. Penanggulangan Penyakit Filariasis dan Kecacingan

Filariasis atau yang biasa dikenal dengan penyakit Kaki Gajah adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing *Filaria* (*Microfilaria*) yang dapat menular lewat perantara Nyamuk sebagai Vektor (Penular Utama). Penyakit ini bersifat menahun (kronis) dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap seumur hidup berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki yang dapat menimbulkan dampak psikologis buruk bagi penderitanya.

Pada tahun 2022, Kabupaten Padang Pariaman tidak ditemukan kasus baru Filariasis itu dikarenakan pemberian obat massal atau Pemberian Obat Pencegahan secara Masal Filariasis (POPMF) dari tahun 2013 - 2017 pada masyarakat. Pada tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan hasil "**Sangat Memuaskan**" TAS (*Transmission Assesment Survey*) Filariasis. TAS Filariasis adalah upaya pemerintah melakukan evaluasi untuk menilai berhentinya penularan suatu penyakit dengan melakukan survey pengukuran penularan penyakit Filariasis.

Kecacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit berupa cacing. Cacing umumnya tidak menyebabkan penyakit berat sehingga seringkali diabaikan walaupun sesungguhnya memberikan gangguan kesehatan. Tetapi dalam keadaan infeksi berat atau keadaan yang luar biasa, kecacingan cenderung memberikan analisa keliru kearah penyakit lain dan tidak jarang dapat berakibat fatal. Pada tahun 2022, Kabupaten Padang Pariaman juga melaksanakan pemberian obat cacing pada anak sekolah dengan pencapaian penanggulangan kecacingan 100%.



Gambar: Persiapan survey pengukuran Filariasis



Gambar: Survey pengukuran Filariasis



Gambar: Survey pengukuran Filariasis



Gambar: Pemberian Obat Cacing

14. Prevalensi Stunting

Percepatan perbaikan gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting adalah 14% dan wasting 7% di tahun 2024. Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting maka disusun Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu: 1) Persentase Bumil KEK (target 10% tahun 2024), 2) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Surveilans Gizi (target 100% tahun 2024), 3) Persentase Puskesmas mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita (target 60% tahun 2024), dan 4) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (target 60% tahun 2024).

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui surveilans gizi yang meliputi indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi. Dengan demikian, salah satu upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penguatan surveilans gizi, diperlukan pedoman pelaksanaan teknis Surveilans Gizi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan masalah gizi masyarakat.

Tabel 2.17.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|---------------------|------------|-----------|------|-----------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Prevalensi Stunting | 18.4 | 25 | 73.6 | Kurang Berhasil |

Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun/balita. Pada tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 25% dimana target 18.4%. Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi prevalensi stunting menurun di banding tahun 2021 yaitu dari 28.3% menjadi 25% turun sebesar 3.3%.

Permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.

Salah satu Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan yang menunjang penurunan angka stunting antara lain:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin
 - 1) Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 99,59%, hal ini menunjukkan jika cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan sudah melebihi target nasional sebesar 80%, karena dari kemenkes sendiri telah memberikan MT dengan jumlah yang cukup sehingga pemenuhan capaiannya juga optimal. Presentase cakupan ibu hamil Kurang Energi

Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga sudah melebihi target yang telah ditentukan nasional. Puskesmas yang memiliki presentase ibu Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan terkecil yaitu Puskesmas Sei Sarik dengan persentase 87,5%. Sedangkan, puskesmas lainnya di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai persentase 100%.



Gambar: Pemeriksaan Ibu hamil KEK



Gambar: Ibu hamil KEK yang mendapatkan Makanan Tambahan

- 2) Ibu hamil yang mendapatkan TTD Min 90 Tablet dan Ibu Bersalin yang mendapatkan Vitamin A. Persentase cakupan ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 90,89%, hal ini menunjukkan jika cakupan ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah sudah melebihi target nasional sebesar 82%, karena pemberian TTD tersebut telah dilakukan secara optimal

b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Balita

- 1) Bayi usia 6-59 Bulan yang mendapatkan Vit-A.ersentase cakupan bayi usia 6-59 bulan mendapat vitamin A di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 96,61%, hal ini menunjukkan jika cakupan bayi usia 6-59 bulan mendapat vitamin A sudah melebihi target nasional sebesar 88%.



Gambar: Pemberian Vitamin A pada Bayi Usia 6-59 bulan

- 2) Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan. Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapatkan PMT di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar 95,79%, hal ini menunjukkan jika Kasus Gizi Balita Gizi Kurang yang mendapatkan PMT sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 85%



Gambar: Pemberian PMT Pada Balita Gizi Kurang



Gambar: Pemberian PMT Pada Balita Gizi Kurang

Aksi konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.

Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting :

AKSI 1 : ANALISA SITUASI

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Aksi 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 di Hotel Rocky Padang.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa komponen mulai dari identifikasi data sasaran, identifikasi data cakupan, penentuan lokasi/desa prioritas, identifikasi pemetaan program tahun berjalan serta identifikasi permasalahan cakupan layanan. Kegiatan dimulai dengan pemutakhiran data yang melibatkan program Gizi, KIA, Promkes, Imunisasi dan Kesehatan Lingkungan.

Master Ansit merupakan aplikasi yang menampung data dari berbagai OPD yang menunjang dalam upaya pengambilan keputusan terhadap penentuan lokasi prioritas dan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Padang Pariaman. PIC kegiatan ini adalah Bepelitbangda.



AKSI 2 : PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN

Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Melakukan identifikasi semua rencana kegiatan untuk tahun berjalan, tahun rencana pembiayaan APBD maupun non APBD

Identifikasi semua rencana kegiatan untuk tahun berjalan, tahun rencana pembiayaan APBD desa/kelurahan lokus prioritas, Identifikasi monitoring Rencana Kegiatan APBD Tahun Berjalan Identifikasi monitoring Rencana Kegiatan APBD tahun rencana.

Aksi 2 ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 di Hotel Rocky Padang dengan melibatkan seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting. PIC kegiatan ini adalah Bepelitbangda.



AKSI 3 : REMBUK STUNTING

Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergisme hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus. Materi utama yang akan disampaikan dalam kegiatan Rembuk Stunting adalah:

- Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan
- Komitmen Pemerintah Daerah dan OPD terkait untuk program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

Kegiatan ini merupakan wadah untuk menyampaikan hasil analisa situasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota. Aksi 3 Rembuk Stunting telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret di Hotel Rocky Padang. PIC kegiatan ini adalah Bepelitbangda



KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

AKSI 4 : PENYUSUNAN REGULASI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting terutama dalam skala desa melalui Pemerintahan Desa. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting relatif masih sangat kecil. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan ini bertujuan diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten.

Komponen kegiatan Aksi terdiri dari Menerbitkan Peraturan Bupati dan Sosialisasi peraturan Bupati yang telah diterbitkan. Kebijakan yang sudah diterbitkan pada tahun 2022 adalah :

- a. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 76/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.
- b. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 315/KEP/BPP/2022 tentang Penetapan Lokasi Fokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2023.

Aksi 4 penyusunan regulasi stunting telah dilakukan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tanggal 25 Juli 2022.





AKSI 5 : PEMBINAAN KADER KADER PEMBANGUNAN INDONESIA (KPM)

Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Manusia (KPM) Dalam Upaya Percepatan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, Hotel & Convention Padang, 02 Agustus 2022

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa. Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.

Tujuan pembinaan KPM adalah untuk memastikan mobilisasi KPM di seluruh desa di kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi: a. Penentuan tugas KPM dalam pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. b. Pengidentifikasian ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan KPM. c. Pengembangan sistem insentif berbasis peningkatan kinerja KPM. d. Pensinergian kinerja KPM dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya pencegahan dan penurunan stunting akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan program/ atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting.

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data stunting adalah untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Tujuan khusus perbaikan sistem manajemen data untuk memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi 1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kegiatan), Aksi 7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting) dan Aksi 8 (Reviu Kinerja). Pengelola program di kabupaten/kota melalui Bappeda dapat menggunakan data pencegahan dan penurunan stunting untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke provinsi dan pusat. Tujuan aksi perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun sistem manajemen data baru/khusus untuk stunting tetapi untuk memperkuat sistem-

sistem yang sudah ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi stunting gizi terintegrasi.

Penanggung Jawab Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini adalah Bappelitbangda. Sementara OPD terkait akan bertanggung jawab terhadap ketersediaan data untuk masing-masing kegiatan program



AKSI 7 : PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

Diseminasi dan Publikasi Hasil Surveilans Gizi dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 di UNP Hotel & Convention Padang

Pengukuran dan publikasi stunting adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting. Tata cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku. 7.2. Tujuan Tujuan dari pengukuran dan publikasi stunting. Tujuan dari pengukuran dan publikasi stunting adalah:

- a. Mengetahui status gizi anak sesuai umur agar kabupaten/kota dapat:
 - Memantau kemajuan tumbuh kembang anak secara berkala, Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak balita yang optimal, dan
 - Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
- b. Mengukur prevalensi stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/ kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota



RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

AKSI 8 : REVIU KINERJA STUNTING

Pelaksanaan Pertemuan AKSI 8 Reviu Kinerja Tahunan Stunting Kabupaten Padang Pariaman UNP Hotel dan Convention Center, 13 Desember 2022

Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan untuk:

- a. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian,
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, dan
- c. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya. Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap Aksi Integrasi.

Output Output dari kegiatan ini adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:

- a. Kinerja program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif),
- b. Realisasi Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, Realisasi anggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan stunting,
- c. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi,
- d. Perkembangan capaian outcome (prevalensi stunting), dan Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Adapun cakupan reviu kinerja tahunan meliputi:

- a. Pelaksanaan Aksi Integrasi kabupaten/kota
- b. Realisasi Rencana Kegiatan penurunan stunting tahunan daerah
- c. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting

Penanggung Jawab Penanggung jawab reviu kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu. Bappeda bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyiapan materi reviu. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif





15. Jumlah Kecamatan Sehat

Lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga kualitasnya sangat berperan dalam proses terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan khususnya yang tergolong penyakit menular dan penyakit infeksi maka perlu ditunjang dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Banyak permasalahan di daerah yang menjadi fokus perhatian dan urgent untuk diselesaikan pemerintah. Permasalahan ini terletak di lingkup kesehatan, lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya, seperti permasalahan perilaku, sanitasi dasar, pelayanan kesehatan dan sosial, prasarana penunjang, kesediaan pangan dan jaminan gizi, kebakaran hutan, serta pertambangan liar. Untuk mengatasi hal ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Salah satu cara adalah dengan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Kabupaten/Kota Sehat adalah salah satu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah. Program ini merupakan salah satu bagian dari dinamika semangat pemerintah daerah serta lembaga legislatif di daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya serta ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat.

Menyelenggarakan Kabupaten Sehat tidak hanya mengejar penghargaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui Kepala Daerah atas keberhasilan dalam menyelenggaraan Kabupaten Sehat. Tetapi juga tercapainya kondisi kabupaten untuk hidup sehat, bersih, nyaman, aman, serta layak sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Berikut ini adalah capaian Kabupaten/ Kecamatan Sehat Tahun 2021:

Tabel 2.18.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Kecamatan Sehat
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|------------------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Jumlah Kecamatan Sehat | 13 Kecamatan | 11 Kecamatan | 84.62 | Cukup Berhasil |

Dari tabel 2.18 dapat dilihat, bahwa capaian kecamatan sehat pada tahun 2022 adalah sebesar 11 kecamatan dengan target 13 kecamatan (84.62%). Capaian ini sama dibandingkan dengan tahun 2021, tidak ada penambahan di tahun 2022.

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 4 tatanan kabupaten/kota sehat, yaitu:

- a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
- b. Kawasan Pariwisata sehat
- c. Kehidupan Masyarakat sehat yang mandiri
- d. Ketahanan Pangan dan Gizi

Berikut ini adalah kecamatan yang sudah ikut dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat:

- a. Kecamatan Ulakan Tapakis
- b. Kecamatan 2 x 11 Kayutanam
- c. Kecamatan Enam Lingkung
- d. Kecamatan Lubuk Alung
- e. Kecamatan IV Koto Aur Malintang
- f. Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- g. Kecamatan Sungai Limau
- h. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
- i. Kecamatan Batang Anai
- j. Kecamatan Sungai Geringging
- k. Kecamatan Nan Sabaris

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat adalah:

- a. Dana yang tersedia di DIPA Pengembangan dan tatanan Kabupaten Sehat Tahun 2022. sebagian besar dana terserap untuk sewa gedung dan biaya rapat.
- b. KKS Kabupaten Padang Pariaman belum bisa mengikuti penilaian karena belum mencapai akses sanitasi (ODF) 100%.
- c. SK Forum Kabupaten Sehat terkendala dengan Anggota kepengurusan
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan karena belum rampungnya SK Forum dan SK tim Pembina Kabupaten Sehat

Dokumentasi kegiatan yang menunjang peningkatan jumlah kecamatan sehat, diantaranya:



Gambar: Forum Kabupaten Sehat

16. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja. Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 tingkatan :

- a. Keluarga Sehat : $> 0,80$
- b. Keluarga Pra-Sehat : $0,50-0,80$
- c. Keluarga Tidak Sehat : $< 0,50$

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga Mengikuti Program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).
- c. Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
- d. Bayi Mendapat ASI Eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).
- e. Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badanya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
- f. Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.
- g. Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- h. Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
- i. Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
- j. Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya

- k. Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
- l. Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tabel 2.19.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Prevalensi Stunting
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|-----------------------|------------|-----------|--------|-----------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Indeks Keluarga Sehat | 0.10 | 0.13 | 118.18 | Sangat Berhasil |

Cara perhitungannya adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja x 100%.

Berdasarkan data Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, IKS Kabupaten Padang Pariaman berada pada nilai 0.1 dengan kategori tidak sehat. Walaupun melebihi target tapi Kabupaten Padang Pariaman masih masuk kategori Keluarga tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 93.074 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di entri ke aplikasi sebanyak 81.896 KK. Dengan rincian 10.537 KK kategori sehat, 51.215 KK kategori Pra-Sehat, dan 20.144 KK tidak sehat.

Faktor penghambat tidak tercapainya target ini adalah :

- a. Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, meski demikian masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata. Situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2021 semakin memperberat kondisi ini, karena Puskesmas tidak dapat melakukan kunjungan lapangan secara optimal.
- b. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain: Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 40.87%, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 32.12%, Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 31.97%, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 49.25%, Anggota keluarga tidak ada yang merokok 39.42%, dan Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 42.40%)
- c. Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak muncul. Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah.
- d. Standar penilaian suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sehat sangat ketat karena melibatkan penilaian terhadap seluruh anggota keluarga. Apabila ada satu orang anggota

keluarga yang tidak memenuhi kriteria indikator, maka penilaian seluruh anggota keluarga menjadi tidak memenuhi dan IKS keluarga menjadi tidak sehat.

Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah :

- a. Meningkatkan cakupan *total coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- b. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- c. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor
- d. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- f. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- g. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Adapun data Cakupan IKS Perwilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20
Cakupan IKS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| No | Nama Puskesmas | IKS | Tingkatan Keluarga Sehat |
|----|-------------------|------|--------------------------|
| 1 | Ampalu | 0,06 | Keluarga Tidak Sehat |
| 2 | Sungai Sarik | 0,10 | Keluarga Tidak Sehat |
| 3 | Anduring | 0,25 | Keluarga Tidak Sehat |
| 4 | Kayu Tanam | 0,12 | Keluarga Tidak Sehat |
| 5 | Batu Basa | 0,08 | Keluarga Tidak Sehat |
| 6 | Enam Lingkung | 0,11 | Keluarga Tidak Sehat |
| 7 | Gasam Gadang | 0,45 | Keluarga Tidak Sehat |
| 8 | Kampung Dalam | 0,10 | Keluarga Tidak Sehat |
| 9 | Sikucur | 0,06 | Keluarga Tidak Sehat |
| 10 | Ketaping | 0,13 | Keluarga Tidak Sehat |
| 11 | Pasar Usang | 0,23 | Keluarga Tidak Sehat |
| 12 | Koto Bangko | 0,08 | Keluarga Tidak Sehat |
| 13 | Sungai Geringging | 0,09 | Keluarga Tidak Sehat |
| 14 | Limau Purut | 0,14 | Keluarga Tidak Sehat |
| 15 | Padang Alai | 0,09 | Keluarga Tidak Sehat |
| 16 | Lubuk Alung | 0,06 | Keluarga Tidak Sehat |
| 17 | Sikabu | 0,13 | Keluarga Tidak Sehat |
| 18 | Padang Sago | 0,08 | Keluarga Tidak Sehat |
| 19 | Patamuan | 0,08 | Keluarga Tidak Sehat |
| 20 | Pauh Kamar | 0,11 | Keluarga Tidak Sehat |
| 21 | Sicincin | 0,15 | Keluarga Tidak Sehat |
| 22 | Kampung Guci | 0,22 | Keluarga Tidak Sehat |

| No | Nama Puskesmas | IKS | Tingkatan Keluarga Sehat |
|----|----------------|------|--------------------------|
| 23 | Sungai Limau | 0,12 | Keluarga Tidak Sehat |
| 24 | Sintuk | 0,08 | Keluarga Tidak Sehat |
| 25 | Ulakan | 0,10 | Keluarga Tidak Sehat |

Kegiatan penunjang Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Padang Pariaman adalah:



Gambar: Monev PIS-PK



Gambar: Monev PIS-PK

II. Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kes) merupakan faktor penting dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena itu, pengembangan SDM Kes merupakan faktor kunci dalam pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's) dan peningkatan status kesehatan masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Standar ketenagaan adalah:

- Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
- Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan tempat praktik bidan desa.
- Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

Menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, ada beberapa standar ketenagaan di Puskesmas:

Tabel 2.21

Standar Ketenagaan Puskesmas

| No | Jenis Tenaga | Puskesmas kawasan Perkotaan | Puskesmas kawasan Perdesaan | | Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|--|------------|
| | | Non Rawat Inap | Non Rawat Inap | Rawat Inap | Non Rawat Inap | Rawat Inap |
| Tenaga Kesehatan | | | | | | |
| 1 | Dokter dan/ atau dokter layanan primer | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Dokter gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Perawat | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 4 | Bidan | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Tenaga Sanitasi Lingkungan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Nutrisionis | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ahli teknologi laboratorium medik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tenaga Non Kesehatan | | | | | | |
| 10 | Tenaga sistem informasi kesehatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Tenaga administrasi keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tenaga ketatausahaan | 1 | | | | |
| 13 | Pekarya | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | | 23 | 20 | 28 | 20 | 28 |

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar:

Tabel 2.22.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Puskesmas dengan Tenaga Sesuai Standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|---|------------|-----------|--------|-----------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar | 47 | 80 | 170.21 | Sangat Berhasil |

Dari tabel 2.22 dapat dilihat bahwa capaian puskesmas dengan tenaga sesuai standar sangat berhasil yaitu 47% dengan target 80% (170.21%). Berikut rekapan jumlah Puskesmas dengan tenaga sesuai standar:

Tabel 2.23.
Data Puskesmas dengan Jumlah Tenaga Sesuai Standar
di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| No. | Nama Fasyankes | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Kemas | Kesling | Farmasi | Gizi | ATLM | Status |
|-----|----------------|--------|-------------|---------|-------|-------|---------|---------|------|------|----------------|
| 1 | Ampalu | 2 | 0 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tidak memenuhi |
| 2 | Anduring | 1 | 1 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Memenuhi |
| 3 | Batu Basa | 1 | 0 | 11 | 41 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Tidak memenuhi |
| 4 | Enam Lingkung | 2 | 2 | 7 | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Memenuhi |
| 5 | Gasam Gadang | 1 | 0 | 17 | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Tidak memenuhi |
| 6 | Kampung Dalam | 3 | 2 | 17 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | Memenuhi |
| 7 | Kampung Guci | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 8 | Kayu Tanam | 8 | 1 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Memenuhi |
| 9 | Ketaping | 1 | 1 | 11 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | Memenuhi |
| 10 | Koto Bangko | 1 | 1 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Memenuhi |
| 11 | Limau Purut | 0 | 1 | 9 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tidak memenuhi |
| 12 | Lubuk Alung | 3 | 1 | 25 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | Memenuhi |
| 13 | Padang Alai | 1 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Memenuhi |
| 14 | Padang Sago | 1 | 1 | 9 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Memenuhi |
| 15 | Pasar Usang | 4 | 2 | 9 | 39 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 16 | Patamuan | 1 | 1 | 7 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 17 | Pauh Kambar | 2 | 1 | 15 | 48 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 18 | Sicincin | 3 | 1 | 11 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Memenuhi |
| 19 | Sikabu | 1 | 2 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 20 | Sikucur | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Memenuhi |
| 21 | Sintuk | 2 | 2 | 13 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Memenuhi |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----------------|
| 22 | Sungai Geringging | 1 | 1 | 19 | 33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | Memenuhi |
| 23 | Sungai Limau | 2 | 1 | 15 | 44 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | Memenuhi |
| 24 | Sungai Sarik | 2 | 1 | 10 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Memenuhi |
| 25 | Ulakan | 2 | 2 | 10 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | Tidak memenuhi |
| TOTAL | | 47 | 29 | 286 | 703 | 61 | 42 | 35 | 45 | 46 | |

Dari tabel 2.23 dapat dilihat bahwa, dari 25 Puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, hanya 20 Puskesmas yang memenuhi tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2022. Capaian ini lebih tinggi di bandingkan tahun 2021 yaitu hanya 80 %.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman diantaranya

a. Mengusulkan Permintaan Tenaga Nusantara Sehat

Untuk dapat terpenuhinya permintaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan Desk Permintaan Tenaga Nusantara Sehat di Hotel Beston Palembang pada tanggal 11 Februari 2021, setelah dilakukan Desk, usulan 21 Puskesmas disetujui tenaga Nusantara Sehat sebanyak 74 Tenaga.



Gambar: Desk Permintaan Tenaga Nusantara Sehat di Hotel Beston Palembang

b. Penerimaan Tenaga Nusantara Sehat

Tenaga NSI Periode VII tahun 2021 yang di tempatkan di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah sebanyak 12 orang. Mereka akan di tugaskan di delapan Puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Puskesmas Anduriang, Enam Lingkung, Kampung Guci, Kayu Tanam, Ketaping, Lubuk Alung, Pauh Kamar, dan Puskesmas Sikabu Lubuk Alung



Gambar: Pelepasan Tenaga Nusantara Sehat ke Puskesmas di Kab Padang Pariaman

c. Perekrutan Tenaga Swakelola



Gambar: Perekrutan Tenaga Harian Lpas

III. Sasaran Meningkatkan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, oleh karena

itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut.

Berikut ini adalah capaian sasaran meningkatkan kualitas sediaan farmasi. Alat kesehatan, makanan dan minuman untuk indikator kinerja jumlah IRT-P yang diawasi adalah:

Tabel 2.24.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator IRT-P yang Diawasi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|---------------------------|------------|-----------|-----|--------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Jumlah IRT-P yang diawasi | 135 | 135 | 100 | Berhasil |

Pada tabel 3.15, capaian indikator kinerja jumlah IRT-P yang diawasi adalah 135 IRT-P dengan target 135 IRT-P (100%). Artinya untuk IRT-P yang diawasi di Kabupaten Padang Pariaman berhasil. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 80.77%

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan IRT-P adalah:

- a. Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)



- b. Sampling dan pengujian Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)



c.



d. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)



Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, bahwa hasil penilaian didasarkan atas hasil pemeriksaan keempat belas elemen yang tercantum pada formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dengan memperhatikan jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan. Dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) diterbitkan oleh Bupati c.q Dinas Kesehatan Kabupaten apabila **IRTP masuk level I-II.**

Dari 135 IRT-P yang di awasi, terdapat 107 IRT-P yang Level IV, 21 IRT-P yang di Level III, 6 IRT-P yang berada di level II, dan 1 IRT-P yang pindah produksi lebih kurang 5 tahun yang lalu. Artinya dari 135 IRT-P yang di awasi seharusnya hanya ada 6 IRT-P yang berada di level II yang bisa diterbitkan SPP-IRT, akan tetapi kendala yang di hadapi adalah pemilik IRT-P sudah mendaftarkan dan mendapatkan terlebih dulu surat izin dari OSS. Menghadapi hal yang demikian, Dinas Kesehatan

melakukan pembinaan secara rutin kepada 135 IRT-P tersebut agar bisa meningkatkan lever menjadi level I atau level II.

IV. Sasaran Meningkatkan Budaya Hidup Sehat

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Meningkatkan Budaya Hidup Sehat

Derajat kesehatan masyarakat yang masih belum optimal tersebut di atas pada hakikatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan genetika. Kalangan ilmuwan umumnya berpendapat bahwa determinan utama dari derajat kesehatan masyarakat tersebut, selain kondisi lingkungan, adalah perilaku masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

PHBS di Rumah Tangga , sasaran primer harus mempraktekkan perilaku yang dapat menciptakan Rumah yang ber-PHBS, yang mencakup persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.

Cakupan peningkatan rumah tangga ber-PHBS dengan menggunakan formulasi pengukuran jumlah rumah tangga sehat dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100% , berdasarkan Permenkes No 2269/menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Tabel 2.25.
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Rumah Tangga PHBS
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

| Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Interpretasi |
|-------------------|------------|-----------|-----|--------------|
| | Target | Realisasi | % | |
| Rumah Tangga PHBS | 74% | 74 % | 100 | Berhasil |

Dari tabel 2.25 dapat dilihat bahwa capaian rumah tangga PHBS sebesar 74% dengan target 74% (100%) dengan kategori “**Berhasil**”. Berikut ini adalah data rumah tangga PHBS di Kabupaten Padang Pariaman

Berikut adalah kegiatan UKBM & Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022, adalah:

a. Posyandu



b. Desa Siaga Aktif



c. Pembinaan Kader Posyandu sebagai Kader posyandu aktif



d. Pembinaan Puskesmas Mampu Promosi Kesehatan



e. Pembinaan posbindu PTM



f. Pos Kesehatan Nagari (POSKESRI)



g. Saka Bakti Husada (SBH)



h. Pelaksanaan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

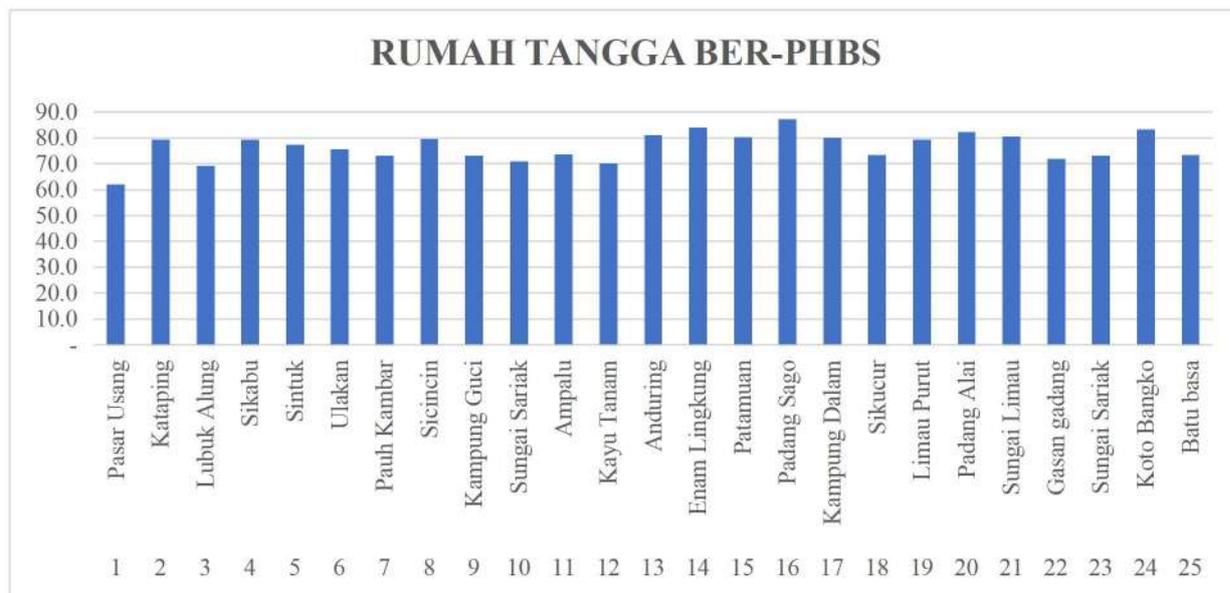




**DATA PHBS RUMAH TANGGA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022**

| No | Puskesmas | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Yg Dipantau | Rumah Tangga Ber-Phbs | Capaian (%) |
|----|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Pasar Usang | 8.352 | 8.352 | 5.176 | 62,0 |
| 2 | Kataping | 2.873 | 2.873 | 2.281 | 79,4 |
| 3 | Lubuk Alung | 6.806 | 6.806 | 4.701 | 69,1 |
| 4 | Sikabu | 1.789 | 1.789 | 1420 | 79,4 |
| 5 | Sintuk | 3.691 | 3.691 | 2.856 | 77,4 |
| 6 | Ulakan | 4.002 | 4.002 | 3.021 | 75,5 |
| 7 | Pauh Kamar | 5.996 | 5.996 | 4.381 | 73,1 |
| 8 | Sicincin | 3.321 | 3.321 | 2.645 | 79,6 |
| 9 | Kampung Guci | 1.957 | 1.957 | 1433 | 73,2 |
| 10 | Sungai Sariak | 5.760 | 5.760 | 4.078 | 70,8 |
| 11 | Ampalu | 3.094 | 3.094 | 2278 | 73,6 |
| 12 | Kayu Tanam | 2.754 | 2.754 | 1.929 | 70,0 |
| 13 | Anduring | 1.760 | 1.760 | 1424 | 80,9 |
| 14 | Enam Lingkung | 4.764 | 4.764 | 4.001 | 84,0 |
| 15 | Patamuan | 3.584 | 3.584 | 2.880 | 80,4 |
| 16 | Padang Sago | 1.948 | 1.948 | 1700 | 87,3 |
| 17 | Kampung Dalam | 3.757 | 3.757 | 3.011 | 80,1 |
| 18 | Sikucur | 2.421 | 2.421 | 1778 | 73,4 |
| 19 | Limau Purut | 1.968 | 1.968 | 1.562 | 79,4 |
| 20 | Padang Alai | 1.459 | 1.459 | 1202 | 82,4 |
| 21 | Sungai Limau | 6.216 | 6.216 | 5.012 | 80,6 |
| 22 | Gasam gadang | 2.451 | 2.451 | 1.760 | 71,8 |
| 23 | Sungai Sariak | 3.010 | 3.010 | 2.202 | 73,2 |
| 24 | Koto Bangko | 3.683 | 3.683 | 3066 | 83,2 |
| 25 | Batu basa | 4.368 | 4.368 | 3.203 | 73,3 |

| No | Puskesmas | Jumlah Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Yg Dipantau | Rumah Tangga Ber-Phbs | Capaian (%) |
|----|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| | KABUPATEN | 91.784 | 91.784 | 69.000 | 74 |

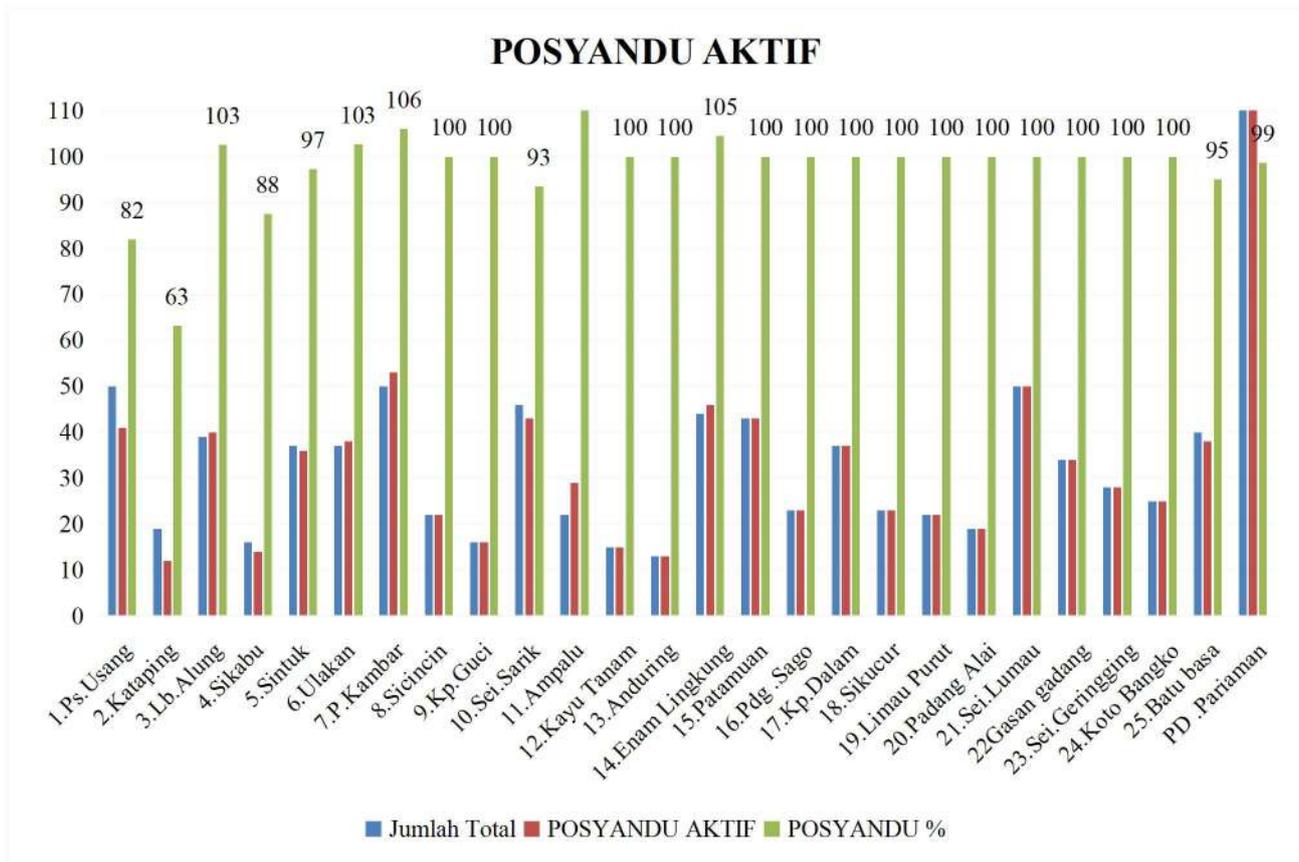


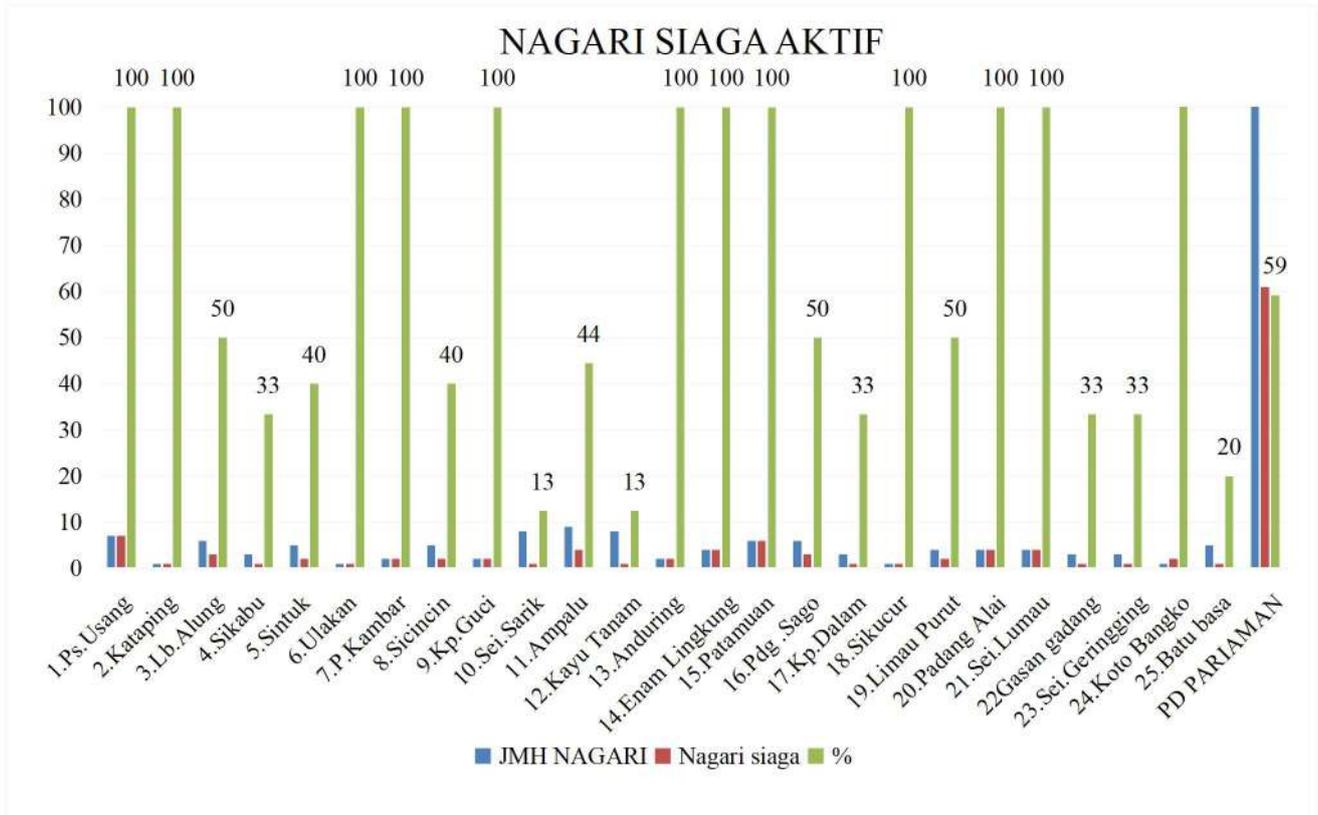
Tabel 2.26.

Puskesmas Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tahun 2022

| No. | Puskesmas | Melaksanakan | Tidak Melaksanakan |
|-----|---------------|--------------|--------------------|
| 1 | Pasar Usang | Ya | |
| 2 | Ketaping | Ya | |
| 3 | Lubuk Alung | Ya | |
| 4 | Sikabu | Ya | |
| 5 | Sintuk | Ya | |
| 6 | Ulakan | | Tidak |
| 7 | Pauh Kambar | Ya | |
| 8 | Sicincin | Ya | |
| 9 | Kampung Guci | Ya | |
| 10 | Sungai Sariak | Ya | |
| 11 | Ampalu | Ya | |
| 12 | Kayu Tanam | | Tidak |
| 13 | Anduring | Ya | |
| 14 | Enam Lingkung | Ya | |
| 15 | Patamuan | Ya | |

| No. | Puskesmas | Melaksanakan | Tidak Melaksanakan |
|-----|-------------------|--------------|--------------------|
| 16 | Padang Sago | Ya | |
| 17 | Kampung Dalam | Ya | |
| 18 | Padang Alai | Ya | |
| 19 | Limau Purut | | Tidak |
| 20 | Sungai Limau | Ya | |
| 21 | Gasam gadang | Ya | |
| 22 | Sungai Geringging | Ya | |
| 23 | Koto Bangko | | Tidak |
| 24 | Batu Basa | Ya | |
| 25 | Sikucur | Ya | |





Walaupun sudah mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. Tetapi Permasalahan dan solusi yang di hadapi Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan rumah tangga PHBS adalah:

1. Koordinasi antara pengelola Promosi Kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait belum berjalan maksimal. Sedangkan untuk memobilisasi potensi kegiatan promosi kesehatan yang ada di lintas program masih banyak kendala.
2. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan swasta belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya promosi kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat untuk mampu ber PHBS.
3. Pengorganisasian promosi kesehatan di Kabupaten masih perlu diperhatikan keberadaannya, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya pemberdayaan promkes masih rendah. Jumlah kualitas dan kuantitas petugas promosi kesehatan di Puskesmas belum sesuai dengan standart yang ada.
4. Pemberdayaan potensi masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan belum optimal. Kemudaian masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan belum berkembang.
5. Kebijakan yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan belum mantap dan inplementasinya dilapangan belum konsisten, sehingga pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan & Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat belum berjalan maksimal.
6. Anggaran untuk promosi kesehatan masih terbatas, baik untuk pengadaan media penyuluhan seperti media cetak, elektronik, pameran dan lain-lain.

7. Belum adanya jejaring atau tim advokasi yang kuat, sehingga dukungan dari stakeholder terhadap Promosi Kesehatan belum maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Perlu komitmen yang kuat antara lintas program sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Perlu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan swasta. Kemitraan yang telah dibangun bisa menampilkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya promosi kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat untuk mampu ber PHBS.
3. Adanya perhatian yang serius terhadap Pengorganisasian promosi kesehatan di Puskesmas, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya pemberdayaan promkes. Jumlah kualitas dan kuantitas petugas promosi kesehatan di Puskesmas harus sesuai dengan standart yang ada
4. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan.
5. Masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan tentang kesehatan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan.
6. Mengoptimalkan UKBM. Memantapkan kebijakan yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan implementasinya dilapangan harus konsisten
7. Perlu upaya yang kontiniu dan berkelanjutan dalam melakukan kampanye untuk membangun opini masyarakat tentang pentingnya PHBS. Disamping itu ketersediaan berbagai media promosi baik dalam bentuk media cetak, elektronik, luar ruang, pameran serta berbagai jenis media lainnya harus sesuai dengan kebutuhan
8. Agar membentuk jejaring atau tim advokasi yang kuat, baik tingkat Kabupaten & Puskesmas.

1) Capaian dan Evaluasi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2022

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renstra Tahun 2021 bertujuan untuk memantau, mengidentifikasi dan menilai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mencakup :

1. Komitmen Kepala Dinas Kesehatan mendukung implementasi Rencana Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2022
2. Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022
3. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi termasuk upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya
4. Mengukur tingkat keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah disusun dan dilaksanakan.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022
(Renstra 2016-2021)

| NO | Indikator | Target 2022 | Capaian | Gap | Akar Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|--|-------------|---------|---------|--|--|---|
| | CAPAIAN KINERJA KESEHATAN | | | | | | |
| 1 | Angka kelangsungan hidup bayi | 92,6 | 88,05 | (4,55) | | | |
| 2 | Angka usia harapan hidup | 68,99 | 69,34 | 0,51% | | | |
| 3 | Persentase gizi buruk dan Gizi kurang | 7 | 3,97 | (3,03) | | Terpantaunya kesehatan bayi dan balita melalui di Posyandu melalui aplikasi E-PPGBM | |
| 4 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 0% | | Tata Laksana Gizi buruk terlaksana dengan baik sesuao dengan SOP dan didukung oleh anggaran untuk pembelian makanan tambahan | |
| | KESEHATAN | | | | | | |
| 1 | Rasio posyandu per satuan balita x 1000 | 25,66 | 19,9 | (5.76%) | Tidak ada penambahan Posyandu di wilayah kerja Puskesmas, sementara setiap tahun sasaran Balita bertambah | | Tidak ada anggaran untuk honor Kader Posyandu jika Posyandu ditambah di wilayah kerja Puskesmas |
| 2 | Rasio puskesmas per satuan penduduk x 1000 | 0,06 | 0,06 | 0% | | Setiap kecamatan sudah mempunyai satu Puskesmas dan bahkan ada satu kecamatan memiliki dua Puskesmas | |
| 3 | Rasio pustu per satuan penduduk x 1000 | 0,20 | 0,20 | 0% | | Pustu ada disetiap wilayah kerja Puskesmas yang akses ke Puskesmasnya jauh | |
| 4 | Rasio polindes/poskesri per satuan penduduk x 1000 | 0,23 | 0,22 | 0% | | Polindes / Poskesri ada disetiap korong di wilayah kerja Puskesmas | |
| 5 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk x 1000 | 0,002 | 0,002 | 0% | | Padang Pariaman sudah mempunyai satu Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C yaitu RSUD Padang Pariaman | |
| 6 | Rasio dokter per satuan penduduk x 1000 | 0,132 | 0,083 | (0.49%) | Jumlah tenaga dokter masih kurang di Puskesmas dan tidak sesuai dengan syarat tenaga minimal sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas | | Terbatasnya jumlah tenaga dokter dengan sebaran yang tidak merata di masing-masing puskesmas |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|----------|--|--|---|
| 7 | Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk x 1000 | 1,26 | 1,68 | 0.42% | | Untuk 9 jenis tenaga secara keseluruhan sudah melebihi kebutuhan | |
| 8 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) | 100 | 102 | 2% | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Kurangnya Kompetensi Petugas dalam melakukan pelayanan |
| | | | | | Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam melakukan pelayanan | | |
| 9 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) | 100 | 80,83 | (19,17%) | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |
| 10 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 83 | 63,2 | (19,8%) | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |
| 11 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 0 | | Tata Laksana Gizi buruk terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP dan didukung oleh anggaran untuk pembelian makanan tambahan | |
| 12 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif | 100 | 100 | 0 | | | |
| 13 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100% | | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |
| 14 | Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui pengembangan jamkesmas dan jamkesda | 79 | 75,04 | (3,96) | Keterbatasan Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk | | Terbatasnya anggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi masyarakat |
| 15 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 95,00 | 95 | 0% | | Aktifnya PSC 119 dalam melakukan pelayanan ke gawatdaruratan | |
| 16 | Cakupan kunjungan bayi (%) | 100 | 82,1 | (17,9%) | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |
| 17 | Cakupan puskesmas (%) | 148,24 | 143,53 | (3,53%) | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |
| 18 | Cakupan pembantu puskesmas (%) | 41,00 | 39,08 | (1,92%) | Pembatasan Kegiatan karena Pandemi Covid 19 | | Petugas tidak bisa melakukan pemantauan secara maksimal karena Pandemi Covid 19 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|-------|----------|--|--|
| 19 | Persentase rumah tangga bersanitasi layak | 100 | 67,87 | (32,13%) | | Dengan adanya Lokus STBM dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, puskesmas mampu memicu masyarakat agar mempunyai sanitasi yang layak |
|----|---|-----|-------|----------|--|--|

Jika dilihat dari tabel 2.27, maka dari 19 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 ada 8 indikator yang sudah mencapai target dan 11 indikator belum mencapai target.

Berdasarkan hasil temuan terhadap ketidakberhasilan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Renstra Tahun 2016-2021, maka diperlukan rekomendasi yaitu :

1. Meningkatkan capaian SPM bidang Kesehatan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan
3. Meningkatkan kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman
4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit
5. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan budaya hidup sehat

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022
(Renstra 2021-2026)

| NO | Indikator | Target 2022 | Capaian | Gap | Akar Masalah | Faktor Pendukung | Faktor Penghambat |
|----|--------------------------------------|-------------|---------|---------|---|------------------|--|
| 1 | Angka usia harapan hidup | 68,99 | 69,34 | 0,35 | 1. Masih tingginya angka kematian ibu , bayi dan balita. | | Kehamilan dengan faktor resiko tinggi kurang terdeteksi dari awal kehamilan karena kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | | | | 2. Kurangnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular | | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan |
| | | | | | 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Sehat | | Pola hidup masyarakat dan pola makan masyarakat kurang sehat |
| | | | | | 4. Tingkat ekonomi masyarakat masih rendah | | Sosial ekonomi masyarakat masih rendah |
| 2 | Persentase Masyarakat Yang Mempunyai | 85 | 75,04 | (9,96%) | 1. Keterbatasan Alokasi Anggaran | | Terbatasnya anggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi |

| | Jaminan Kesehatan | | | | | | masyarakat |
|----|--|---------|----------|----------|---|--|---|
| 3 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup | 47 | 43 Orang | 4 Orang | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 4 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Jumlah Kelahiran Hidup) | 92,6 | 88,05 | 4,55 | Komplikasi kehamilan dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) | | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan |
| 5 | Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup | 4 | 9 Orang | 5 orang | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 6 | Angka Kematian neonatal per 1000 Kelahiran Hidup | 15 | 30 Orang | 15 Orang | Tidak terdeteksinya kehamilan dengan komplikasi pada awal kehamilan | | Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada masa kehamilan |
| 7 | Angka Kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup | 7 orang | 3 Orang | 4 orang | 1. Kualitas pelayanan masih rendah | | 1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan |
| | | | | | 2. Sistem rujukan yang masih belum maksimal | | 2. Masyarakat masih banyak yang tidak mau di rujuk ke Faskes Tingkat Lanjut dengan alasan prosedur yang lama dan berbelit-belit |
| | | | | | 3. Jaminan Kesehatan nasional yang masih belum maksimal | | 3. Belum semua masyarakat mempunyai kartu Jaminan Kesehatan |
| 8 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar | 47% | 47% | 0% | Kurangnya jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas | | Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata |
| 9 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani | 100% | 100% | 0% | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 10 | Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | 100% | 80,83% | (19,17%) | Kurangnya jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas | | Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata |
| 11 | Cakupan Desa/Keluarahn Universal Child Immunization (UCI) | 83% | 63,2% | (19,8%) | | | Masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi |
| 12 | Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapatkan perawatan | 100% | 100% | 0 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--------|---------|--|--|---|
| 13 | Prevalensi Balita Stunting | 18,4% | 10,10% | (8,3%) | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 14 | Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan | 100% | 99,52% | (0,48%) | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 15 | Persentase Balita Kurus Yang mendapatkan PMT | 100% | 96,9% | (3,1%) | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 16 | Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) | 83% | 82% | (1%) | | | Masih banyak orang tua yang tidak mau anaknya diimunisasi |
| 17 | Non Folio AFP Rate per 100.000 penduduk | 4 | 5 | 1 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 18 | Cakupan balita Pneumonia yang ditangani | 100% | 100% | 0 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 19 | Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB | 90% | 62,4% | (27,6%) | | | |
| 20 | Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk | 324 | 206 | (118) | | | |
| 21 | Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 9 | 7 | 2 | | | |
| 22 | Persentase Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai Standar | 100% | 83% | (17%) | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 23 | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (Succes rate) | 90% | 87,4 | (2,6%) | | | |
| 24 | Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden rate) | <42 per 100.000 pddk | 14,64 | (27,36) | | | |
| 25 | Persentase tatalaksana Diare sesuai standar | 60% | 100% | 40% | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 26 | Penemuan kasus Malaria | < 1 | 0 | 0 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | |
| 27 | Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skreening kesehatan sesuai standar | 100% | 83,6 | (16,4%) | | | |
| 28 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan | 100% | 82,5% | (17,5%) | | | |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|--|
| | skreening kesehatan sesuai standar | | | | |
| 29 | Insiden HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | 0,18 | 0,05 | (0,13) | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 30 | Persentase penderita Hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 73,6% | (26,4%) | |
| 31 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 92,6% | (7,4%) | |
| 32 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 99,0% | (1%) | |
| 33 | Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | 100% | 87,4% | (12,6%) | |
| 34 | Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas | 100% | 100% | 0 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 35 | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | 100% | 80,5% | (19,5%) | |
| 36 | Cakupan Pelayanan Kunjungan Nifas Lengkap (KF3) | 100% | 82,87% | (17,13%) | |
| 37 | Cakupan neonatus dengan Komplikasi yang ditangani | 100% | 100% | 0 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 38 | Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar | 100% | 77,2% | (22,8%) | |
| 39 | Cakupan Balita yang mendapatkan PMT | 100% | 100% | 0 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 40 | Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% | 100% | 0 | |
| 41 | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ter akreditasi | 100% | 100% | 0 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|--|--|
| 42 | Jumlah puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas | 25 | 25 | 0 | | |
| 43 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam | 100% | 100% | 0 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 44 | Persentase korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan | 40% | 25,71% | (14,29%) | | |
| 45 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial | 100% | 100% | 0 | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 46 | Persentase Alkes yang sesuai standar permenkes | 68% | 64,57 | (3,43%) | | |
| 47 | Jumlah Kecamatan Sehat | 13 | 11 | (2) | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 48 | Indeks Keluarga Sehat | 0,10 | 0,13 | 0,03 | | |
| 49 | Persentase Rumah tangga PHBS | 74% | 74% | 0% | | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan |
| 50 | Jumlah IRTP yang diawasi | 135 | 135 | (0%) | | |

3) Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

Tabel 2.29
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

| No | Indikator SPM | Sasaran | Target (%) | ABS | Capaian kinerja % |
|----|---|---------|------------|---------|-------------------|
| 1. | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Hamil | 8.220 | 100% | 6.619 | 80,5 |
| 2. | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin | 7.847 | 100% | 6.299 | 80,3 |
| 3. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 7.473 | 100% | 6.534 | 87,4 |
| 4. | Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai Standar | 36.722 | 100% | 28.340 | 77,2 |
| 5. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 76.631 | 100% | 76.631 | 100 |
| 6. | Persentase orang usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar | 245.753 | 100% | 205.753 | 83,6 |
| 7. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 79.531 | 100% | 65.643 | 82,5 |
| 8. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 66.611 | 100% | 49.004 | 73,6 |
| 9. | Persentase penderita Diabetes Melitus | 5.147 | 100% | 4.768 | 92,6 |

| | | | | | |
|-----|---|--------|------|--------|------|
| | yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | | | | |
| 10. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 890 | 100% | 881 | 99,0 |
| 11. | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 14.030 | 100% | 11.634 | 83 |
| 12. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 9.936 | 100% | 9.936 | 100 |

Dari 12 indikator diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.
Dari hasil capaian SPM dapat dilihat bahwa capaian ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil masih dibawah target SPM yaitu sebesar 80,5 % dari target 100%.
2. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 80,3 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan baru lahir
Bayi baru lahir ang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah sebesar 87,4% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.
4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Persentase pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah sebesar 77,2 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Hasil capaian anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 100% dari target 100% yang ditetapkan.
6. Persentase orang usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 83,6 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 82,5 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 73,6 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
9. Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 92,6 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 99,0 % dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
11. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 83% dari target 100% yang telah ditetapkan di dalam SPM.
12. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Sasaran kinerja diatas terealisasi : 100 % dari target 100 % yang telah ditetapkan di dalam SPM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pasal 28 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang *Kesehatan Masyarakat meliputi Usaha Preventif, Kuratif, Promotif, Rehabilitatif, dan melaksanakan ketata usahaan dinas secara horizontal dan vertikal.*

Berdasarkan Perda No. 50 Tahun 2016, struktur organisasi dan pejabat dari Dinas Kesehatan pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang Tekhnis Program Kesehatan yaitu Bidang Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Kesehatan Keluarga dan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

❖ Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- b. Perumusan kebijakan umum bidang kesehatan;
- c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- h. Koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
- i. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Sekretaris

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada dinas diluar pengadaan bangunan;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi

- kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, informasi dan hubungan masyarakat pada Dinas;
 - g. Koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
 - h. Pengelolaan urusan ASN;
 - i. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
 - j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/ atau
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dibagi atas 3 Subbagian :

1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
 2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
 3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
- ❖ Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dinas;
 - b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dinas;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi program, informasi dan hubungan masyarakat kesehatan dan pelaporan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan/ ataupun pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
- Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dan asset Dinas;
 - b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dan asset Dinas;

- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset Dinas;
- e. Pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Luar Negeri); dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum**

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan (Perda, Perbup);
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- g. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- i. Penyiapan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. Pelaksanaan administrasi, kearsipan dan perpustakaan; dan/ atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dibagi atas 3 Seksi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

❖ **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;
- e. Pembinaan kelompok lanjut usia;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi promosi dan pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pecegahan dan Pegendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibagi atas 3 Seksi :

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular

❖ Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi surveilans dan imunisasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi surveilans dan imunisasi;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi surveilans dan imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB);
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi surveilans dan imunisasi;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi surveilans dan imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB); dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. Penyelenggaraan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan primer;
- d. Memberikan rekomendasi registrasi puskesmas baru;
- e. Fasilitasi dan pembinaan proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan tradisional mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Memberikan rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional (UKOT);
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, bidang sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT

- serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Memberikan rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT;
 - f. Menyelenggarakan pengawasan industri rumah tangga (PIRT); dan/ atau
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Seksi Kefarmasian
- Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.
- Untuk menyelenggarakan tugas, seksi kefarmasian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kefarmasian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kefarmasian;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kefarmasian;
 - d. Memberikan rekomendasi izin rumah obat, apotik;
 - e. Melaksanakan pengawasan obat dan makanan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kefarmasian;
 - h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian; dan/ atau
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
- Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan PKRT.
- Untuk menyelenggarakan tugas, seksi alat kesehatan dan PKRT mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi alat kesehatan dan PKRT;
 - d. memberikan rekomendasi izin penyalur alat kesehatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data alat kesehatan dan PKRT;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi sumber daya manusia kesehatan;
- d. memberikan rekomendasi rumah sakit pendidikan;
- e. melaksanakan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan; dan atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.

UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.30
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

| No | Golongan | Jumlah Pegawai |
|----|----------------|----------------|
| 1 | Golongan IV d | 0 |
| 2 | Golongan IV c | 5 |
| 3 | Golongan IV b | 26 |
| 4 | Golongan IV a | 44 |
| 5 | Golongan III d | 165 |
| 6 | Golongan III c | 125 |
| 7 | Golongan III b | 129 |

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| 8 | Golongan III a | 82 |
| 9 | Golongan II d | 221 |
| 10 | Golongan II c | 138 |
| 11 | Golongan II b | 8 |
| 12 | Golongan II a | 3 |
| 13 | Golongan I d | 3 |
| 14 | Golongan I c | 3 |
| 15 | Golongan I b | 2 |
| 16 | Golongan I a | 1 |
| Jumlah | | 954 |

Tabel 2.31
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering:

| No. | Eselon | Jumlah (orang) |
|--------------|---------------|-----------------------|
| 1 | II/b | 1 |
| 2 | III/a | 1 |
| 3 | III/b | 4 |
| 4 | IV/a | 4 |
| 5 | IV/b | 2 |
| Total | | 12 |

Tabel 2.32
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

| No | Jenis Pendidikan | |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| | Uraian | Jumlah |
| 1 | S2 (Magister) | |
| | - S2 Kesehatan Masyarakat | 8 |
| | - S2 Keperawatan | 0 |
| | - S2 Mars | 2 |
| | - S2 Kebidanan | 1 |
| | - S2 Non Kesehatan | 2 |
| | Jumlah S2 (Magister) | 11 |
| 2 | S1 (Sarjana) | |
| | - Dokter Umum | 27 |
| | - Dokter Gigi | 25 |
| | - Apoteker | 5 |
| | - Sarjana Kesehatan Masyarakat | 68 |
| | - Sarjana Keperawatan | 65 |
| | - Sarjana Keperawatan Gigi | 0 |
| | - Sarjana Gizi | 8 |
| | - Sarjana Non Kesehatan | 4 |
| | Jumlah S1 (Sarjana) | 202 |
| 3 | Diploma IV | |
| | - Diploma IV Kebidanan | 85 |
| | - Diploma IV Analis | 6 |
| | - Diploma Keperawatan Gigi | 1 |
| | - Diploma IV Kesling | 3 |
| | Jumlah Diploma IV | 72 |
| 3 | Diploma III | |
| | - D3 – Kebidanan | 343 |

| No | Jenis Pendidikan | |
|----|--|------------|
| | Uraian | Jumlah |
| | - D3 – Keperawatan | 128 |
| | - D3 – Keperawatan gigi | 22 |
| | - D3 – Kesehatan Lingkungan | 17 |
| | - D3 – Analisis Kesehatan | 38 |
| | - D3 – Gizi | 12 |
| | - D3 – Tekniker Gigi | 1 |
| | - D3 – Farmasi | 21 |
| | - D3 – Rekam Medik | 3 |
| | - RO | 6 |
| | - Non Kesehatan | 1 |
| | Jumlah Diploma III | 592 |
| 4 | Diploma I/SLTA/Sederajat | |
| | - SPB | 15 |
| | - SPB (Gol. II.a) | 0 |
| | - SPPH | 0 |
| | - SPAG | 0 |
| | - SPK | 9 |
| | - SPK (Gol II.a) | 0 |
| | - SMF | 4 |
| | - SPRG | 0 |
| | - SLTA Lain | 17 |
| | Jumlah Diploma I/SLTA/Sederajat | 45 |
| | Jumlah SLTP | 4 |
| | Jumlah SD | 3 |
| | Jumlah | 954 |

Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan signifikannya pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kinerja sumber daya manusia, namun secara paralel, tingkat pendidikan yang didukung dengan pengalaman kerja yang tinggi pada suatu instansi, akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan kreatifitas kerjanya.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran kesatu, digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dimana dijelaskan komposisi pejabat eselonering di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan menghadapi permasalahan dan hambatan.

Tabel 2.33
Permasalahan dan Hambatan Dinas Kesehatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|---|
| 1 | Belum meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Masih adanya kematian ibu melahirkan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebanyak 9 orang. | 1 Adanya kematian ibu disebabkan oleh Pendarahan, gangguan sistem peredaran darah, gangguan metabolik dan penyebab lainnya. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Masih adanya kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebanyak 43 orang. | 2 | Masih tingginya Faktor resiko pada ibu hamil dengan kelompok umur beresiko, Kekurangan Energi Kronik (KEK) dan Anemia |
| | | 3 | Masih ditemukannya komplikasi pada ibu hamil, bayi dan balita |
| | | 4 | Masih ada ibu hamil, bayi dan balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |
| | | 5 | Masih ada Balita yang belum mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) |
| | | 6 | Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak |
| | | | Masih kurangnya pengetahuan ibu hamil dan ibu balita tentang kesehatan ibu dan anak |
| | | 7 | Belum optimalnya Sistem Rujukan Terpadu |
| 3 | Masih rendahnya status Gizi Masyarakat | 1 | Masih ada masalah gizi pada ibu hamil, bayi dan balita serta anak sekolah dan calon pengantin |
| 4 | Prevalensi Stunting Tahun 2022 sebesar 25% | 2 | Masih adanya masalah kesehatan gizi pada balita |
| | | 3 | Belum optimalnya pelayanan gizi kepada masyarakat |
| 5 | Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). | 1 | Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |
| | | 2 | Masih belum optimalnya UKBM |
| | | 3 | Belum semua korong menjadi korong siaga aktif |
| 6 | Masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, Penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI) dan kasus Pandemi covid-19 | 1 | Trend TB MDR meningkat karena putus minum obat dan masih banyak penderita TB RO yang belum ditemukan |
| | | 2 | Pasien TB tidak mau berobat dengan tuntas |
| | | 3 | Masih adanya kematian pada penderita TB |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | 4 | Masih adanya penularan yang dilakukan oleh perilaku penderita, baik melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik atau cara lainnya |
| | | 5 | Masih kurangnya akses kepada populasi HIV dalam penanggulangan HIV |
| | | 6 | Masih ada bayi yang tidak mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) |
| 7 | Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), Jantung. | 1 | Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan standar |
| | | 2 | Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan konsumsi garam yang berlebih |
| | | 3 | Kurangnya aktifitas fisik oleh masyarakat |
| 8 | Faktor resiko kesehatan lingkungan yang masih mempengaruhi status kesehatan. | 1 | Masih rendahnya cakupan air bersih |
| | | 2 | masih rendahnya cakupan sanitasi layak |
| | | 3 | Masih rendahnya capaian Sop Buang Air Besar Sembarangan |
| 9 | Belum optimalnya cakupan dan kualitas Puskesmas (layanan kesehatan primer). | 1 | Masih ada beberapa wilayah yang kurang mendapatkan akses ke sarana kesehatan |
| | | 2 | Sarana prasana dan alat kesehatan di Puskesmas masih belum sesuai dengan standar Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 |
| 11 | Belum Optimalnya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga | 1 | belum maksimalnya cakupan intervensi dengan pendekatan keluarga |
| 12 | Belum tercapainya jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Universal Health Coverage Sumbar, 75,04%) | 1 | Masih ditemukannya masalah pada data kependudukan yaitu NIK tidak update, atau NIK Ganda serta NIK tidak valid |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | 2 | Verifikasi dan Validasi data kemiskinan yang belum optimal dan tepat sasaran |
| | | 3 | Banyak peserta JKN mandiri yang menunggak karena keluarga tidak mampu membayar iuran JKN setiap bulannya |
| | | 4 | Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN secara mandiri |
| | | 5 | Bayi Baru Lahir belum memiliki Jaminan |
| | | 6 | Data kependudukan peserta JKN tidak valid. |
| 13 | Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | 1 | Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga karena adanya kebijakan pusat tentang ketenagaan |
| | | 2 | Masih banyak tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR yang aktif, sehingga penerbitan SIP nya tidak bisa dilakukan |
| | | 3 | Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan belum bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena keterbatasan anggaran |
| | | 4 | Masih ada puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan sesuai dengan standar |
| 14 | Belum optimalnya perencanaan obat/alkes dan koordinasi perencanaan antar daerah dan pusat sehingga sering menyebabkan ketidak sesuaian antara pasokan dan permintaan. | 1 | masih banyak puskesmas yang belum memiliki alat kesehatan sesuai standra |
| | | 2 | Masih ada kekosong obat dengan jenis obat tertentu |
| 15 | Pengelolaan data informasi dan kesehatan masih belum optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan | 1 | Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti jaringan wifi yang kuran maksimal dan SDM pendukung |
| | | 2 | Integrasi data satu pintu masih manual dan partial |

| | | | | | |
|--|--|----|---|--|--|
| | | | 3 | Pelayanan Informasi Publik dan pengaduan publik belum terakomodir dan belum terlayani dengan optimal | |
| | | 16 | Akuntabilitas kinerja masih belum efektif | 1 | Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih belum terpadu |
| | | | | 2 | Evaluasi Kinerja masih belum optimal dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja |
| | | | | 3 | Capaian indikator kinerja masih berorientasi kepada capaian realisasi anggaran |

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas Sumber Daya Manusia kesehatan yang dimiliki. Beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman pada lima tahun kedepan jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan hasil analisis terhadap KLHS antara lain :

1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita.
2. Meningkatkan status gizi masyarakat.
3. Masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman.
4. Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat .
5. Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), Jantung.
6. Masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, Penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI)
7. Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman berada dikondisi rawan bencana beresik terjadinya KLB
8. Optimalisasi akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan.
9. Indeks keluarga sehat masih rendah
10. Faktor resiko kesehatan lingkungan yang masih mempengaruhi status kesehatan.
11. Belum optimalnya dukungan Rumah Sakit terhadap program prioritas (penurunan kematian maternal, kematian bayi)
12. Belum optimalnya cakupan dan kualitas Puskesmas (layanan kesehatan primer)..
13. Belum Optimalnya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga.
14. Belum tercapainya jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Universal Health Coverage Sumbar, 75,04%).
15. Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

16. Belum optimalnya perencanaan obat/alkes dan koordinasi perencanaan antar daerah dan pusat sehingga sering menyebabkan ketidak sesuaian antara pasokan dan permintaan.
17. Pengelolaan Keuangan Puskesmas dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menyikapi kondisi kesehatan diatas, maka perlu diperhatikan segala faktor penyebabnya sehingga upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan peluang pengembangan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Adanya program prioritas dalam penanggulangan masalah gizi dan stunting, penurunan angka kematian ibu, bayi, balita, pemenuhan obat esensial, PISK-PK, Kesehatan Lingkungan serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2. Adanya Komitmen Kepala Daerah tentang percepatan program Stunting melalui beberapa aksi konvergensi.
3. Adanya dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
4. Optimalisasi penggunaan dana Kapitasi JKN melalui pengelolaan BLUD Puskesmas ke arah Upaya Kesehatan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat.
5. Integrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan Online di Puskesmas melalui Aplikasi Sikda Generik dan e-Pus
6. Penguatan program Inovasi Dinas Kesehatan yaitu Cetar Manja Papa, Gerobak Papa, Bersin Asik Ajo Bucin Tu
7. Optimalisasi Call Center PSC Papa Tangkas Gada 119.

Isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelesaian Pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan dengan optimal di daerah dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis, yaitu :

1. Standar dan jumlah barang dan/atau jasa
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan
3. Petunjuk Teknis atau tata cara pemenuhan standar

Dalam mengimplementasikan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat merencanakan kebutuhan sumber daya sesuai dengan standar teknis setiap jenis indikator baik kualitas intervensi dan sumber daya yang diperlukan sesuai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Hasil identifikasi isu strategis yang terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Hasil Identifikasi Isu Strategis

| NO | PERMASALAHAN 2016-2021 | ISU STRATEGIS 2021-2026 | TUJUAN 2021-2026 | SASARAN 2021-2026 | INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021-2026 | SATUAN | KONDISI AWAL 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | |
|----|---|---|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1 | Masih adanya kematian ibu melahirkan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebanyak 9 orang. | 1 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 1 | 1 Survei Kepuasan Masyarakat | 1 | Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat | 1 | Angka Kematian Ibu | % | 9 Orang | 8 Orang | 7 Orang | 6 Orang | 5 Orang | 4 Orang | 3 Orang | | |
| 2 | Masih adanya kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebanyak 43 orang. | | | | | | 2 | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | % | 80,2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 3 | Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar | % | 80,4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 4 | Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | % | 82,2% | 83,4% | 86,5% | 89,8% | 93% | 96,2% | 100% | | |
| | | | | | | | 5 | Persentase Bumil, Bulin, Bufas dapat penanganan komplikasi | % | 114% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | 6 | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kelas Ibu Hamil | % | 25 Puskesmas | |
| | | | | | | | 7 | Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi P4K | % | 25 Puskesmas | |
| | | | | | | | 8 | Persentase Puskesmas yang melaporkan dan melaksanakan AMP kejadian Kematian | % | 25 Puskesmas | | |
| | | | | | | | 9 | Angka Kematian Bayi | % | 49 Orang | 48 Orang | 47 Orang | 46 Orang | 45 Orang | 44 Orang | 43 Orang | | |
| | | | | | | | 10 | Persentase Kunjungan neonatal Lengkap (KNL) | % | 80.40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | 11 | Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | % | 86,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | 12 | Persestase Neonatal Komplikasi Yang ditangani | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | 13 | Angka Kematian Balita | % | 7 Orang | 6 Orang | 4 Orang | 3 Orang | 2 Orang | 1 Orang | 0 Orang | | |
| | | | | | | | 14 | Persentase Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Balita | % | 32% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | 15 | Persentase Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS pada kunjungan Balita | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 3 | Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | % | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | | | | | 4 | Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar | % | 25 Fasyankes | 50 Fasyankes | 75 Fasyankes | 100 Fasyankes | 125 Fasyankes | 150 Fasyankes | 175 Fasyankes |
| | | | | | | | 5 | Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | % | 59.30% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | | | | | 6 | Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | % | 55.9 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | | | | | 7 | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja | % | 5 Puskesmas | 8 Puskesmas | 12 Puskesmas | 16 Puskesmas | 20 Puskesmas | 23 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| | | | | | | | 8 | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan olah raga | % | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| 4 | Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). | 2 | Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat | | | | 1 | Persentase Puskesmas yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | % | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% |
| | | | | | | | 2 | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif | % | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
| | | | | | | | 3 | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| | | | | | | | 4 | Persentase Rumah Tangga PHBS | % | 70% | 72% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% |
| 5 | Masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, Penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI) | 3 | Pencegahan penyakit menular dan tidak menular. | 2 | Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | 2 | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | 1 | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) | % | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | | | | | | 2 | Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk | % | 317 | 316 | 331 | 328 | 324 | | |
| | | | | | | | 3 | Cakupan penemuan dan pengobatan TB | % | 37% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | | | | | | 4 | Persentase penemuan kasus TB resistan obat | % | 63% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | | | | | | 5 | Cakupan pengobatan TB RO | % | 100% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% |
| | | | | | | | 6 | Angka keberhasilan pengobatan kasus TB Resistan obat | % | 44% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | | | | | 7 | Persentase kasus TB yang mengetahui status HIV | % | 83% | 65% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100% |
| | | | | | | | 8 | Cakupan penemuan kasus TB Anak | % | 13% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| | | | | | | | 9 | Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) | % | 0,067/1000 pddk | 0,21 per 1000 pddk | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | |
| | | | | | | | 10 | Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | % | 0% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | |
| | | | | | | | 11 | Jumlah deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko | % | 0% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 12 | Peningkatan deteksi dini pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada Ibu Hamil | % | 44,47% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 13 | Penemuan kasus malaria | % | 0 | <1 per 1000 pddk | |
| | | | | | | | 14 | Penemuan kasus DBD per 100.000 pddk (Insiden Rate) | % | 9,1/100.000 pddk | <45 per 100.000 pddk | <44 per 100.000 pddk | <43 per 100.000 pddk | <42 per 100.000 pddk | <41 per 100.000 pddk | <40 per 100.000 pddk | |
| | | | | | | | 15 | Eliminasi rabies | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 16 | Penanggulangan penyakit filariasis dan kecacingan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 17 | Penurunan mikrofilaria rate <1% | % | 0% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| | | | | | | | 18 | Angka penemuan penderita Kusta Baru (CDR) | % | 1,2/100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | < 5 per 100.000 pddk | |
| | | | | | | | 19 | Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat | % | | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| | | | | | | | 20 | Prevalensi kusta | % | < 1 per 100.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | < 1 per 10.000 pddk | |
| | | | | | | | 21 | Proporsi anak yg mendapatkan penyakit kusta | % | 0 | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | < 5% | |
| | | | | | | | 22 | Peningkatan penatalaksanaan kasus pneumonia | % | 100% | 100 % (25 Pusk) | |
| | | | | | | | 23 | Persentase tatalaksana Pneumonia sesuai standar | % | 100% | 52% | 55% | 57% | 60% | 60% | 60% | |
| | | | | | | | 24 | Puskesmas yg melaksanakan LROA | % | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
| | | | | | | | 25 | Cakupan Penemuan kasus diare semua umur | % | 100% | 11.383 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 26 | Persentase tatalaksanaan Diare sesuai standar | % | 100% | 52% | 55% | 57% | 60% | 60% | 60% | |
| | | | | | | | 27 | Cakupan penemuan kasus diare pada balita | % | 16,7% | 6.276 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 28 | Cakupan penemuan pneumonia balita | % | 12,1% | 1.648 (100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Secara geografis Kabupaten Padang Pariaman berada dikondisi rawan bencana berisik | 4 | Pemenuhan SPM bidang kesehatan kewenangan | 3 | Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit | 3 | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian | 1 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | % | 36,6% | 79,30% | 83% | 87,90% | 91,60% | 95% | 95% |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|--|--|---|----|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | terjadinya KLB | | Kabupaten | | dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | | penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat | 2 | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | % | 61,10% | 80% | 83% | 86% | 89% | 92% | 95% |
| | | | | | | | | 3 | Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak Rubella | % | 8,80% | 76,40% | 81% | 85,60 | 90,30% | 95% | 95% |
| | | | | | | | | 4 | Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun | % | 2,33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | 5 | Persentase merespon peringatan dini KLB (alert systems) merespon sinyal kewaspadaan dalam SKDR | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | 6 | Persentase ketepatan laporan SKDR | % | 76,80% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 95% |
| | | | | | | | | 7 | Persentase kelengkapan laporan SKDR | % | 81% | 90% | 92% | 92,50% | 93% | 94% | 95% |
| | | | | | | | | 8 | Cakupan desa/ kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | 9 | Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | 10 | Persentase Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) | % | 25 Puskesmas |
| 7 | Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), Jantung. | | | | | | | 1 | Presentase Kab/ Kota melaksanakan Deteksi Dini FR.PTM | % | 21,2% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | | | | | | 2 | Presentase Sekolah melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | % | 61,5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | | | | | | | | 3 | Presentase Puskesmas menyelenggarakan KTR/ UBM | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| | | | | | | | | 4 | Persentase Layanan Deteksi Dini Gangguan Indera Fungsional | % | 2,38% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| | | | | | | | | 5 | Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kanker servik dan payudara pada perempuan usia 30- 50 tahun | % | 2,7% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | | | | | | 6 | Persentase merokok pada usia 10- 18 tahun | % | 0 | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 8,7% | 8,7% | 8,7% |
| | | | | | | | | 7 | Persentase Obesitas pada penduduk usia > 18 tahun | % | 21,2% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% | 21,8% |
| | | | | | | | | 8 | Persentase Puskesmas melaksanakan PANDU PTM | % | 33% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 9 | Persentase Korong melaksanakan Posbindu PTM | % | 70,67% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| | | | | | | | 10 | Persentase sekolah melaksanakan kebijakan KTR | % | 61,5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| | | | | | | | 11 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif usia 15- 59 tahun (Skrining PTM) | % | 47,8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 12 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar | % | 39,9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 13 | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | % | 71,2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 14 | Pelayanan Kesehatan Jiwa mendapatkan layanan sesuai standar | % | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | 15 | Persentase penderita depresi pada penduduk >15 tahun yang mendapatkan pelayanan | % | 0 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | |
| | | | | | | | 16 | Persentase penderita GME pada penduduk >15 tahun yang mendapatkan layanan | % | 0 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | |
| 8 | Belum optimalnya cakupan dan kualitas Puskesmas (layanan kesehatan primer). | 5 | Peningkatan akses pelayanan kesehatan | 4 | Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 4 | Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 1 | Jumlah puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| 9 | Belum Optimalnya penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga | | | | | 2 | | Jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| | | | | | | 3 | | Persentase pelayanan BLUD Puskesmas | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Belum tercapainya jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman (Universal Health Coverage Sumbar, 75,04%) | | Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 5 | Peningkatan Sumber Daya Kesehatan | 5 | Terjaminnya pembiayaan kesehatan. | 4 | Persentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional | % | 74,49% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 80% |
| 11 | Belum optimalnya cakupan dan kualitas Puskesmas (layanan kesehatan primer). | 6 | Peningkatan akses pelayanan kesehatan | 6 | Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 6 | Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan | 5 | Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga | Puskesmas | 12 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| | | | | | | 6 | | Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal | % | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | |
| | | | | | | 7 | | Persentase pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar | % | 10% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 8 | Jumlah Fasilitas Pelayanan yang ter akreditasi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 9 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Belum optimalnya dukungan Rumah Sakit terhadap program prioritas (penurunan kematian maternal, kematian bayi) | | | | | | 1 | Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dari sama dengan 2% sebesar 100% FKTP | % | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | 2 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 3 | Menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit | % | 34 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| | | | | | | | 4 | Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90% | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 6 | Persentase RS milik Pemerintah dengan Pelayanan sesuai standar sebesar 90% | % | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 7 | Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas | % | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 8 | Persentase RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratannya dengan PSC 119 (100%) | % | 1 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 9 | Pembentukan Tim dalam Upaya penanggulangan Krisis Kesehatan terdampak bencana | % | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | | 1 | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas |
| 13 | Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan | 7 | Peningkatan sumber daya kesehatan | 7 | Peningkatan sumber daya kesehatan | 7 | Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar | 1 | Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin | 48 | 73 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| | | | | | | | 2 | Jumlah tenaga kesehatan di fasyankes yang mempunyai SIP | | | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 |
| | | | | | | | 3 | Jumlah peraturan Bupati tentang pengawasan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 4 | Jumlah tenaga kesehatan secara teknis | | | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 85 | 85 |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|----|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 14 | Belum optimalnya perencanaan obat/alkes dan koordinasi perencanaan antar daerah dan pusat sehingga sering menyebabkan ketidak sesuaian antara pasokan dan permintaan. | 8 | Peningkatan akses pelayanan kesehatan | 8 | Peningkatan sumber daya kesehatan | 8 | Meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan | 1 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | 2 | Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | 4 | Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | % | 4% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |
| | | | | | | | | 5 | Jumlah puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pelayanan kefarmasian | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | |
| | | | | | | | | 6 | Jumlah penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan | Ada/Tidak | Tidak ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | |
| | | | | | | | | 7 | Jumlah puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | |
| | | | | | | | | 8 | Jumlah Apotik yang diawasi | Apotik | 18 Apotik | 20 Apotik | 22 Apotik | 23 Apotik | 23 Apotik | 24 Apotik | 25 Apotik | |
| | | | | | | | | 9 | Jumlah Toko Obat Yang diawasi | Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | 11 Toko Obat | |
| | | | | | | | | 10 | Persentase PIRT yang menerapkan CPPB | % | 1% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 30% | |
| | | | | | | | | 11 | Jumlah IRT-P yang diawasi | IRT-P | 126 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
| | | | | | | | | 12 | Jumlah IRP-P yang mendapatkan sertifikat penyuluhan | Sertifikat | 72 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| | | | | | | | | 13 | Jumlah IRT-P yang mendapatkan sertifikat produksi rumah tangga pangan | Sertifikat | 30 Rekomendasi | 35 Rekomendasi | 40 Rekomendasi | 45 Rekomendasi | 50 Rekomendasi | 55 Rekomendasi | 60 Rekomendasi | |
| | | | | | | | | 14 | Jumlah tempat Pengolahan makanan (TPM) yang di inspeksi kesehatan lingkungan dan TPM yang bersertifikat laik hygiene | Tempat | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | | | | | | 15 | Jumlah pasar pabukooan dan sarana distribusi pangan yang di awasi | Pasar | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | 16 | Jumlah kantin sekolah yang diawasi | Sekolah | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| | | | | | | | | 17 | Jumlah pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan | Fasyankes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | 18 | Jumlah pembangunan sarana fasilitas pelayanan kesehatan rujukan | Sarana | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | 1 | Jumlah Pengawasan alkes di RS dan Puskesmas | Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | 25 Puskesmas | |
| | | | | | | | | 2 | Persentase Alkes yang dikalibrasi | % | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada Renja tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, SDG's dan SPM-Kesehatan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Program dan kegiatan disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam dibawah ini.

Tabel 2.35
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | |
| Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien | | | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan | | | | | | | | | |
| | | | | | 149,780,008,412 | | | 164,758,009,253 | |
| 1.02 .01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti | | 100% | 98,535,181,103 | 100% | | 100% | 108,388,699,213 |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | A | | A | | A | |
| | | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti | | 100% | | 100% | | 100% | |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu | Dinas Kesehatan | 2 dokumen | 139,986,000 | DAU | | 96% | 153,984,600 |
| | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | Dinas Kesehatan | 2 Laporan | | | | | |
| 1.02.01.2.01 .01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 6 dokumen | 69,993,000 | DAU | | 2 dokumen | 76,992,300 |
| 1.02.01.2.01 .02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | | 26 dokumen | - |
| 1.02.01.2.01 .03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | | 26 dokumen | - |
| 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | | 26 dokumen | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | | 26 dokumen | - |
| 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Kesehatan | 12 laporan | 69,993,000 | DAU | | 3 laporan | 76,992,300 |
| 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 4 laporan | - | DAU | | 4 laporan | -- |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan | Dinas Kesehatan | 15 Laporan | 97,999,502,603 | DAU | | 1 laporan | 106,855,586,863 |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Kesehatan | 965 Orang/Bulan | 97,141,442,603 | DAU | | 970 Orang/Bulan | 106,855,586,863 |
| 1.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 708,060,000 | DAU | | 12 Dokumen | 778,866,000 |
| 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | - | DAU | | 15 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | - | DAU | | 15 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 150,000,000 | DAU | | 1 laporan | 165,000,000 |
| 1.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen | - | DAU | | 2 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dinas Kesehatan | 15 laporan | - | DAU | | 15 laporan | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|------------|------------|-----|--|------------|------------|
| 1.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | - | DAU | | 15 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat | Dinas Kesehatan | 102 orang | 28,000,000 | DAU | | 201 orang | 30,800,000 |
| | | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala | | 921 orang | | | | 941 orang | |
| | | Jumlah SKP ASN | | 946 orang | | | | 946 orang | |
| | | Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TP | | 946 orang | | | | 946 orang | |
| 1.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Unit | - | DAU | | 10 Unit | - |
| 1.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Kesehatan | 90 Paket | - | | | 95 Paket | - |
| 1.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Dinas Kesehatan | 5 Orang | - | | | 5 Orang | - |
| 1.02.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Kesehatan | 1 Laporan | - | | | 1 Laporan | - |
| 1.02.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Dinas Kesehatan | 20 Orang | - | | | 20 Orang | - |
| 1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Kesehatan | 45 Orang | 9,500,000 | DAU | | 50 Orang | 10,450,000 |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|-------------|
| 1.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang | 9,500,000 | DAU | | 80 Orang | 10,450,000 |
| 1.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang | 9,000,000 | DAU | | 80 Orang | 9,900,000 |
| 1.02 . 1.02.01 . 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan | Dinas Kesehatan | 2451 Surat | 146,580,000 | DAU | | 2471 Surat | 161,238,000 |
| | | Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | | 7 Pelayanan | | | | 7 Pelayanan | |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 12,500,000 | DAU | | 1 Paket | 13,750,000 |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 10,580,000 | DAU | | 1 Paket | 11,638,000 |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 10,000,000 | DAU | | 1 Paket | 11,000,000 |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Bahaq Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 118.750.000 | DAU | | 1 Paket | 163.181.600 |
| 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 11,000,000 | DAU | | 1 Paket | 12,100,000 |
| 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 5 Dokumen | - | DAU | | 5 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | - | DAU | | 1 Paket | - |
| 1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Kesehatan | 13 Laporan | 12,500,000 | DAU | | 13 Laporan | 13,750,000 |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kesehatan | 13 Laporan | 90,000,000 | DAU | | 13 Laporan | 99,000,000 |
| 1.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | - | DAU | | 25 Dokumen | - |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------|-------------------|---|-----|--|-------------------|---|
| 1.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | - | DAU | | 4 Dokumen | - |
| 1.02.1.02.01.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah penambahan nilai aset | Dinas Kesehatan | Rp. 80000000 | 0 | DAU | | 12 Unit | |
| 1.02.1.02.01.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Roda 4/1 Roda 2 | - | DAU | | 1 Roda 4/1 Roda 2 | - |
| 1.02.1.02.01.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | - | DAU | | 1 Paket | - |
| 1.02.1.02.01.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 2 Paket | - | DAU | | 2 Paket | - |
| 1.02.1.02.01.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----------------|------------|-------------|-----|--|------------|-------------|
| 1.02.1.02.01.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia | Dinas Kesehatan | 12 Bulan | 186,612,500 | DAU | | 12 Bulan | 205,273,750 |
| | | Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan | | 12 Bulan | | | | 12 Bulan | |
| 1.02.1.02.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Kesehatan | 13 laporan | 11,100,000 | DAU | | 13 laporan | 12,210,000 |
| 1.02.1.02.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 163,012,500 | DAU | | 1 laporan | 179,313,750 |
| 1.02.1.02.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 12,500,000 | DAU | | 1 laporan | 13,750,000 |
| 1.02.1.02.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 12 laporan | | DAU | | 12 laporan | |
| 1.02.1.02.01.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 34,500,000 | DAU | | 2 Paket | 37,950,000 |
| 1.02.1.02.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Kesehatan | 0 | 12,500,000 | DAU | | 0 | 13,750,000 |
| 1.02.1.02.01.09.02 | Penyediaan Jasa emeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | | 0 | - |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----------------|---|
| 1.02.1.02.01.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | 0 | - |
| 1.02.1.02.01.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | 0 | - |
| 1.02.1.02.01.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Gedung/Tahun | 11,500,000 | DAU | 1 Gedung/Tahun | |
| 1.02.1.02.01.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana/Tahun | - | DAU | 1 Sarana/Tahun | |
| 1.02.1.02.01.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana /Tahun | 10,500,000 | DAU | 1 Sarana /Tahun | |
| 1.02.1.02.01.09.11 | Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas Kesehatan | 1000 M2 | - | DAU | 1000 M2 | |
| 1.02.1.02.01.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Dinas Kesehatan | 100% | - | DAU | 100% | |
| | | | | 25 Puskesmas | 19.747.250.000 | | 25 Puskesmas | |
| Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ke arifa lokal melalui pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| Tujuan 1 : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------|----------------|--|
| Sasaran 2: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Visit Rate | | 2.6 | | | | 2.6 | | |
| | Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit | | 85% | | | | 85% | | |
| | Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | 71% | | | | 100% | | |
| | Angka Kematian Ibu | | 5 orang | | | | 4 orang | | |
| | Indek Keluarga sehat | | 0.12 | | | | 0.14 | | |
| | Universal Health Coverage (UHC) | | 100% | | | | 100% | | |
| 1.02 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit | | 25 orang | 47,869,749,210 | | | 25 orang | 52,656,724,131 | |
| | Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 140 Tempat Tidur | 30,925,474,860 | DAU | 150 Tempat Tidur | 34,018,022,346 | | |
| | Indeks Kepuasan masyarakat | | A | | | A | | | |
| | Persentase Sampel Air yang diperiksa | | 100% | | | 100% | | | |
| | Persentase sediaan farmasi yang dikelola | | 100% | | | 100% | | | |
| | Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda | | 60% | | | 60% | | | |
| | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial | | 100% | | | 100% | | | |
| | Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan | | | 169 Data | | | 169 Data | | |
| | Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga | | | 100% | | | 100% | | |
| | Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2% | | | 100% | | | 100% | | |
| | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional | | | 100% | | | 100% | | |
| | Angka Kematian Bayi | | | 45 Orang | | | 44 orang | | |
| | Prevalensi Stunting | | | 14% | | | 14% | | |
| | Persentase kecamatan sehat | | 88.24% | | | | 94,12% | | |
| | Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas | | 100% | | | | 100% | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|------------|---------------|-----|--|-------------|---|
| | | Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus | | 1093 orang | | | | 1.202 orang | |
| | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans | | 100% | | | | 100% | |
| | | Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi | | 100% | | | | 100% | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Jumlah RS yang diawasi | Dinas Kesehatan | 1 RS | | | | 1 RS | |
| | | Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | | 3 Sarana | | | | 3 Sarana | |
| | | Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP | | 2 Paket | | | | 2 Paket | |
| | | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan | | 3 Paket | | | | 10 Paket | |
| 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.2.01.04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 3 unit | - | DAK | | 3 unit | |
| 1.02.02.2.01.07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 3 unit | 1,407,418,236 | DAU | | 3 unit | |
| 1.02.02.2.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Dinas Kesehatan | 3 unit | 1,761,070,967 | DAU | | 5 unit | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|---------|----------------|-----|--|---------|--|
| 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 2 Unit | 899,952,363 | DAU | | 2 Unit | |
| 1.02.02.2.01.11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 5 unit | - | DAU | | 5 unit | |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dsediakan | Dinas Kesehatan | 2 Unit | - | DAU | | 2 Unit | |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | Dinas Kesehatan | 5 unit | - | DAU | | 5 unit | |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 3 unit | 12,080,310,794 | DAU | | 3 unit | |
| 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Dinas Kesehatan | 13 unit | 17,587,500 | DAU | | 13 unit | |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket | 14,571,314,000 | DAU | | 1 paket | |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket | - | DAK | | 1 paket | |
| 1.02.02.2.01.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | Dinas Kesehatan | 2 Unit | - | DAU | | 2 Unit | |
| 1.02.02.2.01.19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 2 Unit | - | DAU | | 2 Unit | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--------------|----------------|-----|--|--------------|--|
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 25 unit | 30,000,000 | DAU | | 25 unit | |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 4 Paket | 157,821,000 | DAU | | 4 Paket | |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 16,576,174,350 | DAU | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah dokumen administrasi Labkesda | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah dokumen administrasi IFK | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan | Dinas Kesehatan | 25 Pelayanan | | | | 25 Pelayanan | |
| | | Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90% | Dinas Kesehatan | 1 RS | | | | 1 RS | |
| | | Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine | Dinas Kesehatan | 25 Fasyankes | | | | 25 Fasyankes | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|
| | Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratannya dengan PSC 119 (100%) | Dinas Kesehatan | 1 RS | | | | 1 RS | |
| | Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal | Dinas Kesehatan | 4 Kegiatan | | | | 4 Kegiatan | |
| | Prevalensi balita wasting | Dinas Kesehatan | 7.00% | | | | 7.00% | |
| | Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana | Dinas Kesehatan | 56 Orang | | | | 58 Orang | |
| | Jumlah peserta KB Aktif | Dinas Kesehatan | 41.876 Orang | | | | 68.152 Orang | |
| | Jumlah Lansia yang dilakukan skrining Kesehatan | Dinas Kesehatan | 58.125 Orang | | | | 58.135 Orang | |
| | Jumlah nagari dengan stob buang besar sembarangan (SBS) | Dinas Kesehatan | 67 Nagari | | | | 71 Nagari | |
| | Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | | | | 25 Puskesmas | |
| | Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 75 TFU | | | | 90 TFU | |
| | Jumlah media KIE yang dibuat | Dinas Kesehatan | 3156 KIE | | | | 3156 KIE | |
| | Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis | Dinas Kesehatan | 1093 Kasus | | | | 1213 Kasus | |
| | Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV) | Dinas Kesehatan | 87 Kasus | | | | 114 Kasus | |
| | Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 25 Tatalaksana | | | | 25 Tatalaksana | |
| | Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 33895 Orang | | | | 33895 Orang | |
| | Jumlah kegiatan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB | Dinas Kesehatan | 7 Kegiatan | | | | 7 Kegiatan | |
| | Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI) | Dinas Kesehatan | 7 Kejadian | | | | 7 Kejadian | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | | | | 169 Dokumen | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|---------------|------------|------------|--|---------------|--|
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standr | Dinas Kesehatan | 9401 orang | 49,702,200 | 8281 orang | | 9780 orang | |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 9342 orang | 41,434,900 | DAU | | 9402 orang | |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 8903 orang | 42,156,400 | DAU | | 8960 orang | |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 30.691 Orang | 49,802,000 | DAU | | 31.827 Orang | |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 83.626 orang | 37,272,500 | DAU | | 82.852 orang | |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Pada Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 274.295 orang | 54,687,400 | DAU | | 279.738 orang | |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 58.125 orang | 49,799,000 | DAU | | 59.976 orang | |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 74.074 orang | 54,687,450 | DAU | | 94.098 orang | |
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2619 orang | 55,000,000 | DAU | | 2810 orang | |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 897 orang | 42,250,000 | DAU | | 917 orang | |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2.619 orang | 45,375,000 | DAU | | 2.719 orang | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--------------|-------------|-----|--|--------------------|--|
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 10.001 orang | 41,357,000 | DAU | | 0.16/1000 penduduk | |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 39,575,000 | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 44,000,000 | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4000 Dokumen | 200,000,000 | DAU | | 4000 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dinas Kesehatan | 24 Dokumen | 75,000,000 | DAU | | 24 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan | 60 Dokumen | 148,215,000 | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 89,500,000 | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | 95,000,000 | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveillance Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 25,000,000 | DAU | | 12 Dokumen | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--------------|----------------|-----|--|--------------|--|
| 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 3538 orang | 30,000,000 | DAU | | 3738 orang | |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 162 orang | 31,055,500 | DAU | | 180 orang | |
| 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | - | DAU | | 4 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 24 Dokumen | 51,650,000 | DAU | | 24 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 14,601,155,000 | DAU | | 4 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Dinas Kesehatan | 250 orang | 25,000,000 | DAU | | 270 orang | |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Dinas Kesehatan | 40 Paket | 44,000,000 | DAU | | 40 Paket | |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dinas Kesehatan | 104 Dokumen | 95,000,000 | DAU | | 104 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Dinas Kesehatan | 10 Puskesmas | - | DAU | | 25 Puskesmas | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-----|--|----------------------------------|--|
| 1.02.02.2.02.31 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | | 12 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | - | DAU | | 25 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 1 Dokumen | 300,000,000 | DAU | | 1 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik | - | DAU | | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik | |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Dinas Kesehatan | 7 Laporan | 75,000,000 | DAU | | 7 Laporan | |
| 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 43,500,000 | DAU | | 4 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | |
| 1.02.02.02.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | 224,000,000 | DAU | | 169 Dokumen | |
| 1.02.02.02.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | 224,000,000 | DAU | | 169 Dokumen | |
| 1.02.02.02.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 dokumen | 224,000,000 | DAU | | 25 dokumen | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-----|--|----------------------------------|--|
| 1.02.02.02.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistik Informasi Kesehatan dan jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan | Dinas Kesehatan | 25 alat | - | DAU | | 25 alat | |
| 1.02.02.2.04 | Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | 144,100,000 | DAU | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna | | 9 Klinik | | | | 9 Klinik | |
| | | Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan | | 4 Sarana | | | | 38 Sarana | |
| | | Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialisik kurang dan sama dengan 2% | | 25 puskesmas | | | | 25 puskesmas | |
| | | Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit | | 25 puskesmas dan 1 RS | | | | 25 puskesmas dan 1 RS | |
| | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | 10 Puskesmas | | | | 10 Puskesmas | |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Dinas Kesehatan | 1 RS | 0 | DAU | | 1 RS | |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 1 RS | 0 | DAU | | 1 RS | |
| 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik | 0 | DAU | | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|------------------|---------------|-----|--|-----------------|--|
| 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | 31,600,000 | DAU | | 25 Dokumen | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis | | 60% | 1,132,598,099 | | | 80% | |
| 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi | 59,150,000 | DAU | | 900 Rekomendasi | |
| 1.02.03.2.01.01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi | 27,650,000 | DAU | | 2350 Dokumen | |
| 1.02.03.2.01.02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi | 31,500,000 | DAU | | 2350 Dokumen | |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 100 Nakes | 1,020,400,000 | DAU | | 85 Nakes | |
| 1.02.03.2.02.01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen | 35,000,000 | DAU | | 2 Dokumen | |
| 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Dinas Kesehatan | 100 orang | 952,900,000 | DAU | | 150 Orang | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|--|
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 100 Dokumen | 32,500,000 | DAU | | 150 Dokumen | |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan | Dinas Kesehatan | 230 orang | 53,048,099 | DAU | | 55 orang | |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Dinas Kesehatan | 200 orang | 53,048,099 | DAU | | 300 orang | |
| 1.02..04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | | 20% | 122,000,000 | DAU | | 20% | |
| | | Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT | | 70% | | | | 80% | |
| | | Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang di awasi | | 75% | | | | 95% | |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin | Dinas Kesehatan | 75 Sarana | 50,000,000 | DAU | | 75 Sarana | |
| 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 50,000,000 | DAU | | 12 Dokumen | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------|---|-----|-----------|
| 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dinas Kesehatan | 34 Sarana | - | DAU | 36 Sarana |
| 1.02.04.2.01.03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | Dinas Kesehatan | 34 Sarana | - | DAU | 36 Sarana |
| 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah SPPIRT yang diterbitkan | Dinas Kesehatan | 70 SPPIRT | 0 | DAU | 70 SPPIRT |
| 1.02.04.2.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu an PKRT 1 Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen | - | DAU | 3 Dokumen |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|---------------------|------------|-----|------------|
| 1.02.04.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | 12 Dokumen |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah pengawasan sarana produksi PKRT | Dinas Kesehatan | 3 Sarana | 17,500,000 | DAU | 3 Sarana |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen | 17,500,000 | DAU | 3 Dokumen |
| 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | Dinas Kesehatan | 75 Sarana | 25,000,000 | DAU | 75 TPP |
| | Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar | 75 Sarana Air Minum | | 75 Sarana Air Minum | | | |
| | Jumlah makanan siap saji yang di awasi | 100 Makanan Siap Saji | | 100 Makanan | | | |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | | Siap Saji |
|-----------------|---|--|-----------------|------------|------------|-----|--|----------------|
| | | Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi | | 100 Sarana | | | | 100 Sarana |
| 1.02.04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 25,000,000 | | | 12 Dokumen |
| 1.02.04.2.05 | Penerbita Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan yang diterbitkan | | 10 Sticker | 7,500,000 | DAU | | 10 Sticker |
| 1.02.04.2.05.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | 12 Dokumen | 7,500,000 | DAU | | 12 Dokumen |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 70 IRTP | 22,000,000 | DAU | | 35 Pemeriksaan |
| 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 70 sarana | 22,000,000 | DAU | | 90 sarana |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|------------|-----|--------------|
| 1.02.04.2.06.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 25 data | - | DAU | 35 data |
| Sasaran 3 : Meningkatkan Budaya Hidup Sehat | | Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS | | 78% | | | 82% |
| 1.02 .05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS | | 78% | 60,480,000 | DAU | 82% |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS | Dinas Kesehatan | 2 Kebijakan | 2,480,000 | DAU | 2 Kebijakan |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | 2,480,000 | DAU | 15 Dokumen |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS | Dinas Kesehatan | 103 Nagari | 33,000,000 | DAU | 103 Nagari |
| 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | 33,000,000 | DAU | 15 Dokumen |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan | Dinas Kesehatan | 789 Posyandu | 25,000,000 | DAU | 789 Posyandu |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dinas Kesehatan | 789 Dokumen | 25,000,000 | DAU | 789 Dokumen |
| UPTD se Kabupaten Padang Pariaman | | | | | | | |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0001 | Puskesmas Sungai Geringging | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0002 | Puskesmas Koto Bnagko | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0003 | Puskesmas Batu Basa | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0004 | Puskesmas Ampalu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0005 | Puskesmas Sungai Limau | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0006 | Puskesmas Kampung Dalam | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0007 | Puskresmas Sikucur | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0008 | Puskesmas Ulahan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0009 | Puskesmas Padang Alai | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0010 | Puskresmas Pauh Kamar | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |

**RENJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|-----------|------------|-----------|------------|
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0011 | Puskesmas Gasan Gadang | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0012 | Puskesmas Sungai Sarik | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0013 | Puskesmas Kayu Tanam | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0014 | Puskesmas Padang Sago | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0015 | Puskesmas Sikabu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0016 | Puskesmas Lubuk Alung | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0017 | Puskesmas Enam Lingsung | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0018 | Puskesmas Kampung Guci | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0019 | Puskesmas Anduring | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 66,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0020 | Puskesmas Sintuk | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0021 | Puskesmas Ketaping | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0022 | Puskesmas Limau Purut | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|-----------|-------------|-----------|--|-------------|
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0023 | Puskesmas Sicincin | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0024 | Puskesmas Pasar Usang | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0025 | Puskesmas Patamuan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0026 | UPTD LABKESDA | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | | 330,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.0 1.0027 | UPTD IFK | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | | 330,000,000 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2022. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan fisik bidang kesehatan telah dilimpahkan ke Nagari dan Kecamatan. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan difasilitasi oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan sarana / barang. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian PMT pada Balita dan Lansia, Penyuluhan dan Pemeriksaan kualitas air, pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Lingkungan dan PHBS, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksanaan Posbindu, Penyuluhan bahaya Rokok dan Narkoba, Deklarasi Kawasan tanpa asap Rokok, Penyuluhan kesehatan Reproduksi. Pencegahan Penyakit DBD, Pemberian PMT pada ibu hamil dan balita dengan masalah Gizi, Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi dan Pembentukan KP Ibu, Penyuluhan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular, Kampanye hidup sehat dengan GERMAS, penyuluhan kesehatan lansia, . Program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD adalah pembangunan Pustu dan Polindes, usulan tersebut sudah diakomodir melalui anggaran APBD. Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.36
Usulan Program/ Kegiatan Dari Masyarakat

| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Lokasi | TARGET CAPAIAN KINERJA |
|---|--|-----------------|------------------------|
| | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti | | 100% |
| | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | A |
| | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti | | 100% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu | Dinas Kesehatan | 2 dokumen |
| | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | Dinas Kesehatan | 2 Laporan |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 6 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Kesehatan | 12 laporan |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 4 laporan |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan | Dinas Kesehatan | 15 Laporan |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Kesehatan | 965 Orang/Bulan |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Kesehatan | 1 laporan |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dinas Kesehatan | 15 laporan |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat | Dinas Kesehatan | 102 orang |
| | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala | | 921 orang |
| | Jumlah SKP ASN | | 946 orang |
| | Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TP | | 946 orang |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Unit |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Kesehatan | 90 Paket |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen |

| | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|
| Kepegawaian | | | |
| Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen |
| Pemulangan Pegawai Yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Dinas Kesehatan | 5 Orang |
| Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Kesehatan | 1 Laporan |
| Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Dinas Kesehatan | 20 Orang |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Kesehatan | 45 Orang |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan | Dinas Kesehatan | 2451 Surat |
| | Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | | 7 Pelayanan |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 5 Dokumen |
| Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Kesehatan | 13 Laporan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kesehatan | 13 Laporan |
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah penambahan nilai aset | Dinas Kesehatan | Rp. 80000000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Roda 4/1 Roda 2 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 2 Paket |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia | Dinas Kesehatan | 12 Bulan |
| | Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan | | 12 Bulan |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Kesehatan | 13 laporan |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan |

| | | | |
|--|--|-----------------|------------------|
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 12 laporan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Dinas Kesehatan | 1 Paket |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Kesehatan | 0 |
| Penyediaan Jasa emeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Gedung/Tahun |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana/Tahun |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana /Tahun |
| Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas Kesehatan | 1000 M2 |
| Peningkatan Pelayanan BLUD | | Dinas Kesehatan | 100% |
| Sasaran 2: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Visit Rate | | 2.6 |
| | Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit | | 85% |
| | Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | 71% |
| | Angka Kematian Ibu | | 5 orang |
| | Indek Keluarga sehat | | 0.12 |
| | Universal Health Coverage (UHC) | | 100% |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Angka Kematian 48 Jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar dari Rumah Sakit | | 25 orang |
| | Angka pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 140 Tempat Tidur |
| | Indeks Kepuasan masyarakat | | A |
| | Persentase Sampel Air yang diperiksa | | 100% |
| | Persentase sediaan farmasi yang dikelola | | 100% |
| | Persentase Nilai Kelengkapan Komulasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Labkesda | | 60% |
| | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Essensial | | 100% |
| | | | |
| Jumlah ketersediaan data dalam profil kesehatan | | | 169 Data |
| | Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga | | 100% |

| | | | |
|---|---|------------------------|------------|
| | Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dari sama dengan 2% | | 100% |
| | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional | | 100% |
| | Angka Kematian Bayi | | 45 Orang |
| | Prevalensi Stunting | | 14% |
| | Persentase kecamatan sehat | | 88.24% |
| | Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM Prioritas | | 100% |
| | Angka keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis semua kasus | | 1093 orang |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Labkesmas, FKTP, dan RS) yang melaporkan hasil surveilans | | 100% |
| | Persentase penduduk sesuai kelompok umur yang mendapatkan pelayanan imunisasi | | 100% |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Jumlah RS yang diawasi | Dinas Kesehatan | 1 RS |
| | Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | | 3 Sarana |
| | Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP | | 2 Paket |
| | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan | | 3 Paket |
| Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pembanguna Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 3 unit |
| Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 3 unit |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Dinas Kesehatan | 3 unit |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 2 Unit |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 5 unit |
| Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dsediakan | Dinas Kesehatan | 2 Unit |
| Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | Dinas Kesehatan | 5 unit |
| Pengadaan Alat Kesehatan/ALat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 3 unit |
| Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Dinas Kesehatan | 13 unit |
| Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket |
| Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket |
| Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Dinas Kesehatan | 2 Unit |
| Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 2 Unit |
| Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 25 unit |
| Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 4 Paket |

| | | | |
|---|---|-----------------|----------------|
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| | Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| | Jumlah dokumen administrasi Labkesda | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| | Jumlah dokumen administrasi IFK | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| | Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan | Dinas Kesehatan | 25 Pelayanan |
| | Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90% | Dinas Kesehatan | 1 RS |
| | Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine | Dinas Kesehatan | 25 Fasyankes |
| | Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat darurannya dengan PSC 119 (100%) | Dinas Kesehatan | 1 RS |
| | Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal | Dinas Kesehatan | 4 Kegiatan |
| | Prevalensi balita wasting | Dinas Kesehatan | 7.00% |
| | Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana | Dinas Kesehatan | 56 Orang |
| | Jumlah peserta KB Aktif | Dinas Kesehatan | 41.876 Orang |
| | Jumlah Lansia yang dilakukan skrining Kesehatan | Dinas Kesehatan | 58.125 Orang |
| | Jumlah nagari dengan stob buang besar sembarangan (SBS) | Dinas Kesehatan | 67 Nagari |
| | Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 75 TFU |
| | Jumlah media KIE yang dibuat | Dinas Kesehatan | 3156 KIE |
| | Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis | Dinas Kesehatan | 1093 Kasus |
| | Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV) | Dinas Kesehatan | 87 Kasus |
| | Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 25 Tatalaksana |
| | Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 33895 Orang |
| | Jumlah kegiatan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB | Dinas Kesehatan | 7 Kegiatan |
| Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI) | Dinas Kesehatan | 7 Kejadian | |
| Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standr | Dinas Kesehatan | 9401 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 9342 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 8903 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 30.691 Orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 83.626 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Pada Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 274.295 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 58.125 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 74,074 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2619 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 897 orang |

| | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------------|
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2.619 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 10.001 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4000 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dinas Kesehatan | 24 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan | 60 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen |
| Pengelolaan Surveillance Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 3538 orang |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 162 orang |
| Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen |
| Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 24 Dokumen |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen |
| Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Dinas Kesehatan | 250 orang |
| Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Dinas Kesehatan | 40 Paket |
| Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dinas Kesehatan | 104 Dokumen |
| Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Dinas Kesehatan | 10 Puskesmas |
| Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen |
| Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 1 Dokumen |
| Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik |
| Investigasi Awal Kejadian Tidak Di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Dinas Kesehatan | 7 Laporan |
| Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen |
| Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Dinas Kesehatan | 1 Unit |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen |
| Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 dokumen |

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------------|
| Pengadaan Alat/Perangkat Sistik Informasi Kesehatan dan jaringan Internet | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan | Dinas Kesehatan | 25 alat |
| Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas yang terakreditasi Paripurna | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas |
| | Jumlah klinik pratama terakreditasi Paripurna | | 9 Klinik |
| | Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan | | 4 Sarana |
| | Jumlah FKTP dengan rasio rujukan non spesialisistik kurang dan sama dengan 2% | | 25 puskesmas |
| | Jumlah FKTP dengan penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit | | 25 puskesmas dan 1 RS |
| | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar Fasilitas Kesehatan melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | 10 Puskesmas |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Dinas Kesehatan | 1 RS |
| Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 1 RS |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas, 1 RS dan 14 Klinik |
| Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti kompetensi teknis | | 60% |
| Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi |
| Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi |
| Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 1947 Rekomendasi |
| Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 100 Nakes |
| Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen |
| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Dinas Kesehatan | 100 orang |
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 100 Dokumen |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan | Dinas Kesehatan | 230 orang |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Dinas Kesehatan | 200 orang |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | | 20% |
| | Persentase IRTP yang memiliki SPPIRT | | 70% |
| | Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang di awasi | | 75% |
| Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, usaha Mikro Obat Tradisional (U MOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan U MOT yang memiliki izin | Dinas Kesehatan | 75 Sarana |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (U MOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (U MOT) | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dinas Kesehatan | 34 Sarana |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | Dinas Kesehatan | 34 Sarana |
| Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah SPPIRT yang diterbitkan | Dinas Kesehatan | 70 SPPIRT |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu an PKRT I Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah pengawasan sarana produksi PKRT | Dinas Kesehatan | 3 Sarana |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen |
| Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | Dinas Kesehatan | 75 Sarana |
| | Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | | 75 Sarana Air Minum |
| | Jumlah makanan siap saji yang di awasi | | 100 Makanan Siap Saji |
| | Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi | | 100 Sarana |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen |
| Penerbita Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan yang diterbitkan | | 10 Sticker |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | 12 Dokumen |
| Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 70 IRTP |
| Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 70 sarana |
| Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 25 data |

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS | | 78% |
| Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS | Dinas Kesehatan | 2 Kebijakan |
| Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen |
| Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS | Dinas Kesehatan | 103 Nagari |
| Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen |
| Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan | Dinas Kesehatan | 789 Posyandu |
| Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dinas Kesehatan | 789 Dokumen |

Selain usulan program dan kegiatan yang langsung diusulkan oleh masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Padang Pariaman mulai tahun 2022 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Kebijakan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah, maka dinas Kesehatan mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan arah kebijakan bidang Kesehatan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Sedangkan Tujuan dari arah kebijakan bidang kesehatan adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud yang berfokus pada penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, manula, dan keluarga miskin.

Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Visi Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan awal Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Masdir, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**, sedangkan Misi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan.
3. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam menetapkan indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator program dan menjadi acuan dalam rangka penyusunan perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan tersebut disusun dengan memperhatikan unsur integrasi dan sinergi sehingga ada keterkaitan antar dokumen perencanaan.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2024

| No. | Prioritas Pembangunan RKP 2024 | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 | Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 |
|-----|---|--|---|
| 1. | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas | Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing | Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah |
| 2. | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan | Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah |
| 3. | Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan |
| 4. | Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa | | Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah |
| 5. | Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing |
| 6. | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan | Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang |
| 7. | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional |
| | | | Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana |

Adapun dukungan kegiatan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dalam mendukung kebijakan Kabupaten Padang Pariaman secara langsung adalah ikut mendukung pencapaian target pada misi ke-lima prioritas ke-7 (Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas), Sasaran (Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan profesional) dengan indikator kinerja sasaran : Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dan Misi ke-enam prioritas ke-7 (Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas) dengan sasaran (Peningkatan pelayanan dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana) dengan indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun kedepan sampai tahun 2026 adalah ” **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**”. Dengan Indikator tujuan “ **Angka Usia Harapan Hidup** “

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Strategi | Arah Kebijakan | | |
|---|--|--------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA | | | | | | | | |
| MISI 6 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN DASAR DENGAN MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Usia Harapan Hidup | 1 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | 1 | Visit rate | Peningkatan kunjungan ke fasilitas Kesehatan | Meningkatkan kunjungan ke fasyankes | |
| | | | | 2 | Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit | Peningkatan rasio daya tampung rumah sakit rujukan | Meningkatkan ketersediaan tempat tidur rawat inap | |
| | | | | 3 | Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar | |
| | | | | 4 | Angka Kematian Ibu | Peningkatan pengendalian penyakit | Meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular | |
| | | | | 5 | Indek Keluarga sehat | Peningkatatan Cakupan Indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga | Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat | |
| | | | | 6 | Universal Health Coverage (UHC) | Peningkatan pengendalian penyakit | Meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular | |
| | | | | 7 | Cakupan Desa Siaga Aktif | Peningkatan pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat | |
| | | | 2 | Meningkatnya Budaya Hidup Sehat | 1 | Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar | Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar |

Tabel 3.3
Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis Pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|---|---|--|
| VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA | | | | | | |
| MISI 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATUF DAN TRANSPARAN | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai Sakip Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Nilai Sakip Kabupaten yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB | 1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan | 1 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan dari Inspektorat | Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman | Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran serta evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman |



RENCANA KERJA 2024

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan penyusunan rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka mendukung pencapaian target Visi dan Misi Kepala Daerah Padang Pariaman maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMD Bidang Kesehatan yang tertuang dalam Misi 6.
- b) Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs maka program yang dipilih disesuaikan dengan RPJMN Bidang Kesehatan.
- c) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

| No | Indikator SPM | Target (%) |
|-----|---|------------|
| 1. | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu Hamil | 100% |
| 2. | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan bersalin | 100% |
| 3. | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100% |
| 4. | Cakupan Pelayanan Kesehatan balita sesuai Standar | 100% |
| 5. | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 6. | Persentase orang usia 15- 59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 7. | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100% |
| 8. | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 9. | Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 100% |
| 10. | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | 100% |
| 11. | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | 100% |
| 12. | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | 100% |

- d) Dalam mendukung program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Padang Pariaman, Dinas kesehatan melalui sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat telah menjamin penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman dengan persentase kepesertaan JKN KIS 75,04% pada tahun 2022 dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
- e) Melanjutkan kegiatan inovatif di bidang kesehatan seperti Papa Tangka GADA PSC 119, Sabermas Baru, Sikda Generik, Silenting, Ajo Bucin Tu, dan Ibu Cantik, Cetar Manja Papa, Gerobak Papa dan Bersin Asik



RENCANA KERJA 2024

- f) Diperlukan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan untuk perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat.
- g) Meningkatkan jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan kalangan swasta.
- h) Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan melalui pelaksanaan kegiatan terkait RS Kelas D “Pratama”, yaitu: Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS “Pratama”.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program dan 22 (dua Puluh dua) kegiatan dan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Sub Kegiatan. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|--|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|--|--|---|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| | | Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | Pemulangan Pegawai yang Pensiun |
| | | Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas |
| | | Pemindahan Tugas ASN |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | Penyediaan Bahan/Material |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | Pengadaan ALat Besar |
| | | Pengadaan Alat ANgkutan Darat Tak Bermotor |
| | | Pengadaan Mebel |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|---|---|--|
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya |
| | | Pengadaan Aset Tak Berwujud |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |
| | | Pemeliharaan Mebel |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| | | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |
| | | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |
| | Peningkatan Pelayanan BLUD | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya |
| | | Pembangunan Puskesmas |
| | | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan |
| | | Pengembangan Rumah Sakit |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|--|--|---|
| | | Pengembangan Puskesmas |
| | | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas |
| | | Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan |
| | | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi |
| | | Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin |
| | | Pengadaan Bahan Habis Pakai |
| | | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|--|--|---|
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
| | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |
| | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |
| | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
| | | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus |
| | | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
| | | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |
| | | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah |
| | | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional |
| | | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
| | | Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| | | Pengelolaan Penelitian Kesehatan |
| | | Operasional Pelayanan Rumah Sakit |
| | | Operasional Pelayanan Puskesmas |
| | | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |
| | | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |
| | | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|---|--|--|
| | | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah |
| | | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |
| | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan |
| | | Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet |
| | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D da Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya |
| | | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota |
| | | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |
| | | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko ALat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produkis ALat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | |
|--|---|--|
| | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Pduksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Prduk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |
| | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |
| | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |
| | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga |
| | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat |
| | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |



RENCANA KERJA 2024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu) Urusan Wajib, yaitu Urusan Bidang Kesehatan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah. Secara umum, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 sesuai dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah** maka Program dan Sub Kegiatan meliputi **5 Program, 22 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan** dengan total anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp **147,720,008,412 -.** dengan rincian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



RENCANA KERJA 2024

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

| KODE | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (8) | (9) | (10) | |
| Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasi dan transparan | | | | | | | | | |
| Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien | | | | | | | | | |
| Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan | | | | | | | | | |
| | | | | | 149,780,008,412 | | | 164,758,009,253 | |
| 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA | Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti | | A | 98,535,181,103 | | | 108,388,699,213 | |
| | | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | | | | | | | |
| | | Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti | | | | | | | |
| 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu | Dinas Kesehatan | 2 dokumen | 139,986,000 | DAU | 96% | 153,984,600 | |
| | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | Dinas Kesehatan | 2 Laporan | | | | | |
| 1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 2 dokumen | 69,993,000 | DAU | 2 dokumen | 76,992,300 | |
| 1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | 26 dokumen | - | |
| 1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | 26 dokumen | - | |
| 1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | 26 dokumen | - | |
| 1.02.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dinas Kesehatan | 26 dokumen | - | DAU | 26 dokumen | - | |
| 1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinas Kesehatan | 3 laporan | 69,993,000 | DAU | 3 laporan | 76,992,300 | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan | 4 laporan | - | DAU | | 4 laporan | -- |
| 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan | Dinas Kesehatan | 1 Laporan | 97,999,502,603 | DAU | | 1 Laporan | 106,855,586,863 |
| 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Kesehatan | 965 Orang/Bulan | 97,141,442,603 | DAU | | 970 Orang/Bulan | 106,855,586,863 |
| 1.02.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 708,060,000 | DAU | | 12 Dokumen | 778,866,000 |
| 1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kesehatan | 48 Dokumen | - | DAU | | 48 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | | 12 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 150,000,000 | DAU | | 1 laporan | 165,000,000 |
| 1.02.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Dinas Kesehatan | 36 Dokumen | - | DAU | | 36 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Dinas Kesehatan | 12 laporan | - | DAU | | 12 laporan | - |
| 1.02.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | | 12 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat | Dinas Kesehatan | 301 ASN | 28,000,000 | DAU | | 123 ASN | 30,800,000 |
| | | Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala | | 928 ASN | | | | 931 ASN | |
| | | Jumlah SKP ASN | | 946a ASN | | | | 946 ASN | |
| | | Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TP | | 946 ASN | | | | 946 ASN | |
| 1.02.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Unit | - | DAU | | 10 Unit | - |
| 1.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinas Kesehatan | 90 Paket | - | | | 95 Paket | - |
| 1.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05.04 | Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi dan Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----|--|-------------|-------------|
| 1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dinas Kesehatan | 10 Dokumen | - | | | 10 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.05.06 | Pemulangan Pegawai Yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Dinas Kesehatan | 5 Orang | - | | | 5 Orang | - |
| 1.02.01.2.05.07 | Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | Dinas Kesehatan | 1 Laporan | - | | | 1 Laporan | - |
| 1.02.01.2.05.08 | Pemindahan Tugas ASN | Jumlah ASN yang dipindahtugaskan | Dinas Kesehatan | 20 Orang | - | | | 20 Orang | - |
| 1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Kesehatan | 45 Orang | 9,500,000 | DAU | | 50 Orang | 10,450,000 |
| 1.02.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang | 9,500,000 | DAU | | 80 Orang | 10,450,000 |
| 1.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinas Kesehatan | 75 Orang | 9,000,000 | DAU | | 80 Orang | 9,900,000 |
| 1.02 . 1.02.01 . 06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan | Dinas Kesehatan | 2451 Surat | 146,580,000 | DAU | | 2471 Surat | 161,238,000 |
| | | Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | | 7 Pelayanan | | | | 7 Pelayanan | |
| 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 12,500,000 | DAU | | 1 Paket | 13,750,000 |
| 1.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 10,580,000 | DAU | | 1 Paket | 11,638,000 |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 10,000,000 | DAU | | 1 Paket | 11,000,000 |
| 1.02.01.2.06.03 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 118.750.000 | DAU | | 1 Paket | 163.181.600 |
| 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | 11,000,000 | DAU | | 1 Paket | 12,100,000 |
| 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 5 Dokumen | - | DAU | | 5 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | - | DAU | | 1 Paket | - |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------|-------------------|------------|------------|--|-------------------|------------|
| 1.02.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Kesehatan | 1 Laporan | 12,500,000 | DAU | | 1 Laporan | 13,750,000 |
| 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kesehatan | 1 Laporan | 90,000,000 | DAU | | 1 Laporan | 99,000,000 |
| 1.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | - | DAU | | 25 Dokumen | - |
| 1.02.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Kesehatan | 4 Dokuemn | - | DAU | | 4 Dokuemn | - |
| 1.02 . 1.02.01 . 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah penambahan nilai aset | Dinas Kesehatan | 12 Unit | 0 | DAU | | 12 Unit | |
| 1.02.1.02.01.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Roda 4/1 Roda 2 | - | DAU | | 1 Roda 4/1 Roda 2 | - |
| 1.02.1.02.01.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.03 | Pengadaan Alat Besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Paket | - | DAU | | 1 Paket | - |
| 1.02.1.02.01.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 2 Paket | - | DAU | | 2 Paket | - |
| 1.02.1.02.01.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | | 1 Unit | - |



RENCANA KERJA 2024

| 1.02.1.02.01.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia | Dinas Kesehatan | 12 Bulan | 186,612,500 | DAU | | 12 Bulan | 205,273,750 |
|--------------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| | | Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan | | 12 Bulan | | | | 12 Bulan | |
| 1.02.1.02.01.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 11,100,000 | DAU | | 1 laporan | 12,210,000 |
| 1.02.1.02.01.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 163,012,500 | DAU | | 1 laporan | 179,313,750 |
| 1.02.1.02.01.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan | 12,500,000 | DAU | | 1 laporan | 13,750,000 |
| 1.02.1.02.01.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 laporan | | DAU | | 1 laporan | |
| 1.02.1.02.01.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Dinas Kesehatan | 8 Paket | 34,500,000 | DAU | | 8 Paket | 37,950,000 |
| 1.02.1.02.01.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Dinas Kesehatan | 0 | 12,500,000 | DAU | | 12 Bulan | 13,750,000 |
| 1.02.1.02.01.09.02 | Penyediaan Jasa emeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | | 0 | - |
| 1.02.1.02.01.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | | 0 | - |
| 1.02.1.02.01.09.04 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | Dinas Kesehatan | 0 | - | DAU | | 0 | - |
| 1.02.1.02.01.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.08 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | Dinas Kesehatan | 12 Unit | - | DAU | | 12 Unit | - |
| 1.02.1.02.01.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Gedung/Tahun | 11,500,000 | DAU | 1 Gedung/Tahun | | 12,650,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
| 1.02.1.02.01.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana/Tahun | - | DAU | 1 Sarana/Tahun | - |
| 1.02.1.02.01.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kesehatan | 1 Sarana/Tahun | 10,500,000 | DAU | 1 Sarana/Tahun | 11,550,000 |
| 1.02.1.02.01.09.11 | Pemeliharaan Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | Dinas Kesehatan | 1000 M2 | - | DAU | 1000 M2 | - |
| 1.02.1.02.01.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | - | DAU | 25 Puskesmas | - |
| | | | | 25 Puskesmas | 19.747.250.000 | | 25 Puskesmas | 19.747.250.000 |
| Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ke arifa lokal melalui pemberdayaan masyarakat | | | | | | | | |
| Tujuan 1 : Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar | | | | | | | | |
| Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | | | | | | | | |
| Visit Rate | | | | | | | | |
| Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit | | | | | | | | |
| Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | |
| Angka Kematian Ibu | | | | | | | | |
| Indek Keluarga sehat | | | | | | | | |
| Universal Health Coverage (UHC) | | | | | | | | |
| Cakupan Desa Siaga Aktif | | | | | | | | |
| 1.02 .02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan | | 85% | 47,869,749,210 | | 90% | 52,656,724,131 |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota | Jumlah RS yang diawasi | Dinas Kesehatan | 1 RS | 30,925,474,860 | DAU | 1 RS | 34,018,022,346 |
| Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan | | 3 Sarana | | | | | | |
| Jumlah Depot Air Minum yang diperiksa | | 100 % | | | | | | |
| Jumlah Pengadaan Obat dan BMHP | | 1 Paket | | | | | | |
| Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan alat kesehatan | | 1 Paket | | | | | | |
| 1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 RS | - | DAU | 1 RS | - |
| 1.02.02.2.01.02 | Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Puskesmas | - | DAU | 1 Puskesmas | - |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|-------------|----------------|-----|-------------|----------------|
| 1.02.02.2.01.03 | Pembanguna Falilita Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Faskes | - | DAU | 1 Faskes | - |
| 1.02.02.2.01.04 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun | Dinas Kesehatan | 1 Sarana | - | DAU | 1 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Dinas Kesehatan | 1 RS | - | DAU | 1 RS | - |
| 1.02.02.2.01.06 | Pengembangan Puskesmas | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 3 puskesmas | - | DAK | 3 puskesmas | - |
| 1.02.02.2.01.07 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 1 Pustu | 1,407,418,236 | DAU | 1 Pustu | 1,548,160,060 |
| 1.02.02.2.01.08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 1 Sarana | - | DAU | 1 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | Dinas Kesehatan | 5 Sarana | 1,761,070,967 | DAU | 5 Sarana | 1,937,178,064 |
| 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 2 sarana | 899,952,363 | DAU | 2 sarana | 989,947,599 |
| 1.02.02.2.01.11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 5 Sarana | - | DAU | 5 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | Dinas Kesehatan | 2 Sarana | - | DAU | 2 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | Dinas Kesehatan | 5 Sarana | - | DAU | 5 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 3 Prasarana | 12,080,310,794 | DAU | 3 Prasarana | 13,288,341,873 |
| 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Dinas Kesehatan | 25 Alat | 17,587,500 | DAU | 25 Alat | 19,346,250 |
| 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket | 14,571,314,000 | DAU | 1 paket | - |
| 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan | Dinas Kesehatan | 1 paket | - | DAK | 1 paket | - |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|
| 1.02.02.2.01.18 | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center | Dinas Kesehatan | 2 Sarana | - | DAU | 2 Sarana | - |
| 1.02.02.2.01.19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan | Dinas Kesehatan | 2 Prasarana | - | DAU | 2 Prasarana | - |
| 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 25 Paket | 30,000,000 | DAU | 25 Paket | 33,000,000 |
| 1.02.02.2.01.21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, vaksin, bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 4 Paket | 157,821,000 | DAU | 4 Paket | 173,603,100 |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 16,576,174,350 | DAU | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah Dokumen Administrasi Puskesmas | | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah dokumen administrasi Labkesda | | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah dokumen administrasi IFK | | 12 Dokumen | | | 12 Dokumen | |
| | | Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan kesehatan tradisional | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan | | 25 Pelayanan | | | 25 Pelayanan | |
| | | Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah puskesmas melakukan pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar spesialisasi kurang dari sama dengan 2% | | 25 Pelayanan | | | 25 Pelayanan | |
| | | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah RS Rujukan dan RS Vertikal dengan Pelayanan Sesuai standar FKTP 90% | | 1 RS | | | 1 RS | |
| | | Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan telemedicine | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan PSC 119 | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratanya dengan PSC 119 (100%) | | 1 RS | | | 1 RS | |
| | | Jumlah pelaksanaan audit kematian maternal dan prenatal | | 4 Puskesmas | | | 4 Puskesmas | |
| | | Prevalensi balita wasting | | 7.0% | | | 7.0% | |
| Jumlah remaja putri anemia yang mendapatkan tata laksana | | 58 Orang | | | 58 % | | | |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| | | Jumlah peserta KB Aktif | | 68.152 Orang | | | 68.152 Orang | |
| | | Jumlah Lansia yang dilakukan skrining Kesehatan | | 58.130 Orang | | | 58.130 Orang | |
| | | Jumlah nagari dengan stob buang besar sembarangan (SBS) | | 51 Nagari | | | 61 Nagari | |
| | | Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis | | 25 Puskesmas | | | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar | | 85 TFU | | | 90 TFU | |
| | | Jumlah media KIE yang dibuat | | 3156 KIE | | | 3156 KIE | |
| | | Jumlah Penemuan dan Pengobatan kasus Tuberkulosis | | 1093 Kasus | | | 1113 Kasus | |
| | | Jumlah Penemuan kasus ODHA on Anti Retro Virus (ARV) | | 87 Kasus | | | 98 Kasus | |
| | | Jumlah tata laksana kasus penyakit menular dilaksanakan sesuai standar | | 25 Tatalaksana | | | 25 Tatalaksana | |
| | | Jumlah penduduk yang mendapatkan skrining dan pelayanan Penyakit Tidak Menular | | 33895 Orang | | | 33895 Orang | |
| | | Jumlah kegiatan surveilan epidemiologi dan penanggulangan kasus KLB | | 7 Kegiatan | | | 7 Kegiatan | |
| | | Jumlah kejadian ikutan pasca iminisasi (KIPI) | | 7 Kejadian | | | 7 Kejadian | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | | 169 Dokumen | | | 169 Dokumen | |
| 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 9401 orang | 49,702,200 | 8281 orang | 9780 orang | 54,672,420 |
| 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 9342 orang | 41,434,900 | DAU | 9402 orang | 45,578,390 |
| 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 8903 orang | 42,156,400 | DAU | 8960 orang | 46,372,040 |
| 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 30.691 Orang | 49,802,000 | DAU | 31.827 Orang | 54,782,200 |
| 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 83.626 orang | 37,272,500 | DAU | 82.852 orang | 40,999,750 |
| 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Pada Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 274.295 orang | 54,687,400 | DAU | 279.738 orang | 60,156,140 |
| 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 58.125 orang | 49,799,000 | DAU | 59.976 orang | 54,778,900 |
| 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 33.895 orang | 54,687,450 | DAU | 34.098 orang | 60,156,195 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|---------------------|-------------|-----|--------------------|-------------|
| 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2610 orang | 55,000,000 | DAU | 2710 orang | 60,500,000 |
| 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 897 orang | 42,250,000 | DAU | 907 orang | 46,475,000 |
| 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 2.619 orang | 45,375,000 | DAU | 2.719 orang | 49,912,500 |
| 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 0.018/1000 penduduk | 41,357,000 | DAU | 0.17/1000 penduduk | 45,492,700 |
| 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 39,575,000 | DAU | 12 Dokumen | 43,532,500 |
| 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 44,000,000 | DAU | 12 Dokumen | 48,400,000 |
| 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4000 Dokumen | 200,000,000 | DAU | 4000 Dokumen | 220,000,000 |
| 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dinas Kesehatan | 60 Dokumen | 75,000,000 | DAU | 60 Dokumen | 82,500,000 |
| 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 148,215,000 | DAU | 12 Dokumen | 163,036,500 |
| 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | 89,500,000 | DAU | 12 Dokumen | 98,450,000 |
| 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | 95,000,000 | DAU | 25 Dokumen | 104,500,000 |
| 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveillance Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 25,000,000 | DAU | 4 Dokumen | 27,500,000 |
| 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 3538 orang | 30,000,000 | DAU | 3638 orang | 33,000,000 |
| 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan | 162 orang | 31,055,500 | DAU | 172 orang | 34,161,050 |
| 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | - | DAU | 4 Dokumen | - |
| 1.02.02.2.02.24 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | - | DAU | 4 Dokumen | - |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 51,650,000 | DAU | 4 Dokumen | 56,815,000 |
| 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 14,601,155,000 | DAU | 4 Dokumen | 16,061,270,500 |
| 1.02.02.2.02.27 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan Sekolah | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | Dinas Kesehatan | 250 orang | 25,000,000 | DAU | 260 orang | 27,500,000 |
| 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Dinas Kesehatan | 40 Paket | 44,000,000 | DAU | 40 Paket | 48,400,000 |
| 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Dinas Kesehatan | 103 Dokumen | 95,000,000 | DAU | 103 Dokumen | 104,500,000 |
| 1.02.02.2.02.30 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | - | DAU | 25 Puskesmas | - |
| 1.02.02.2.02.31 | Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | 12 Dokumen | - |
| 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | 12 Dokumen | - | DAU | 12 Dokumen | - |
| 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | - | DAU | 25 Dokumen | - |
| 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen | 300,000,000 | DAU | 2 Dokumen | 341,000,000 |
| 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | - | DAU | 25 Puskesmas | - |
| 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Di Harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Dinas Kesehatan | 7 Laporan | 75,000,000 | DAU | 7 Laporan | 82,500,000 |
| 1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 43,500,000 | DAU | 4 Dokumen | 47,850,000 |
| 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Dinas Kesehatan | 1 Unit | - | DAU | 1 Unit | = |
| 1.02.02.02.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | 224,000,000 | DAU | 169 Dokumen | 246,400,000 |
| 1.02.02.02.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 169 Dokumen | 224,000,000 | DAU | 169 Dokumen | 246,400,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|
| 1.02.02.02.03.02 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 dokumen | 224,000,000 | DAU | 25 dokumen | 246,400,000 |
| 1.02.02.02.03.03 | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan | Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan | Dinas Kesehatan | 25 alat | - | DAU | 25 alat | - |
| 1.02.02.2.04 | Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah puskesmas terakreditasi | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | 144,100,000 | DAU | 25 Puskesmas | |
| | | Jumlah klinik pratama terakreditasi | | 9 Klinik | | | 9 Klinik | |
| | | Jumlah Tempat Praktik Mandiri Dokter/Drg (TMPD) yang melakukan pengukuran INM (Indikator Nasional Mutu) pelayanan kesehatan | | 38 Sarana | | | 38 Sarana | |
| 1.02.02.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | Dinas Kesehatan | 1 RS | 0 | DAU | 1 RS | 0 |
| 1.02.02.2.04.02 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Dinas Kesehatan | 1 RS | 0 | DAU | 1 RS | 0 |
| 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Dinas Kesehatan | 25 Puskesmas | 0 | DAU | 25 Puskesmas | 0 |
| 1.02.02.2.04.04 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Dinas Kesehatan | 25 Dokumen | 31,600,000 | DAU | 25 Dokumen | 34,760,000 |
| 1.02 .03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | | 70% | 1,132,598,099 | | 75% | 1,245,857,909 |
| 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi izin praktek medis dan nakes yang diberikan | Dinas Kesehatan | 900 Rekomendasi | 59,150,000 | DAU | 900 Rekomendasi | 65,065,000 |
| 1.02.03.2.01.01 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 900 Dokumen | 27,650,000 | DAU | 900 Dokumen | 30,415,000 |
| 1.02.03.2.01.02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Dinas Kesehatan | 75 Dokumen | 31,500,000 | DAU | 80 Dokumen | 34,650,000 |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar | Dinas Kesehatan | 83 Nakes | 1,020,400,000 | DAU | 83 Nakes | 1,122,440,000 |
| 1.02.03.2.02.01 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 2 Dokumen | 35,000,000 | DAU | 2 Dokumen | 38,500,000 |
| 1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | Dinas Kesehatan | 100 Orang | 952,900,000 | DAU | 120 Orang | 1,048,190,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan | 100 Dokumen | 32,500,000 | DAU | 120 Dokumen | 35,750,000 |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan | Dinas Kesehatan | 45 orang | 53,048,099 | DAU | 50 orang | 58,352,909 |
| 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | Dinas Kesehatan | 200 orang | 53,048,099 | DAU | 250 orang | 58,352,909 |
| 1.02..04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar | | 100% | 122,000,000 | DAU | 100% | 134,200,000 |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT yang memiliki izin | Dinas Kesehatan | 75 Sarana | 50,000,000 | DAU | 75 Sarana | 55,000,000 |
| 1.02.04.2.01.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dinas Kesehatan | 34 Dokumen | 50,000,000 | DAU | 35 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Dinas Kesehatan | 34 Sarana | - | DAU | 35 Sarana | - |
| 1.02.04.2.01.03 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin | Dinas Kesehatan | 34 Sarana | - | DAU | 35 Sarana | - |
| 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Alat Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah SPPIRT yang diterbitkan | Dinas Kesehatan | 70 SPPIRT | -0 | DAU | 70 SPPIRT | - |
| 1.02.04.2.02.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu an PKRT 1 Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen | - | DAU | 3 Dokumen | - |
| 1.02.04.2.02.02 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen | - | DAU | 3 Dokumen | - |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah pengawasan sarana produksi PKRT | Dinas Kesehatan | 3 Sarana | 17,500,000 | DAU | 3 Sarana | 19,250,000 |
| 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Di produksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 3 Dokumen | 17,500,000 | DAU | 3 Dokumen | 19,250,000 |
| 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah | Jumlah tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar | Dinas Kesehatan | 75 TPP | 25,000,000 | DAU | 75 TPP | 27,500,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah sarana air minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar | | 75 Sarana Air Minum | | | 75 Sarana Air Minum | |
|-----------------|---|--|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| | | Jumlah makanan siap saji yang di awasi | | 100 Makanan Siap Saji | | | 100 Makanan Siap Saji | |
| | | Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang diawasi | | 100 Sarana | | | 100 Sarana | |
| 1.02.04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Dinas Kesehatan | 30 Dokumen | 25,000,000 | | 35 Dokumen | 27,500,000 |
| 1.02.04.2.05 | Penerbita Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan yang diterbitkan | | 25 Sticker | 7,500,000 | DAU | 30 Sticker | 8,250,000 |
| 1.02.04.2.05.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | 25 Dokumen | 7,500,000 | DAU | 30 Dokumen | 8,250,000 |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuma Industri Rumah Tangga | Dinas Kesehatan | 25 Pemeriksaan | 22,000,000 | DAU | 30 Pemeriksaan | 24,200,000 |
| 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 25 Produk | 22,000,000 | DAU | 30 Produk | 24,200,000 |
| 1.02.04.2.06.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga | Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | Dinas Kesehatan | 25 data | - | DAU | 30 data | - |
| 1.02 .05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS | | 80% | 60,480,000 | DAU | 82% | 66,528,000 |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan GERMAS | Dinas Kesehatan | 2 Kebijakan | 2,480,000 | DAU | 2 Kebijakan | 2,728,000 |
| 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | 2,480,000 | DAU | 15 Dokumen | 2,728,000 |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nagari yang menerapkan kebijakan GERMAS | Dinas Kesehatan | 103 Nagari | 33,000,000 | DAU | 103 Nagari | 36,300,000 |
| 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan | Dinas Kesehatan | 15 Dokumen | 33,000,000 | DAU | 15 Dokumen | 36,300,000 |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah posyandu aktif yang dilakukan pembinaan | Dinas Kesehatan | 473 Posyandu | 25,000,000 | DAU | 473 Posyandu | 27,500,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|
| 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Dinas Kesehatan | 4 Dokumen | 25,000,000 | DAU | 4 Dokumen | 27,500,000 |
| UPTD se Kabupaten Padang Pariaman | | | | | | | | |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | Puskesmas Sungai Geringging | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | Puskesmas Koto Bnagko | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | Puskesmas Batu Basa | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | Puskesmas Ampalu | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | Puskesmas Sungai Limau | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | Puskesmas Kampung Dalam | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | Puskresmas Sikucur | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | Puskesmas Ulakan | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | Puskesmas Padang Alai | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | Puskresmas Pauh Kamar | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | Puskesmas Gasan Gadang | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | Puskesmas Sungai Sarik | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | Puskesmas Kayu Tanam | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 70,000,000 | | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | Puskesmas Padang Sago | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | 1 Dokumen | 50,000,000 | | 1 Dokumen | 55,000,000 |



RENCANA KERJA 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | Puskesmas Sikabu | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | Puskesmas Lubuk Alung | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | Puskesmas Enam Lingsung | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | Puskesmas Kampung Guci | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | Puskesmas Anduring | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 66,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | Puskesmas Sintuk | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | Puskesmas Ketaping | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | Puskesmas Limau Purut | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023 | Puskesmas Sicincin | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024 | Puskesmas Pasar Usang | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 70,000,000 | 1 Dokumen | 77,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0025 | Puskesmas Pataman | Jumlah Puskesmas | Dokumen Operasional | Pelayanan Pelayanan | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 55,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026 | UPTD LABKESDA | Jumlah Dokumen Kesehatan Lainnya | Dokumen Operasional | Pelayanan Fasilitas | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 330,000,000 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0027 | UPTD IFK | Jumlah Dokumen Kesehatan Lainnya | Dokumen Operasional | Pelayanan Fasilitas | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 330,000,000 |



RENCANA KERJA 2024

BAB V PENUTUP

1. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang sehat dan mandiri, mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.
4. Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Parit Malintang, 6 November 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Padang Pariaman



dr. H. Aspinuddin

NIP. 19640501 199803 1 001